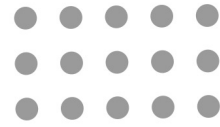


PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024





PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024



PETA KALIMANTAN TIMUR



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Buku Profil Data Statistik Sektorial Kalimantan Timur Tahun 2024 telah tersusun. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini untuk memenuhi kebutuhan data di Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan tugas pokok instansi di lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.

Data yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data-data statistik sektoral dari 36 Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023. Buku ini menyajikan data statistik sektoral dengan pembagian tematik berupa data umum, data sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan, data sumber pertanian dan ketahanan pangan, data perhubungan dan infrastruktur, data perdagangan, industry, koperasi dan modal, data ekonomi dan keuangan, data penanggulangan bencana dan satpol pp, dan data telekomunikasi dan pariwisata. Memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat, sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunaanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data-data statistik sektoral. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Profil Data Statistik Sektorial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan buku data statistik sektoral ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan agar ke depannya buku statistik sektoral ini dapat disajikan lebih baik. Sekian dan terima kasih.

Samarinda, Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

PETA KALIMANTAN TIMUR.....	III
KATA SAMBUTAN.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR GRAFIK.....	XIII
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Provinsi Kalimantan Timur.....	2
1.2 Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur.....	5
1.3 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur.....	6
BAB II SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN.....	9
2.1 DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.....	10
2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.....	21
2.3 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.....	31
2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	34
2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	44
2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim.....	54
2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim.....	57
2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.....	60
BAB III PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	67
3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim.....	68
3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	71
3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.....	81
3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	89
3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.....	102
3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.....	116

BAB IV SOSIAL MASYARAKAN DAN KESEJAHTERAAN	127
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	128
4.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur	135
4.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur	142
4.4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur	151
4.5 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.....	158
4.6 Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur....	163
4.7 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur	166
 BAB V PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN MODAL.....	 171
5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ...	172
5.2 Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur	184
5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	194
 BAB VI EKONOMI DAN KEUANGAN	 203
6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	204
6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	206
6.3 Badan Pendapatan Daerah	211
6.4 Biro Perekonomian Setda	216
6.5 Inspektorat	218
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220
 BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP	 233
7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	234
7.2 Satuan Polisi Pamong Praja.....	241
7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	248
 BAB VIII TELEKOMUNIKASI, PARIWISATA	 257
8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.....	258
8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	263

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2023.....	14
Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk perKabupaten/Kota, 2023.....	15
Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	16
Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023....	17
Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2023	18
Tabel 2.1.6 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2023.....	19
Tabel 2.1.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	20
Tabel 2.2.1 Jumlah Panti Werdha dan Penghuninya Menurut Status di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023	26
Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023.....	27
Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023.....	28
Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022	29
Tabel 2.2.5 Jumlah Organisasi Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023	30
Tabel 2.3.1 Jumlah tenaga Widyaiswara berdasarkan gender, jabatan dan pendidikan, 2023.....	32
Tabel 2.3.2 Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, 2022 - 2023	33
Tabel 2.3.3 Jumlah Peserta dan Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023.....	33
Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023.....	36
Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023.....	37
Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023.....	38
Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023.....	39
Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023.....	40
Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2023.....	42
Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	46

Tabel 2.5.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	47
Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	47
Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	48
Tabel 2.5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	49
Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	51
Tabel 2.5.8 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	52
Tabel 2.5.9 Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	53
Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023	56
Tabel 2.6.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Bumdes Yang Aktif,Bumdes Yang Dibina,Pasar Desa, dan Pasar Desa Yang Dibina, 2021-2023	56
Tabel 2.7.1 Data Cabang Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023	58
Tabel 2.7.2 Jumlah Fasilitas, Organisasi, Kegiatan, dan Penghargaan dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023.....	59
Tabel 2.8.1 Indikator RPJMD Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023.....	62
Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023.....	63
Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023	64
Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023	69
Tabel 3.1.2 Data Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup, 2020-2023.....	70
Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	74
Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	75
Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022	76
Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022.....	77
Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022.....	78
Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022.....	79

Tabel 3.2.7 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022	80
Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023	85
Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023	86
Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023	86
Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	87
Tabel 3.3.5 Luas Lahan yang Direboisasi dan Direhabilitasi di Wilayah Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023 (ha)	88
Tabel 3.4.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022 dan 2023	91
Tabel 3.4.2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022	92
Tabel 3.4.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022	93
Tabel 3.4.4 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023	94
Tabel 3.4.5 Produksi Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023	95
Tabel 3.4.6 Produksi Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023	96
Tabel 3.4.7 Luas Area (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	97
Tabel 3.4.8 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023	98
Tabel 3.4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2023	99
Tabel 3.4.10 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha), 2018-2022	100
Tabel 3.4.11 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ton), 2018-2022	101
Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023	106
Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022	107
Tabel 3.5.3 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022	107

Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022.....	108
Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022	109
Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022.....	110
Tabel 3.5.6 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022.....	111
Tabel 3.5.7 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2023	112
Tabel 3.5.8 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Buah-Buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2022 dan 2023	113
Tabel 3.5.9 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2022 dan 2023	114
Tabel 3.5.10 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2022 dan 2023.....	115
Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	120
Tabel 3.6.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	121
Tabel 3.6.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kabupaten/ Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	123
Tabel 3.6.4 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	124
Tabel 4.1.1 Jumlah Kendaraan Dan Rasio Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022	131
Tabel 4.1.2 Daftar Terminal Bus di Provinsi Kalimantan Timur, 2023.....	131
Tabel 4.1.3 Jumlah Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2023.....	132
Tabel 4.1.4 Daftar Bandara di Provinsi Kalimantan Timur dengan Status Sudah Beroperasi, 2023	134
Tabel 4.2.1 Data Sumber Air Potensial, 2023.....	138
Tabel 4.2.2 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022.....	139
Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2020-2023	140
Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2020-2023.....	141
Tabel 4.3.1 Suhu Terendah, Suhu Tertinggi, dan Suhu Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (derajat celsius), 2020-2023.....	146
Tabel 4.3.2 Kelembaban Udara Terendah, Kelembaban Udara Tertinggi, dan Kelembaban Udara	

Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2020-2023.....	147
Tabel 4.3.3 Curah Hujan Terendah, Curah Hujan Tertinggi, dan Curah Hujan Total dalam Satu Tahun di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mm), 2020-2023.....	148
Tabel 4.3.4 Kecepatan Angin Terendah, Kecepatan Angin Tertinggi, dan Kecepatan Angin Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (m/detik), 2020-2023.....	149
Tabel 4.3.5 Rata-rata Penyinaran Matahari Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*	150
Tabel 4.3.6 Rata-rata Tekanan Udara Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mb), 2020-2023	150
Tabel 4.4.1 Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2022.	154
Tabel 4.4.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2017-2023	155
Tabel 4.4.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2017-2023	155
Tabel 4.4.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2017-2023.....	156
Tabel 4.4.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023	157
Tabel 4.4.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023.....	158
Tabel 4.5.1 Indikator sdgs Biro Organisasi, 2020-2023.....	162
Tabel 4.5.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2019-2022	162
Tabel 4.5.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2020-2023	163
Tabel 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain Yang Masih Berlaku, 2017-2023	166
Tabel 4.6.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2021-2023	166
Tabel 4.7.1 Daftar Data Prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023..	169
Tabel 4.7.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	169
Tabel 5.1.1..... Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2017-2023	175
Tabel 5.1.2.....Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2022-2023	176
Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2022-2023.....	177
Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	178
Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2023	179
Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2023	180
Tabel 5.1.7 Data realisasi pelaksanaan pelatihan pada uptd blki Balikpapan provinsi Kaltim tahun	

2018-2020.....	181
Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2017-2023	182
Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2016-2023	183
Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2021-2023.....	186
Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2023	187
Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Keegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023.....	188
Tabel 5.2.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, 2016-2020	188
Tabel 5.2.5 Cakupan bina kelompok pengrajin, 2016-2020.....	189
Tabel 5.2.6 Data IKM Berorientasi Ekspor, 2016-2021.....	189
Tabel 5.2.7 Data Indikator RPJMD, 2016-2021	190
Tabel 5.2.8 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2017-2023.....	190
Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2021-2023.....	191
Tabel 5.2.10 Data Koperasi, 2021-2023	191
Tabel 5.2.11 Data Potensi Industri, 2021-2023.....	192
Tabel 5.2.12Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023	192
Tabel 5.2.13 Jumlah koperasi menurut prinsip keuangan, 2021-2023.....	193
Tabel 5.2.14 Data Jumlah Pasar, 2018-2023.....	193
Tabel 5.2.15 Jumlah Wirausaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023.....	193
Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2023	198
Tabel 5.3.2Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023.....	199
Tabel 5.3.3Produksi dan Pemasaran Batubara di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021-2023.....	199
Tabel 5.3.4Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2023.....	200
Tabel 5.3.5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2017-2023.....	200
Tabel 6.1.1 Data Topografi Provinsi Kalimantan Timur , 2016-2020	204
Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2023	205
Tabel 6.2.1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	207
Tabel 6.2.2 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	208
Tabel 6.2.3 Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan TA 2021 – 2023	209
Tabel 6.2.4 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2021–2023.....	209
Tabel 6.2.5 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2023.....	211
Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023 (rupiah).....	215
Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	216
Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023.....	217
Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023	217
Tabel 6.3.5 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022-2023 (rupiah)	218

Tabel 6.3.6 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	218
Tabel 6.3.7 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022-2023	219
Tabel 6.4.1 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019-2021 Provinsi Kalimantan Timur	220
Tabel 6.4.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	221
Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023.....	223
Tabel 6.5.2 Data Pengawasan (Usulan Data Baru) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023	224
Tabel 6.6.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	227
Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	228
Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	230
Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2022	231
Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	232
Tabel 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022.....	234
Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	235
Tabel 6.6.8 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022	236
Tabel 6.6.9 Jumlah Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2022.....	237
Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2022	236
Tabel 7.1.2 Jumlah LSM Tahun 2020-2023	236
Tabel 7.1.3 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	237
Tabel 7.2.1 Data Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023.....	245
Tabel 7.2.2 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2021-2023	246
Tabel 7.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022	247
Tabel 7.2.4 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	247
Tabel 7.2.5 Jumlah Aparat Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	248
Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Januari-Oktober 2022.....	250
Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	251
Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	254

Tabel 7.3.4 Kerusakan Kasawan Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023	255
Tabel 7.3.5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021.....	256
Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2023.....	260
Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2021-2023.....	261
Tabel 8.1.3 RPJM Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022.....	262
Tabel 8.1.4 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2019-2023.....	262
Tabel 8.2.1 Data Jumlah Hotel Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023.....	265
Tabel 8.2.2 Data Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2022.....	266
Tabel 8.2.3 Data jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2022	267
Tabel 8.2.4 Data jumlah tenaga kerja di hotel berbintang di kaltim 2022	267
Tabel 8.2.6 Data pramuwisata dan toko cinderamata provinsi kaltim 2016-2023.....	268
Tabel 8.2.5 Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kalimantan Timur Tahun 2017-2023	268

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2023	11
Grafik 2.2.1. Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023.....	25
Grafik 2.3.1 Jumlah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) , Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan pelatihan pra jabatan (LATSAR CPNS), 2020-2022	31
Grafik 2.4.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan 2023.....	35
Grafik 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023	44
Grafik 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023	54
Grafik 2.7.1 Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur 2022-2023	61
Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023	68
Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2022	71
Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2018-2022.....	73
Grafik 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023	83
Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023	84
Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023.....	89
Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023	90
Grafik 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2022 dan 2023.....	105
Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022	119
Grafik. 4.1.1 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022	129
Grafik. 4.1.2 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Bandara di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022	130
Grafik. 4.2.1 Panjang Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kondisinya (km), 2020-2023.....	135
Grafik. 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi menurut Kondisinya (km) di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023	136
Grafik. 4.3.1 Curah Hujan dalam Satu tahun di Tiga Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (mm), 2020-2023.....	143

Grafik 4.4.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi Pengunjung, 2020-2023	152
Grafik 4.4.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim , 2023.....	153
Grafik 4.5.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2020-2023....	160
Grafik 4.5.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2020-2023	161
Grafik 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku, 2019-2023	165
Grafik 4.7.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022.	168
Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja yang Mendaftar dan yang Ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2023.....	174
Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023	184
Grafik 5.3.1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023	195
Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023	214
Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PDMN Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022.....	226
Grafik 7.1.1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur	235
Grafik 7.2.1 Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022	245
Grafik 7.3.1 Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi kalimantan Timur	249
Grafik 8.1.1Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022	258
Grafik 8.2.1 Total Wisatawan dan Target Kunjungan Wisatawan di Provinsi kalimantan Timur, 2016-2022.....	263

x x x x x x
x x x x x x

x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

**PROFIL
STATISTIK
SEKTORAL
PEMBANGUNAN**
Kalimantan Timur Tahun 2024



Dasar hukum pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022** tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini mengatur tentang pemindahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara, termasuk pengelolaan wilayah, tata ruang, serta peran pemerintah pusat dan daerah.



Potensi Daerah



Pertambangan
(Batubara)



Perkebunan
(Kelapa Sawit)



Kehutanan
(Kayu olahan)

BAB I GAMBARAN UMUM

Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 1956, wilayah Kalimantan Timur diresmikan sebagai wilayah administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Gubernur pertamanya adalah APT Pranoto. Sebelumnya, Kalimantan Timur merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan. Menanggapi aspirasi masyarakat, pada tahun 1956 wilayah tersebut dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.9). Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:

1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan Kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.

Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong.
2. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
3. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor. Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar
2. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta
3. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau
4. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan
5. Kota Bontang (peningkatan kota administrative Bontang menjadi kotamadya)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (UU No.20 Tahun 2012). Lima Kota/ Kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah kota/kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota/kabupaten menjadi 9 kota/kabupaten.

Tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabupaten termuda dikaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenaikan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 Kota/Kabupaten.



1.1 Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif Provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dimana sungai menjadi salah satu sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Adapun sungai terpanjang di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam. Sungai ini berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

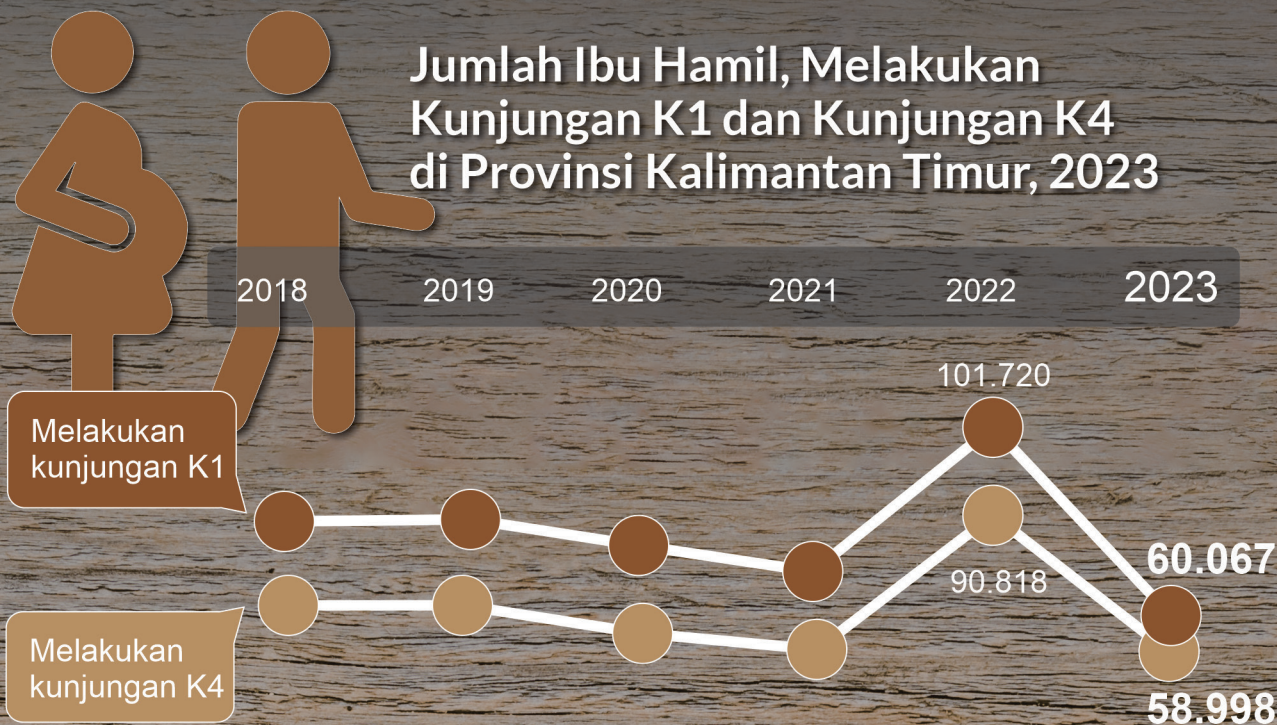
1.2 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur

Visi Kaltim Berdaulat Tahun 2023
Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat.

Misi

- 1) Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan Kunjungan K4 di Provinsi Kalimantan Timur, 2023



BAB II SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

2.1 DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Data hasil registrasi penduduk adalah data yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Registrasi kependudukan tersebut dicatat secara administrasi ketika penduduk melakukan pencatatan status kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data non registrasi merupakan data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Sedangkan data lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan perkawinan (muslim) serta perceraian (muslim). Data lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung terkait dengan data kependudukan untuk pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Pada elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini meliputi data yang berkaitan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Variabel kuantitas penduduk merupakan jumlah penduduk dari selisih perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati dan pindah, datang. Sedangkan variabel kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

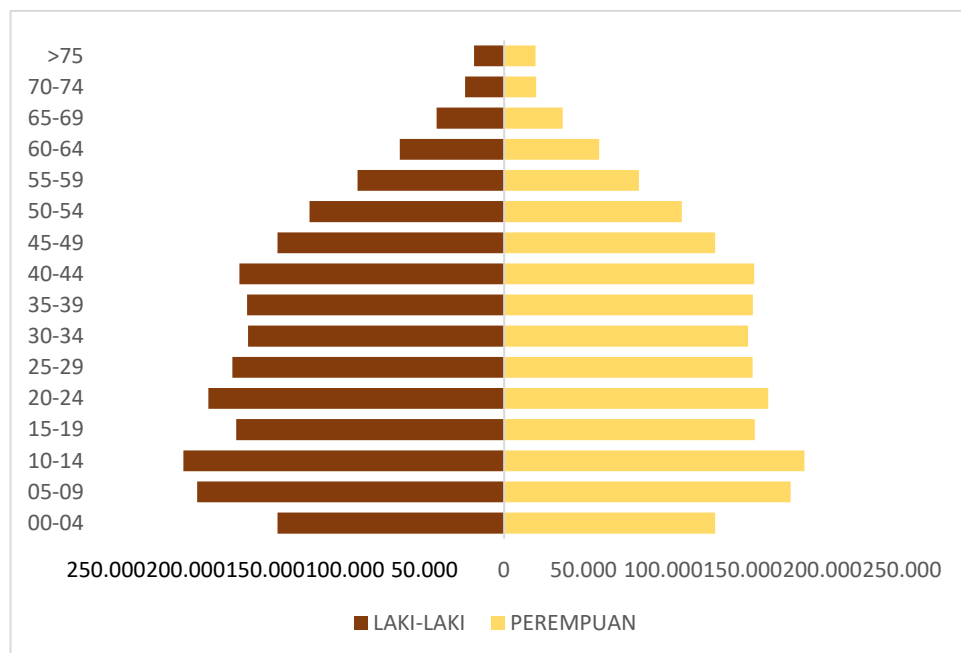


Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Variabel Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian data kependudukan skala kabupaten/

kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut berarti untuk data Perkembangan Kependudukan didasarkan pada DAK 2 (Data Agregat Kependudukan Semester 2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan 2 kali dalam setahun. Bila ada perbedaan antara DAK 2 dengan data di daerah, maka data DAK 2 yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan data resmi kependudukan.

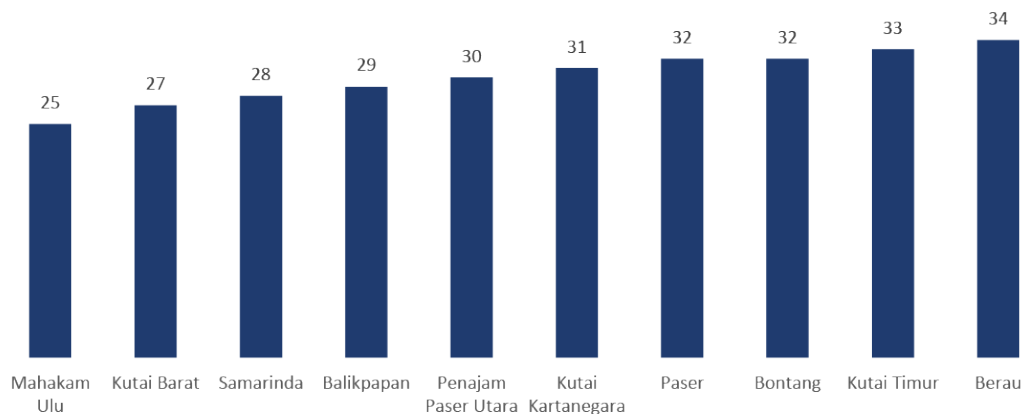
Grafik 2.1.1. Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2023



Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 menunjukkan komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif (15-64 tahun). Kelompok usia produktif, terutama di rentang 20-34 tahun, memiliki jumlah populasi terbesar, menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tenaga kerja yang signifikan dan menjadi potensi besar bagi ekonomi lokal. Selain itu, kelompok usia muda (0-14 tahun) juga cukup besar, yang mengindikasikan angka kelahiran yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada kelompok usia lansia (65 tahun ke atas), populasi terlihat lebih sedikit, menandakan struktur penduduk yang masih relatif muda secara keseluruhan.

Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun. Dominasi jumlah perempuan lebih terlihat pada kelompok usia lansia, sedangkan di usia-usia muda, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Piramida ini mencerminkan bahwa Kalimantan Timur masih berada dalam fase demografi yang dinamis dengan dominasi populasi usia produktif, namun harus bersiap untuk menghadapi tantangan pertumbuhan populasi lansia di masa mendatang.

Grafik 2.1.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur 2022



Rasio Ketergantungan, juga dikenal sebagai dependency ratio, dapat berfungsi sebagai indikator kasar untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara, baik sebagai negara maju atau yang sedang berkembang. Dependency ratio adalah indikator demografi yang signifikan, di mana semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh populasi produktif (usia 15-64 tahun) dalam membiayai baik populasi yang belum produktif (usia

0-14 tahun) maupun populasi yang tidak lagi produktif (usia 65 tahun ke atas). Di sisi lain, rasio ketergantungan yang lebih rendah mengindikasikan beban yang lebih ringan yang harus ditanggung oleh populasi produktif untuk membiayai kelompok penduduk yang masih tergolong non-produktif.

Konsep ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang bergantung pada populasi usia kerja. Rasio ketergantungan dihitung dengan membagi total populasi yang tidak produktif dengan total populasi yang produktif. Secara umum, rasio ketergantungan di Kalimantan Timur sekitar 30. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Kalimantan Timur harus menanggung beban dari sekitar 30 penduduk yang belum atau tidak lagi produktif, seperti anak-anak atau lansia. Angka ini masih berada di bawah angka 50 yang dianggap cukup rendah. Meskipun persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) terhadap total populasi di Kalimantan Timur kecil (3,6%), jumlah absolutnya cukup besar, mencapai 167.843 jiwa. Karena jumlah penduduk usia lanjut yang tinggi ini, diperlukan upaya pembangunan infrastruktur seperti panti jompo, rumah sakit, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Apabila melihat data dalam tabel penduduk yang tidak produktif, Kota Samarinda menonjol dengan populasi usia muda (0-14 tahun) yang berjumlah 207.586 jiwa. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rasio ketergantungan terendah, yaitu 25, yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya perkebunan di wilayah tersebut yang menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat. Di sisi lain, Kabupaten Berau memiliki rasio ketergantungan tertinggi, mencapai 34.



Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis.Kelamin				Jumlah	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	156.903	51,71%	146.521	48,29%	303.424	7,57%
Kutai Barat	410.731	52,12%	377.382	47,88%	788.113	19,66%
Kutai Kartanegara	149.271	53,12%	131.727	46,88%	280.998	7,01%
Kutai Timur	94.596	52,52%	85.523	47,48%	180.119	4,49%
Berau	229.815	53,49%	199.825	46,51%	429.640	10,72%
Penajam Paser Utara	101.816	51,80%	94.750	48,20%	196.566	4,90%
Mahakam Ulu	20.553	53,39%	17.945	46,61%	38.498	0,96%
Kota.Balikpapan	377.458	51,11%	361.074	48,89%	738.532	18,43%
Kota.Samarinda	438.477	50,87%	423.401	49,13%	861.878	21,51%
Kota.Bontang	98.222	51,70%	91.746	48,30%	189.968	4,74%
Kalimantan.Timur	2.077.842	51,85%	1.929.894	48,15%	4.007.736	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk perKabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas KM ²	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	156.903	146.521	303.424	11.906,96	25,48
Kutai Barat	410.731	377.382	788.113	25.988,92	30,32
Kutai Kartanegara	149.271	131.727	280.998	21.735,19	12,93
Kutai Timur	94.596	85.523	180.119	13.709,92	13,14
Berau	229.815	199.825	429.640	31.051,71	13,84
Penajam Paser Utara	101.816	94.750	196.566	2.923,73	67,23
Mahakam Ulu	20.553	17.945	38.498	19.449,41	1,98
Kota Balikpapan	377.458	361.074	738.532	512,25	1441,74
Kota Samarinda	438.477	423.401	861.878	716,25	1203,32
Kota Bontang	98.222	91.746	189.968	163,14	1164,45
Kalimantan Timur	2.077.842	1.929.894	4.007.736	127.346,92	31,47

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Penduduk Kaltim Tahun 2022			Penduduk Kaltim Tahun 2023			Pertambahan Penduduk 2022-2023	Pertumbuhan Penduduk 2022-2023
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	153.455	143.127	296.582	156.903	146.521	303.424	6.842	2,31%
Kutai Barat	405.154	372.942	778.096	410.731	377.382	788.113	10.017	1,29%
Kutai Kartanegara	144.720	128.167	272.887	149.271	131.727	280.998	8.111	2,97%
Kutai Timur	92.207	83.403	175.610	94.596	85.523	180.119	4.509	2,57%
Berau	227.438	198.349	425.787	229.815	199.825	429.640	3.853	0,90%
Penajam Paser Utara	99.423	92.544	191.967	101.816	94.750	196.566	4.599	2,40%
Mahakam Ulu	19.920	17.398	37.318	20.553	17.945	38.498	1.180	3,16%
Kota Balikpapan	371.777	355.888	727.665	377.458	361.074	738.532	10.867	1,49%
Kota Samarinda	432.306	417.411	849.717	438.477	423.401	861.878	12.161	1,43%
Kota Bontang	96.433	89.704	186.137	98.222	91.746	189.968	3.831	2,06%
Kalimantan Timur	2.042.839	1.898.940	3.941.774	2.077.842	1.929.894	4.007.736	65.962	1,67%

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	142.433	3,59	132.589	3,34	275.022	6,93
05-09	192.893	4,86	180.063	4,53	372.956	9,39
10-14	201.491	5,07	188.601	4,75	390.092	9,82
15-19	168.378	4,24	157.442	3,97	325.820	8,21
20-24	185.793	4,68	165.990	4,18	351.783	8,86
25-29	170.752	4,30	156.083	3,93	326.835	8,23
30-34	160.884	4,05	153.284	3,86	314.168	7,91
35-39	161.359	4,06	156.248	3,93	317.607	8,00
40-44	166.188	4,19	157.127	3,96	323.315	8,14
45-49	142.440	3,59	132.533	3,34	274.973	6,92
50-54	122.208	3,08	111.573	2,81	233.781	5,89
55-59	92.022	2,32	84.651	2,13	176.673	4,45
60-64	65.581	1,65	59.704	1,50	125.285	3,16
65-69	42.330	1,07	36.873	0,93	79.203	1,99
70-74	24.489	0,62	20.116	0,51	44.605	1,12
>75	18.807	0,47	19.839	0,50	38.646	0,97
Jumlah	2.058.048	51,83	1.912.716	48,17	3.970.764	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur, 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
00-04	142.433	6,92	132.589	6,93	107
05-09	192.893	9,37	180.063	9,41	107
10-14	201.491	9,79	188.601	9,86	107
15-19	168.378	8,18	157.442	8,23	107
20-24	185.793	9,03	165.990	8,68	112
25-29	170.752	8,30	156.083	8,16	109
30-34	160.884	7,82	153.284	8,01	105
35-39	161.359	7,84	156.248	8,17	103
40-44	166.188	8,08	157.127	8,21	106
45-49	142.440	6,92	132.533	6,93	107
50-54	122.208	5,94	111.573	5,83	110
55-59	92.022	4,47	84.651	4,43	109
60-64	65.581	3,19	59.704	3,12	110
65-69	42.330	2,06	36.873	1,93	115
70-74	24.489	1,19	20.116	1,05	122
>75	18.807	0,91	19.839	1,04	95
Jumlah	2.058.048	100,00	1.912.716	100,00	108

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.6 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Sex Ratio
	L	P	
(1)	(2)	(4)	(4)
Paser	156.903	146.521	107
Kutai Barat	410.731	377.382	109
Kutai Kartanegara	149.271	131.727	113
Kutai Timur	94.596	85.523	111
Berau	229.815	199.825	115
Penajam Paser Utara	101.816	94.750	107
Mahakam Ulu	20.553	17.945	115
Kota Balikpapan	377.458	361.074	105
Kota Samarinda	438.477	423.401	104
Kota Bontang	98.222	91.746	107
Kalimantan Timur	2.077.842	1.929.894	108

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Usia.Anak	Usia.Produktif	Usia.Lanjut	Dependency.Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	77.588	206.666	12.328	32
Kutai Barat	42.714	124.378	8.518	27
Kutai Kartanegara	202.076	541.283	34.737	31
Kutai Timur	112.727	300.684	12.376	33
Berau	73.201	190.483	9.203	34
Penajam Paser Utara	49.612	132.909	9.446	30
Mahakam Ulu	8.678	26.504	2.136	25
Kota Balikpapan	182.013	509.824	35.828	29
Kota Samarinda	207.586	604.614	37.517	28
Kota Bontang	47.732	132.651	5.754	32
Kalimantan Timur	1.003.927	2.769.996	167.843	30

Sumber : Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 75 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 92 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL". Dan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas /sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Prov. Kaltim maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dandunia usaha
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.



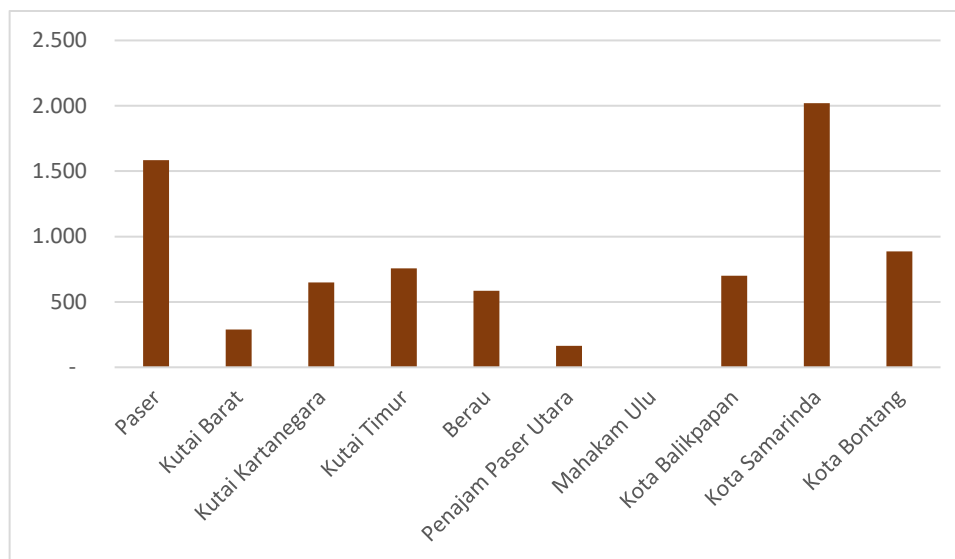
Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Prov. Kalimantan Timur maka disusunla suatu kebijakan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya
2. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam penanggulangan bencana
6. Perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan mengembangkan komitmen dan aksi masyarakat sebagai pelaku usaha kesejahteraan sosial.
7. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala, monitoring dan evaluasi serta reviu.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah merilis sejumlah data yang memberikan gambaran tentang kondisi sosial di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan kepada lansia, anak terlantar, pekerja sosial masyarakat (PSM), serta organisasi dan karang taruna di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui data-data yang terkumpul, kita dapat mengidentifikasi tren dan perubahan yang terjadi dalam bidang sosial selama beberapa periode hingga tahun 2023.



Grafik 2.2.1. Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023



Grafik Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 menggambarkan situasi jumlah anak terlantar dalam rentang usia 0-21 tahun di berbagai wilayah. Kabupaten Paser memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 1.583, sementara Kabupaten Kutai Barat memiliki 289 anak terlantar. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 649 sedangkan di Kabupaten Kutai Timur terdapat 757 anak terlantar. Kabupaten Berau memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 585, dan Penajam Paser Utara memiliki 164 anak terlantar. Kabupaten Mahakam Ulu tidak memiliki data yang tersedia.

Di kota, Balikpapan memiliki 699 anak terlantar, sementara Samarinda memiliki jumlah anak terlantar sebanyak 2.019. Bontang memiliki 886 anak terlantar. Jumlah total anak terlantar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah 7.631. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi jumlah anak terlantar di berbagai wilayah Kalimantan Timur dalam tahun tersebut.

Tabel 2.2.1 Jumlah Panti Werdha dan Penghuninya Menurut Status di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023

Tahun	Panti Werdha			Penghuni		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pemerintah	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	1	6	7	110	2975	3085
2020	1	9	10	110	3475	3585
2021	1	12	13	110	3477	3587
2022	1	12	13	110	3665	3775
2023	1	12	13	110	5775	5885

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	1.501	1.583	1.583
Kutai Barat	184	153	289
Kutai Kartanegara	649	523	649
Kutai Timur	337	287	757
Berau	264	584	585
Penajam Paser Utara	203	164	164
Mahakam Ulu	-	-	-
Kota Balikpapan	1.460	614	699
Kota Samarinda	1.448	1.129	2.019
Kota Bontang	526	436	886
Kalimantan Timur	6.572	5.473	7.631

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	112	69	69
Kutai Barat	25	24	24
Kutai Kartanegara	46	57	57
Kutai Timur	5	5	5
Berau	62	20	20
Penajam Paser Utara	95	95	95
Mahakam Ulu	4	4	4
Kota Balikpapan	59	34	34
Kota Samarinda	305	300	300
Kota Bontang	63	60	60
Kalimantan Timur	776	668	668

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	27	62	61
Kutai Barat	179	179	22
Kutai Kartanegara	63	63	228
Kutai Timur	81	81	0
Berau	76	76	76
Penajam Paser Utara	54	54	53
Mahakam Ulu	-	-	-
Kota Balikpapan	34	34	41
Kota Samarinda	59	59	70
Kota Bontang	16	16	16
Kalimantan Timur	589	624	567

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.5 Jumlah Organisasi Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

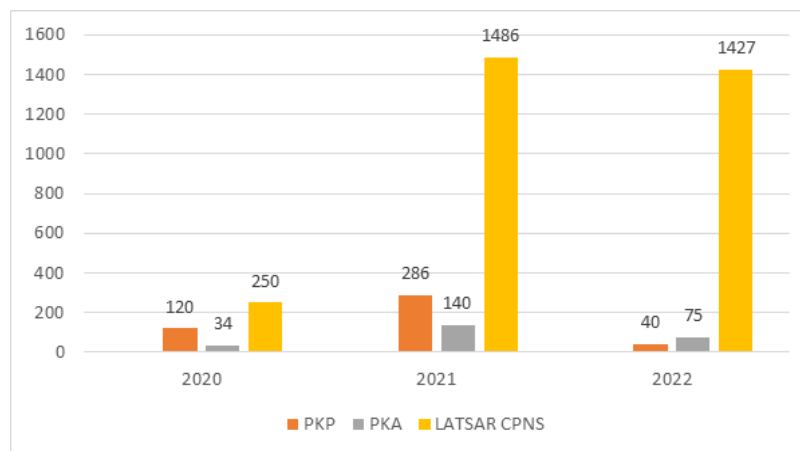
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	16	16	16
Kutai Barat	3	4	4
Kutai Kartanegara	21	21	21
Kutai Timur	6	6	11
Berau	5	5	10
Penajam Paser Utara	8	8	8
Mahakam Ulu	-	-	-
Kota Balikpapan	38	38	38
Kota Samarinda	29	29	33
Kota Bontang	9	9	9
Kalimantan Timur	135	136	150

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.3 BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Di era saat ini, peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur sangat penting. BPSDM memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tenaga kerja yang unggul, terampil dalam teknologi dan inovasi, serta peka terhadap isu lingkungan. Dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai, BPSDM dapat mempersiapkan masyarakat Kaltim menghadapi tantangan global, memajukan sektor ekonomi, serta memastikan kesinambungan lingkungan dalam menjaga keberlanjutan wilayah ini di masa depan.

Grafik 2.3.1. Jumlah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan pelatihan pra jabatan (LATSAR CPNS), 2020-2022



Dalam periode 2020 hingga 2022, data dalam grafik diatas menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah peserta pelatihan di berbagai kategori. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mengalami fluktuasi yang tajam, turun drastis dari 120 peserta pada tahun 2020 menjadi hanya 40 peserta pada tahun 2022. Sementara itu, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dengan 140 peserta, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan 75 peserta. Di sisi lain, Pelatihan Pra Jabatan (LATSAR CPNS) menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan, tetapi tetap memiliki jumlah peserta yang tinggi, dengan 1427 peserta pada tahun 2022. Selama periode tiga tahun tersebut, penting bagi pihak yang terlibat dalam perencanaan pelatihan untuk memahami tren ini dan meresponsnya dengan tepat. Hal ini akan membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan memastikan bahwa pelatihan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan aktual serta prioritas organisasi. Selain itu, evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi dalam jumlah peserta pelatihan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk perbaikan lebih lanjut dalam program pelatihan.



Tabel 2.3.1 Jumlah tenaga Widyaiswara berdasarkan gender, jabatan dan pendidikan, 2023

Kategori		Widyaiswara
(1)		(2)
Jabatan	Pertama	-
	Muda	4
	Madya	7
	Utama	5
Jenis Kelamin	Laki-laki	12
	Perempuan	4
Pendidikan	S2	12
	S3	4

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel di atas memberikan informasi mengenai tenaga Widyaiswara berdasarkan jabatan, jenis kelamin, dan pendidikan pada tahun 2023. Dalam hal jabatan, terdapat 4 orang di tingkat Muda, 7 orang di tingkat Madya, dan 5 orang di tingkat Utama. Terlihat bahwa laki-laki mendominasi kehadiran dengan 12 orang, sedangkan wanita berjumlah 4 orang. Sementara dalam hal pendidikan, mayoritas Widyaiswara memiliki gelar S2, yang terdiri dari 12 individu, dan 4 orang memiliki pendidikan pada tingkat S3. Meskipun distribusi gender masih tidak seimbang, tren pendidikan yang tinggi menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menyampaikan pelatihan berkualitas.

Tabel 2.3.2 Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, 2022 - 2023

Jenis Pengembangan Kompetensi	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	3.992	3.097
Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	4.069	14.687
Sdm Aparatur Yang Bersertifikasi Kompetensi	168	339
Sdm Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	4.991	3.542
Sdm Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	2.438	3.472
Sdm Aparatur Yang Telah Memperoleh Sertifikasi/Sttp Pengembangan Kompetensi	16.132	27.127

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.3 Jumlah Peserta dan Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023

Uraian	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jumlah Peserta Diklat Pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural Dan Pelatihan Fungsional	4.274	7.656
Jumlah Alumni Diklat Pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Sosial Kultural, Dan Pelatihan Fungsional	8.095	15.751
Jumlah Lembaga Pelatihan Terakreditasi (PKN TK II, PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional)	4	5

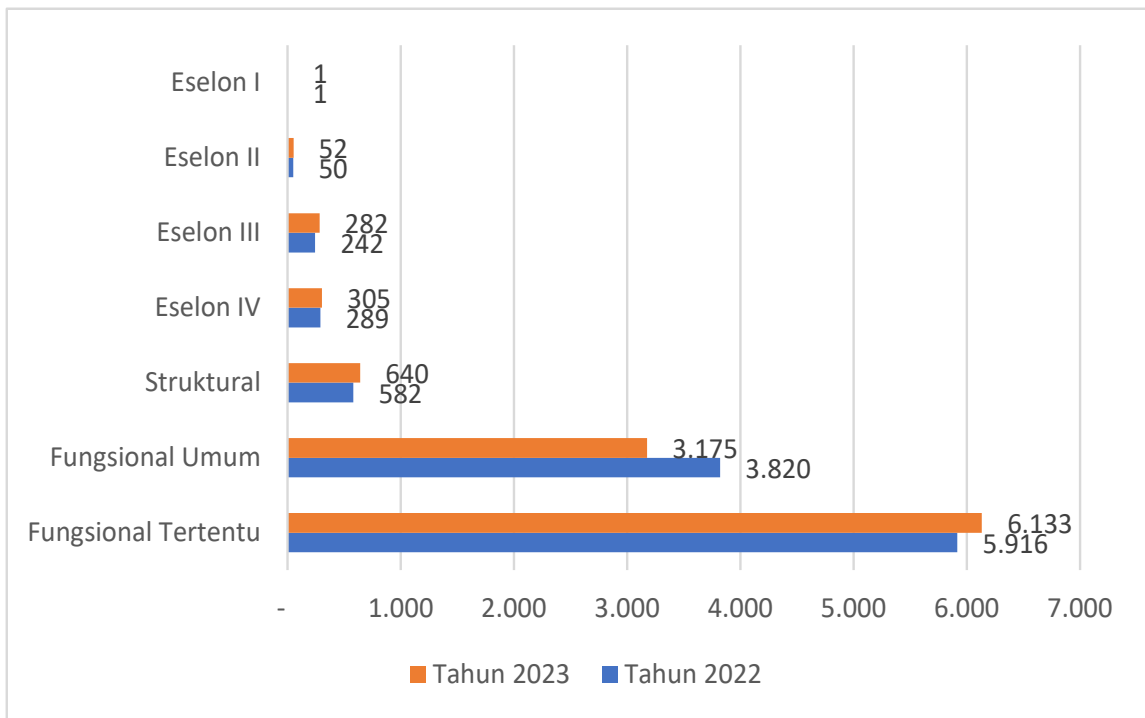
Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Kepegawaian Daerah adalah entitas pendukung dalam urusan pemerintahan terkait kepegawaian, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu peran utamanya adalah melaksanakan tugas dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi. Tugas ini mengharuskan Badan Kepegawaian Daerah untuk menyajikan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, penyajian data dan informasi kepegawaian akan dilakukan dengan baik dan berkualitas, memudahkan akses dan pemanfaatan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang kepegawaian.



Grafik 2.4.1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan 2023



Grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan pada Desember 2022 dan Desember 2023. Kategori jabatan yang ditampilkan meliputi Eselon I hingga IV, jabatan struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu. Secara umum, terlihat adanya pergeseran jumlah PNS di setiap kategori jabatan dari tahun 2022 ke 2023.

Pada jabatan eselon, terlihat perubahan kecil, terutama di Eselon III dan IV, di mana jumlah PNS sedikit meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Eselon I dan II tidak menunjukkan perubahan signifikan, sementara Eselon III mengalami peningkatan dari 242 orang pada 2022 menjadi 282 orang pada 2023, dan Eselon IV juga naik dari 289 menjadi 305. Jumlah PNS di jabatan struktural juga sedikit meningkat dari 582 pada 2022 menjadi 640 pada 2023.

Untuk kategori jabatan fungsional, terlihat tren yang menarik. Pada fungsional umum, terjadi sedikit penurunan dari 3.820 orang pada 2022 menjadi 3.175 orang pada 2023. Sebaliknya, pada fungsional tertentu, terjadi peningkatan dari 5.916 orang pada 2022 menjadi 6.133 orang pada 2023, menunjukkan peningkatan fokus pada jabatan-jabatan yang lebih spesifik dan teknis. Hal ini bisa mencerminkan perubahan kebutuhan tenaga kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang lebih diarahkan pada keahlian tertentu.

Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Kabupaten/Kota	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	2.166	2.084	4.250	2.065	2.081	4.146
Kutai Barat	1.750	1.832	3.582	1.657	1.777	3.434
Kutai Kartanegara	6.266	6.246	12.512	5.879	5.981	11.860
Kutai Timur	3.007	3.723	6.730	2.613	3.010	5.623
Berau	2.540	2.361	4.901	2.416	2.300	4.716
Penajam Paser Utara	1.583	1.979	3.562	1.505	1.921	3.426
Mahakam Ulu	594	546	1.140	563	525	1.088
Kota Balikpapan	1.800	2.744	4.544	1.733	2.620	4.353
Kota Samarinda	2.895	3.952	6.847	2.694	3.712	6.406
Kota Bontang	1.221	1.626	2.847	1.180	1.581	2.761
Kalimantan Timur	5.341	4.977	10.318	5.107	4.841	9.948
Jumlah	29.163	32.070	61.233	27.412	30.349	57.761

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.2 Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Tertentu	2.607	3.309	5.916	2.650	3.483	6.133
Fungsional Umum	2.355	1.465	3.820	2.039	1.136	3.175
Struktural	378	204	582	418	222	640
Eselon V	-	-	-	-	-	-
Eselon IV	186	103	289	199	106	305
Eselon III	154	88	242	182	100	282
Eselon II	38	12	50	37	15	52
Eselon I	-	1	1	-	1	1
Jumlah	5.340	4.978	10.318	5.107	4.841	9.948

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Tingkat Pendidikan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sampai dengan SD	67	13	80	61	10	71
SMP/Sederajat	114	24	138	97	23	120
SMA/Sederajat	1.193	522	1.715	1.114	457	1.571
Diploma I, II/ Akta I	28	22	50	23	17	40
Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	487	666	1.153	453	633	1.086
Tingkat Sarjana/Doktor	3.453	3.729	7.182	3.359	3.701	7.060
Jumlah	5.342	4.976	10.318	5.107	4.841	9.948

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Pangkat/Golongan/ Ruang	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. I/A (Juru Muda)	1	-	1	1	-	1
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	9	-	9	4	-	4
3. I/C (Juru)	14	-	14	11	-	11
4. I/D (Juru Tingkat I)	84	14	98	61	6	67
Golongan I	108	14	122	77	6	83
5. II/A (Pengatur Muda)	51	16	67	69	21	90
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	202	58	260	132	42	174
7. II/C (Pengatur)	275	207	482	306	208	514
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	675	334	1.009	492	213	705
Golongan II	1.203	615	1.818	999	484	1.483
9. III/A (Penata Muda)	503	546	1.049	600	572	1.172
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	885	935	1.820	860	939	1.799
11. III/C (Penata)	522	743	1.265	492	650	1.142
12. III/D (Penata Tingkat I)	887	994	1.881	905	1.092	1.997
Golongan III	2.797	3.218	6.015	2.857	3.253	6.110
13. IV/A (Pembina)	777	704	1.481	707	633	1.340
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	376	369	745	378	395	773
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	59	51	110	69	62	131
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	18	4	22	19	5	24
17. IV/E (Pembina Utama)	3	2	5	3	1	4
Golongan IV	1.233	1.133	2.366	1.176	1.096	2.272
Jumlah	5.341	4.977	10.318	5.109	4.839	9.948

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2022 dan Desember 2023

Pangkat/Golongan/ Ruang	2022			2023		
	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kantor Gubernur	2	-	2	2	1	3
Sekretariat Daerah	2	2	4	3	2	5
Biro Administrasi Pembangunan	14	9	23	14	8	22
Biro Administrasi Pimpinan	23	11	34	24	10	34
Biro Hukum	11	8	19	10	11	21
Biro Kesejahteraan Rakyat	14	5	19	10	6	16
Biro Organisasi	16	9	25	16	9	25
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	18	12	30	17	12	29
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	37	10	47	36	13	49
Biro Perekonomian	18	8	26	17	7	24
Biro Umum	77	27	104	70	23	93
Inspektorat	55	28	83	50	27	77
Badan Kepegawaian Daerah	30	38	68	34	36	70
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26	14	40	26	14	40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	5	37	37	6	43
Badan Pendapatan Daerah	187	122	309	181	114	295
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	32	10	42	27	12	39
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66	43	109	62	44	106
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	22	57	33	19	52
Badan Penghubung Jakarta	12	10	22	10	9	19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57	29	86	55	25	80
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58	15	73	53	16	69
Dinas Kehutanan	436	117	553	424	110	534
Dinas Kelautan dan Perikanan	79	39	118	83	37	120

Lanjutan tabel 2.4.5

Pangkat/Golongan/ Ruang	2022			2023		
	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	24	44	20	21	41
Dinas Kesehatan	96	83	179	98	85	183
Dinas Komunikasi dan Informatika	36	16	52	36	17	53
Dinas Lingkungan Hidup	34	22	56	35	24	59
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	132	89	221	129	85	214
Dinas Pariwisata	26	14	40	22	14	36
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perum Rakyat	236	82	318	218	74	292
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	16	21	37	17	17	34
Dinas Pemuda dan Olahraga	62	27	89	59	27	86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	17	36	18	16	34
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.162	2.658	4.820	2.045	2.586	4.631
Dinas Perhubungan	61	20	81	60	19	79
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kop-erasi, Usaha Kecil dan Menengah	42	27	69	39	26	65
Dinas Perkebunan	45	32	77	45	30	75
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42	34	76	39	35	74
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	42	42	84	39	38	77
Dinas Sosial	112	49	161	105	51	156
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95	50	145	92	48	140
RSJD Atma Husada Mahakam	65	98	163	62	98	160
RSUD Abdul Wahab Sjahranie	315	590	905	304	572	876
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	220	374	594	216	365	581
Satuan Polisi Pamong Praja	69	2	71	62	4	66
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56	14	70	55	16	71
Jumlah	5.340	4.978	10.318	5.109	4.839	9.948

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur, Desember 2023

Kabupaten/Kota	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	18	613	2.448	1067	4146
Kutai Barat	31	887	2.037	479	3.434
Kutai Kartanegara	77	3.389	6.162	2.232	11.860
Kutai Timur	44	821	4.018	740	5623
Berau	50	866	3.252	548	4.716
Penajam Paser Utara	10	647	2.211	558	3.426
Mahakam Ulu	-	246	737	105	1088
Kota Balikpapan	34	743	2749	827	4.353
Kota Samarinda	30	1.102	3.861	1.413	6.406
Kota Bontang	18	449	1.912	372	2.751
Kalimantan Timur	83	1.483	6.110	2.272	9.948
Jumlah	395	11.246	35.497	10.613	57.751

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel tersebut menyajikan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2023, yang dikelompokkan berdasarkan golongan kepangkatan di setiap kabupaten/kota. Secara total, terdapat 57.751 PNS di seluruh Kalimantan Timur, dengan distribusi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan jumlah PNS terbanyak, yaitu 11.860 orang, sementara Mahakam Ulu memiliki jumlah PNS paling sedikit, yaitu 1.088 orang.

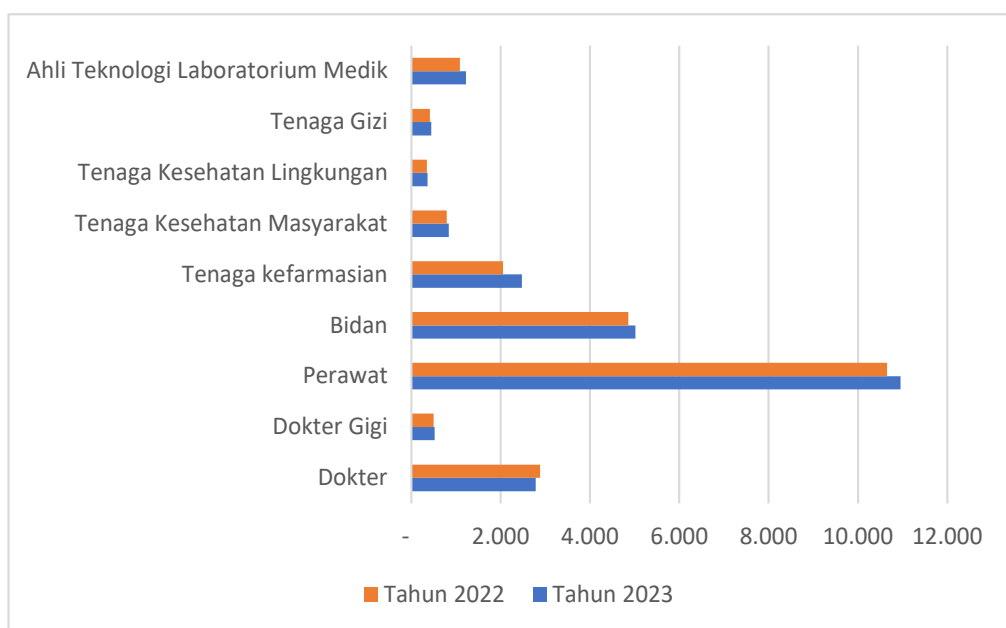
Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas PNS di Kalimantan Timur berada di Golongan III, dengan total 35.497 orang, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Golongan II merupakan golongan dengan jumlah PNS terbanyak kedua, dengan 11.246 orang, diikuti oleh Golongan IV dengan 10.613 orang, dan Golongan I dengan 395 orang. Kabupaten Kutai Kartanegara juga mencatatkan jumlah PNS terbanyak di hampir semua golongan, terutama di Golongan III (6.162 orang) dan Golongan IV (2.232 orang).

Secara keseluruhan, terdapat variasi signifikan dalam jumlah PNS di tiap kabupaten/kota. Selain Kutai Kartanegara, jumlah PNS cukup besar juga tercatat di Kota Samarinda (6.406 orang) dan Kutai Timur (5.623 orang). Sebaliknya, kabupaten-kabupaten dengan jumlah PNS relatif kecil selain Mahakam Ulu adalah Kota Bontang (2.751 orang) dan Penajam Paser Utara (3.426 orang). Data ini menunjukkan distribusi tenaga kerja di sektor pemerintahan yang cukup variatif di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Data dari Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat dan upaya pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan di wilayah ini. Data ini menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk mengukur capaian indikator kesehatan, seperti angka kesakitan, angka kematian, cakupan imunisasi, akses terhadap layanan kesehatan, serta upaya penanggulangan penyakit endemik. Melalui data ini, dapat kita ketahui bagaimana berbagai program kesehatan telah diimplementasikan dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dengan menggali lebih dalam dalam buku statistik sektoral ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan sektor kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2.5.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023



Grafik ini menggambarkan perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur antara tahun 2022 dan 2023. Data menunjukkan peningkatan pada sebagian besar profesi, yang mencerminkan upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. Profesi dengan jumlah terbesar adalah perawat, diikuti oleh bidan, dokter, dan tenaga kefarmasian.

Jumlah perawat meningkat dari 10.650 pada tahun 2022 menjadi 10.957 pada 2023, menunjukkan bahwa perawat terus memegang peran penting dalam mendukung



sistem pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit dan klinik. Peningkatan jumlah perawat ini membantu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah.

Bidan, yang juga berperan penting dalam kesehatan ibu dan anak, mengalami kenaikan dari 4.861 tenaga pada tahun 2022 menjadi 5.017 pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan perhatian lebih pada kesehatan reproduksi dan perawatan kesehatan primer di Kalimantan Timur, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke rumah sakit besar.

Tenaga kefarmasian juga mencatat peningkatan yang signifikan dari 2.052 orang pada 2022 menjadi 2.477 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan yang lebih besar akan tenaga farmasi dalam pengelolaan obat-obatan, baik di fasilitas kesehatan maupun industri farmasi. Peran tenaga kefarmasian sangat penting untuk mendukung diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit.

Profesi dokter juga menunjukkan peningkatan, dari 2.783 dokter pada 2022 menjadi 2.882 pada 2023, serta dokter gigi yang naik dari 497 menjadi 524. Peningkatan ini, meskipun relatif kecil, sangat penting untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang cukup dan merata di seluruh provinsi, yang dapat mendukung kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	147	43	673	554	145	41	30	45	91
Kutai Barat	272	40	752	430	125	74	30	34	84
Kutai Kartanegara	153	36	1.358	766	264	151	45	56	126
Kutai Timur	108	14	1.199	770	173	76	37	38	86
Berau	240	41	795	406	173	115	42	49	96
Penajam Paser Utara	88	17	379	314	124	25	17	23	36
Mahakam Ulu	20	4	221	129	42	43	15	16	37
Kota Balikpapan	761	158	2.240	661	544	67	53	74	287
Kota Samarinda	772	122	2.660	754	688	195	76	83	282
Kota Bontang	222	49	680	233	199	55	18	28	98
Kalimantan Timur	2.783	524	10.957	5.017	2.477	842	363	446	1.223
Tahun 2022	2.882	497	10.650	4.861	2.052	796	346	413	1.088

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Sarana Pelayanan Kesehatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)
Puskesmas	-	513	226
Rumah Sakit	1314	928	194
Faskes Lainnya	121	937	12
Kalimantan Timur	1435	2378	432

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Angka Pene- muan TBC	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Jumlah Kasus Baru AIDS	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Pen- duduk	Angka Ke- sakitan DBD per 100.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	66,70%	81,70%	10	4,47	1,26	41,7
Kutai Barat	94,00%	84,40%	14	9,25	0,42	302,7
Kutai Kartanegara	40,10%	89,60%	36	3,49	0,09	143,7
Kutai Timur	60,10%	87,60%	40	3,15	1,82	192,1
Berau	57,50%	92,30%	8	3,74	2,47	143,5
Penajam Paser Utara	49,90%	83,30%	2	6,22	7,13	64,5
Mahakam Ulu	69,60%	88,40%	-	-	0,17	567
Kota Balikpapan	88,30%	81,50%	48	5,54	0,21	156,9
Kota Samarinda	64,40%	89,00%	134	1,95	0,14	103,5
Kota Bontang	99,80%	86,30%	45	8,51	1,1	243
Kalimantan Timur	65,90%	86,30%	337	4,08	0,96	146,7

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Demam Berdarah		<i>Diphtheria</i>		Diare	
	Penderita	Kematian	Penderita	Kematian	Penderita	Kematian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	126	2	-	-	5.387	19
Kutai Barat	458	5	-	-	2.729	1
Kutai Kartanegara	1.155	4	-	-	8.234	2
Kutai Timur	789	-	1	-	5.360	4
Berau	363	3	5	1	3.845	7
Penajam Paser Utara	118	-	-	-	2.279	2
Mahakam Ulu	205	2	2	-	414	-
Kota Balikpapan	1.019	4	7	-	11.691	-
Kota Samarinda	867	3	6	1	6.414	1
Kota Bontang	457	2	11	-	3.757	-
Kalimantan Timur	5.557	25	32	2	50.110	36

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	2	-	10	9	31	375
Kutai Barat	3	-	14	5	19	240
Kutai Kartanegara	3	-	20	12	53	805
Kutai Timur	6	2	18	3	64	298
Berau	2	-	8	13	25	272
Penajam Paser Utara	2	-	9	2	14	277
Mahakam Ulu	2	-	6	-	-	56
Kota Balikpapan	11	4	7	20	104	1.688
Kota Samarinda	11	5	5	21	105	719
Kota Bontang	5	-	-	6	18	121
Kalimantan Timur	47	11	97	91	433	4.851

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tahun	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi (Fe)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	79.803	70.351	6.801	68.929
2019	79.458	69.746	6.766	63.038
2020	73.112	63.890	6.290	63.399
2021	67.255	59.881	5.996	54.073
2022	101.720	90.818	5.062	52.093
2023	60.067	58.998	4.838	52.444

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil	Jumlah Persalinan	Persalinan di Fasilitas Kesehatan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	5.224	4.986	95,01
Kutai Barat	2.503	2.389	83,93
Kutai Kartanegara	14.383	13.729	89,01
Kutai Timur	7.974	7.611	96,01
Berau	4.734	4.519	102,10
Penajam Paser Utara	2.827	2.699	96,48
Mahakam Ulu	457	436	109,40
Kota Balikpapan	10.944	10.446	98,77
Kota Samarinda	14.829	14.157	88,84
Kota Bontang	3.595	3.431	88,60
Kalimantan Timur	67.470	64.403	94,82

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.8 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Gizi Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	4.749	315	683
Kutai Barat	2.275	251	239
Kutai Kartanegara	13.075	924	1.606
Kutai Timur	7.249	328	610
Berau	4.612	284	479
Penajam Paser Utara	2.570	246	402
Mahakam Ulu	415	27	23
Kota Balikpapan	10.317	397	954
Kota Samarinda	13.482	589	739
Kota Bontang	3.268	453	301
Kalimantan Timur	62.012	3.814	6.036

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.9 Jumlah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
(1)	(2)	(3)
Paser	-	46
Kutai Barat	-	45
Kutai Kartanegara	1	151
Kutai Timur	1	75
Berau	-	69
Penajam Paser Utara	-	58
Mahakam Ulu	-	8
Kota Balikpapan	19	181
Kota Samarinda	33	311
Kota Bontang	-	27
Kalimantan Timur	54	971

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

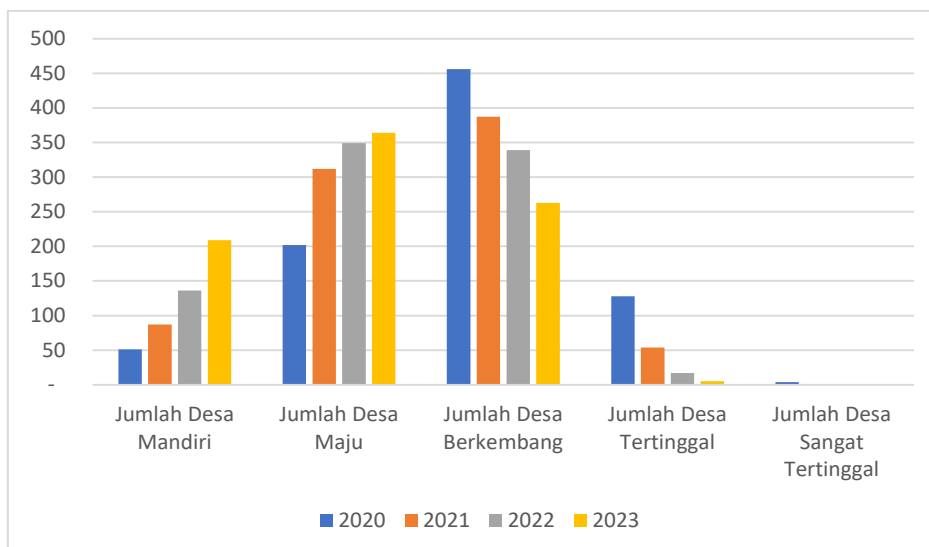
2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Grafik 2.6.1. Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023



Grafik tersebut memperlihatkan perkembangan status desa di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 hingga 2023. Desa Mandiri dan Desa Maju mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah Desa Mandiri bertambah dari sekitar 25 desa pada 2020 menjadi lebih dari 150 desa pada 2023. Demikian pula, Desa Maju meningkat dari sekitar 200 desa menjadi lebih dari 300 desa pada periode yang sama. Ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di desa-desa tersebut, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, jumlah Desa Berkembang cenderung menurun, dari lebih dari 400 desa pada 2020 menjadi sekitar 300 desa pada 2023, karena banyak desa yang naik status menjadi Desa Maju atau Mandiri. Di sisi lain, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan drastis. Pada 2020, terdapat lebih dari 100 desa tertinggal, namun jumlah ini berkurang hingga sekitar 50 desa pada 2023, sedangkan Desa Sangat Tertinggal hampir tidak ada lagi sejak 2021. Ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa yang berdampak positif pada peningkatan taraf hidup dan pengentasan desa tertinggal di Kalimantan Timur.



Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Desa Mandiri	51	87	136	209
Jumlah Desa Maju	202	312	349	364
Jumlah Desa Berkembang	456	387	339	263
Jumlah Desa Tertinggal	128	54	17	5
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	4	1	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.6.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Bumdes Yang Aktif,Bumdes Yang Dibina,Pasar Desa, dan Pasar Desa Yang Dibina, 2021-2023

Daftar Data	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	774	774	825
Jumlah Bumdes Yang Aktif	502	577	549
Bumdes Yang Dibina	-	774	825
Jumlah Pasar Desa	-	-	-
Pasar Desa Yang Dibina	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan olahraga. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat.



Tabel 2.7.1 Data Cabang Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Lembaga Cabor Bela Diri	11	11	15	15	15
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Bela Diri	9	9	9	9	9
Jumlah Atlet Cabor Bela Diri	280	289	310	489	325
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Bela Diri	15	15	15	56	56
Jumlah Lembaga Cabor Terukur	19	19	14	20	20
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Terukur	13	13	13	13	13
Jumlah Atlet Cabor Terukur	397	401	437	536	219
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Terukur	24	24	24	63	63
Jumlah Lembaga Cabor Permainan	14	14	17	17	17
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Permainan	3	3	3	15	11
Jumlah Atlet Cabor Permainan	156	215	312	724	512
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Permainan	5	5	5	136	56
Jumlah Lembaga Cabor Beregu	11	11	11	11	11
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Beregu	6	6	7	7	7
Jumlah Atlet Cabor Beregu	260	315	330	1.080	1.080
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Beregu	6	6	6	146	126

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.7.2 Jumlah Fasilitas, Organisasi, Kegiatan, dan Penghargaan dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Daftar Data	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Klub Olahraga	1.087	1.087	1.087
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	102	205	205
Jumlah Kegiatan Olahraga	67	61	40
Jumlah Organisasi Pemuda	56	1.280	305
Jumlah Organisasi Olahraga	63	63	63
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	57	23	21
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	7	7	2
Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	421	428	29

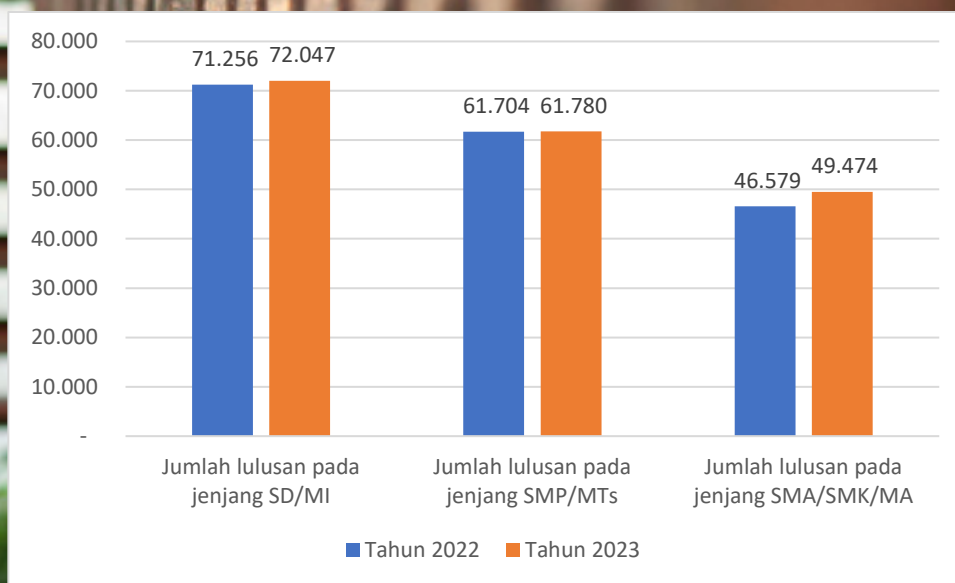
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



Penyelenggaraan pendidikan menjadi penting dan strategis dalam menentukan arah masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu sejalandengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan disegala bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan, dan terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Grafik 2.7.1. Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur 2022-2023



Grafik di atas menampilkan jumlah lulusan per jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 dan 2023, mencakup jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan jumlah lulusan di semua jenjang pendidikan dari tahun 2022 ke 2023. Pada jenjang SD/MI, jumlah lulusan naik dari 71.256 pada tahun 2022 menjadi 72.047 pada tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 791 siswa atau sekitar 1,1%. Di jenjang SMP/MTs, kenaikan yang terjadi lebih kecil, hanya sekitar 0,1%, yaitu dari 61.704 lulusan pada tahun 2022 menjadi 61.780 lulusan pada tahun 2023.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, di mana jumlah lulusan pada tahun 2022 adalah 46.579, meningkat menjadi 49.474 pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 2.895 siswa atau sekitar 6,2%. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang lebih cepat di jenjang pendidikan atas dibandingkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan perbaikan yang stabil dalam pencapaian pendidikan di Kalimantan Timur selama periode tersebut.

Tabel 2.8.1 Indikator RPJMD Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023

Indikator RPJMD	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Persentase Pelayanan Pendidikan Luar Biasa	81	86,47
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi	93	99,4
Persentase Sekolah Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Menengah dan Khusus	87	98,56
Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS Yang Berprestasi	83.708	141.870
Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin Penerima Beasiswa Yang Tidak Putus Sekolah	3.711	48.633
Jumlah Sekolah Yang Mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama (SMA/SMK/SLB)	215	232
Jumlah SMK Yang Bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	75	92
Persentase Sekolah Yang Telah Menggunakan Sistem Pendidikan Jarak Jauh	93	98,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2023

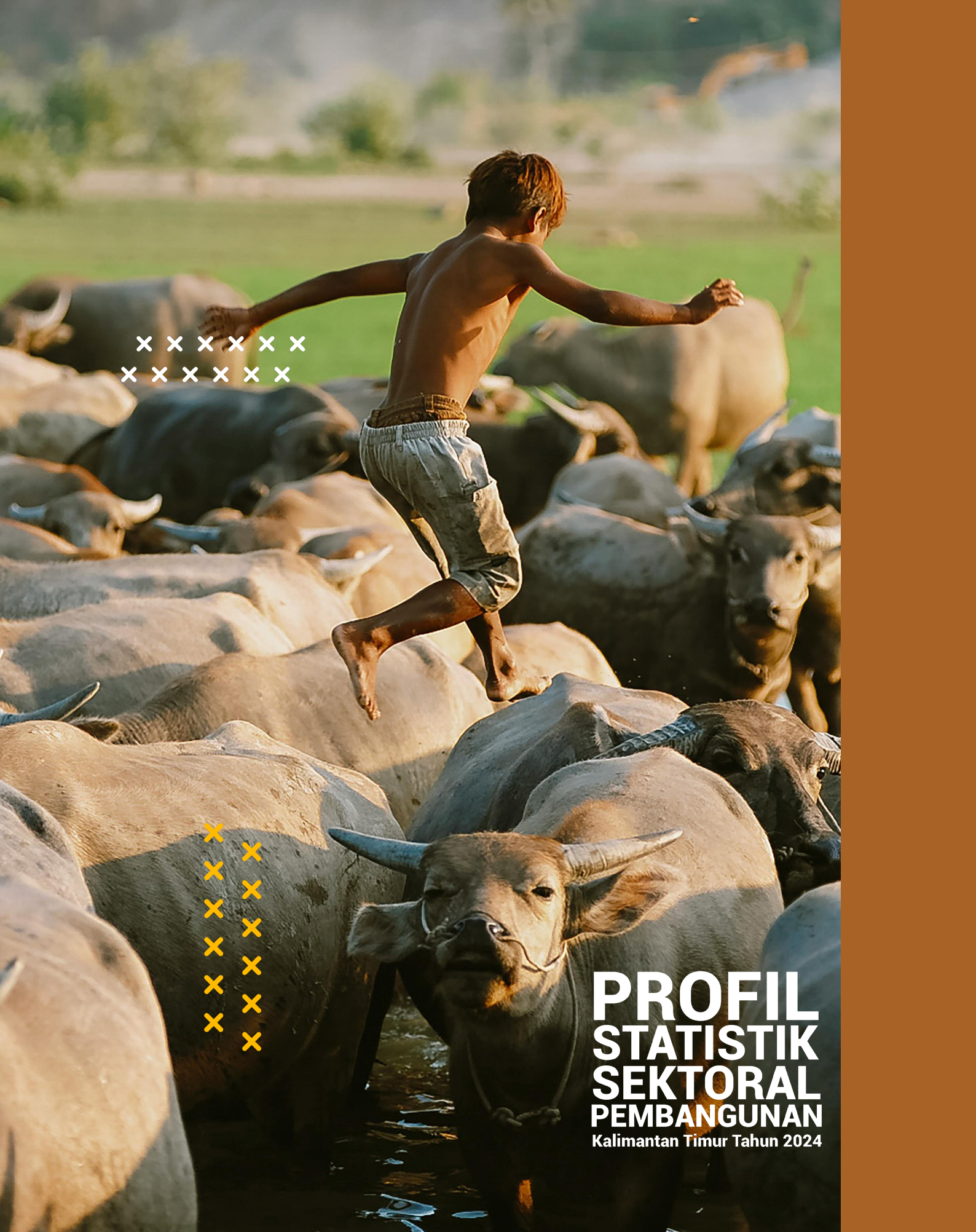
Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan	2022	2023
(1)	(2)	(3)
1. Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100	100
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	71.256	72.047
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	71.256	72.047
Jumlah Siswa SD/MI Yang Mengikuti Ujian	71.256	72.047
2. Persentase Angka Kelulusan SMP/MTS	100	100
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	61.704	61.780
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	61.704	61.780
Jumlah Siswa SMP/MTs Yang Mengikuti Ujian	61.704	61.780
3. Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	46.579	49.474
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	46.428	52.974
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Yang Mengikuti Ujian	46.428	52.974

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Kebudayaan	2022	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Group kesenian	861	865	879
- Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	2,31	2,35	2,33
2. Jumlah Gedung kesenian	17	17	17
- Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0,05	0,09	0,09
3. Museum dan Pusat Kebudayaan	14	14	11
4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	60	60	70
5. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	5	5	5
6. Benda cagar budaya yang dilestarikan	30	30	279
7. Situs cagar budaya yang dilestarikan	242	242	61
8. Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	22	22	22
9. Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	63	63	508
10. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	466	466	508
11. Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	56	62	68
12. Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	239	313	300
Jumlah Monumen Sejarah	5	5	39
Upacara Adat	251	254	254
Upacara Tradisi	349	353	355
Jenis Busana Tradisional	6	6	7
Lembaga Budaya	518	552	553

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

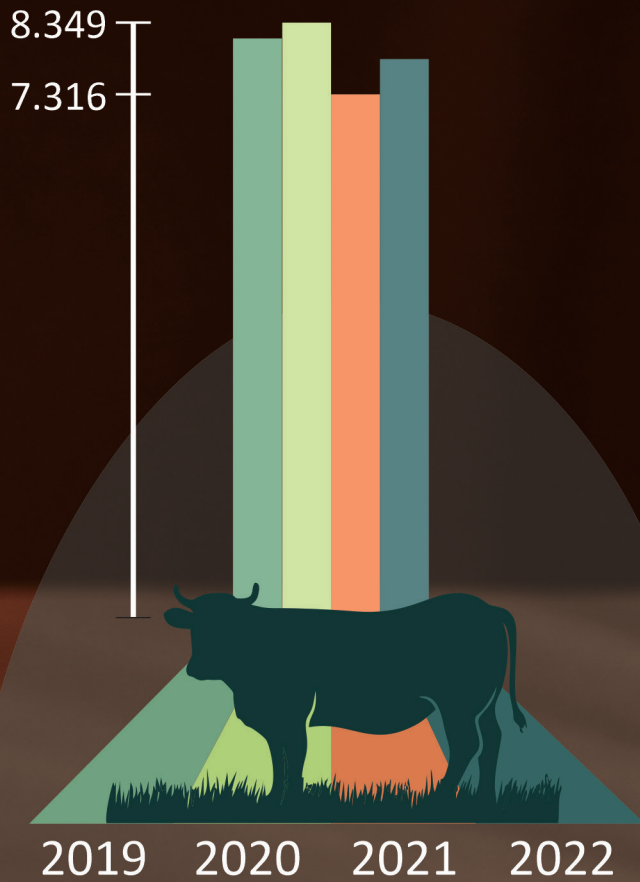


× × × × × ×
× × × × × ×

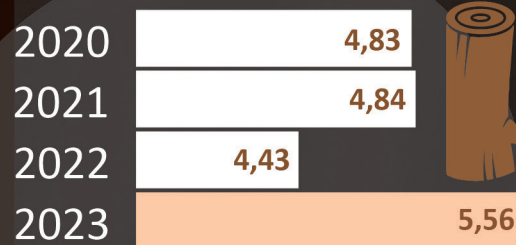
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024

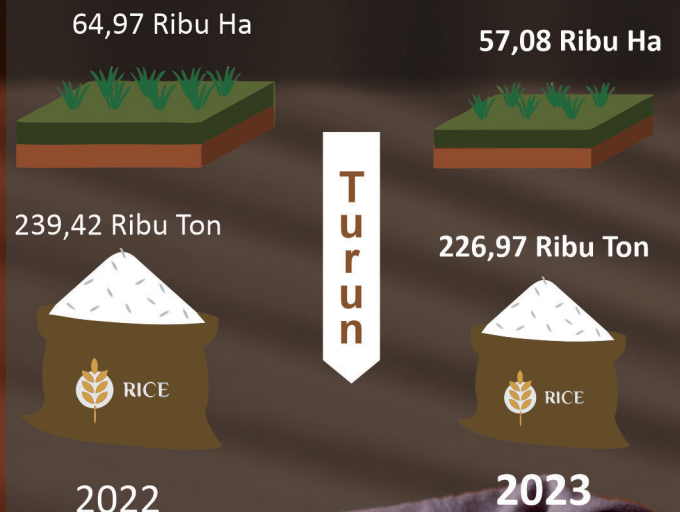


Produksi Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2019-2022



Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Timur, (juta m3) 2020–2023

Perkembangan Luas Panen, dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023



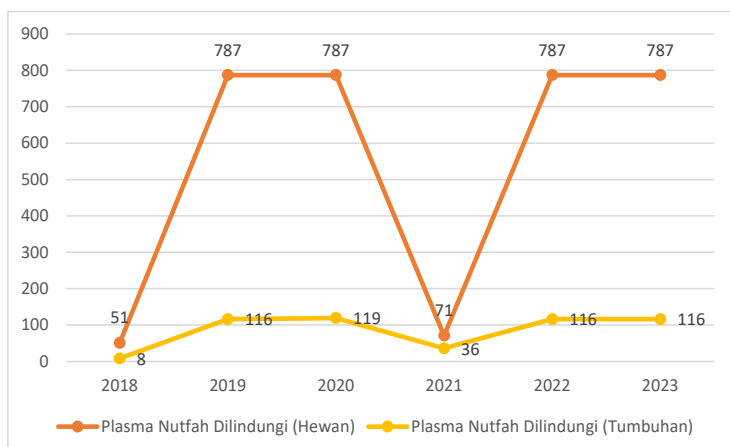
BAB III PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dimana Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023



Grafik di atas menampilkan jumlah Plasma Nutfah yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga 2023, yang terbagi menjadi dua kategori: hewan dan tumbuhan. Plasma Nutfah yang dilindungi untuk hewan (garis oranye) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, sementara untuk tumbuhan (garis kuning) cenderung lebih stabil meskipun ada sedikit perubahan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, jumlah Plasma Nutfah hewan yang dilindungi relatif rendah, yaitu 51, sedangkan jumlah tumbuhan yang dilindungi hanya 8. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan pada kedua kategori, dengan hewan mencapai 787 dan tumbuhan naik menjadi 116.

Tahun 2020 memperlihatkan stabilitas untuk kategori hewan dengan jumlah tetap di 787, sementara tumbuhan mengalami sedikit kenaikan menjadi 119. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis pada Plasma Nutfah hewan yang dilindungi, turun menjadi 71, dan tumbuhan juga menurun menjadi 36.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, jumlah Plasma Nutfah hewan kembali meningkat drastis ke angka 787 dan stabil hingga tahun 2023. Sedangkan untuk tumbuhan, jumlahnya kembali ke 116, sama seperti tahun 2019 dan 2022, menunjukkan kestabilan setelah penurunan di tahun 2021.

Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023

Tahun	Plasma Nutfah Dilindungi (Hewan)	Plasma Nutfah Dilindungi (Tumbuhan)
(1)	(2)	(3)
2018	51	8
2019	787	116
2020	787	119
2021	71	36
2022	787	116
2023	787	116

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.1.2 Data Indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup, 2020-2023

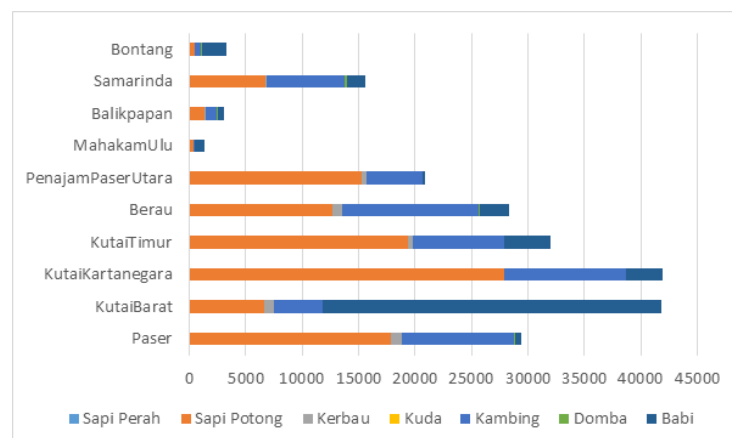
Indikator	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Presentase Sampah Yang Dikelola	77,65	74,00	87,02	87,48
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Yang Disusun	9	2	3	4
Persentase Pelayanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH	100	180,00	77,27	100,00
Persentase Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	35	66,67	97,56	92,39
Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	2	121	105	252
Luas Kawasan lindung yang dilindungi didalam kawasan perijinan	233.485,72	245.314,79	1.844,97	2.974,41
Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	66,67	97,56	92,39
Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	679	825	755	1.125
Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	12,21	7,55	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, secara teknis, dinas ini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam hal pembangunan peternakan. Pendirian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengikuti Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, tugas pokok Dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian, khususnya sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalankan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2022



Dari grafik diatas memberikan gambaran tentang populasi ternak potong di berbagai wilayah di provinsi ini. Data ini sangat penting dalam mengukur ketersediaan sumber daya ternak dan potensi sektor peternakan di setiap wilayah.

Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah ternak potong sebanyak 108.613 ekor sapi potong, 6.490 ekor kerbau, 95 ekor kuda, 58.552 ekor kambing, 642 ekor domba, dan 45.839 ekor babi. Dalam kategori sapi perah, tercatat 78 ekor yang dimiliki oleh provinsi ini.

Di tingkat kabupaten/kota, terdapat variasi signifikan dalam jumlah ternak potong. Kabupaten Kutai Timur memiliki populasi sapi perah sebanyak 50 ekor, sapi potong 19.286 ekor, kerbau 479 ekor, kuda 6 ekor, kambing 8.096 ekor, dan babi 4.089 ekor. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sapi potong sebanyak 27.868 ekor, kerbau 2.755 ekor, kambing 10.807 ekor, dan babi 3.261 ekor.

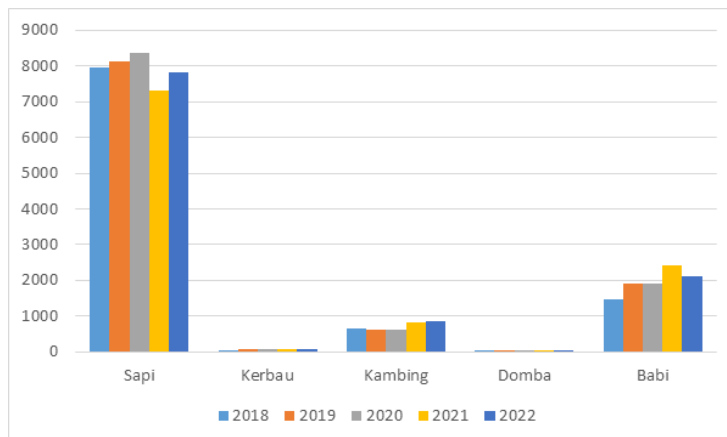
Kabupaten Paser memiliki populasi sapi potong sebanyak 17.884 ekor, kerbau 896 ekor, kambing 9.942 ekor, domba 153 ekor, dan babi 564 ekor. Kabupaten Berau memiliki sapi potong sebanyak 12.681 ekor, kerbau 854 ekor, kuda 7 ekor, kambing 12.091 ekor, domba 80 ekor, dan babi 2.569 ekor.

Kota Samarinda memiliki populasi sapi perah sebanyak 16 ekor, sapi potong 6.722 ekor, kerbau 116 ekor, kuda 10 ekor, kambing 6.850 ekor, domba 261 ekor, dan babi 1.653 ekor. Sedangkan Kota Balikpapan memiliki sapi potong sebanyak 1.343 ekor, kerbau 70 ekor, kuda 70 ekor, kambing 907 ekor, domba 102 ekor, dan babi 534 ekor.





Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2018-2022



Secara keseluruhan, produksi daging sapi di Kalimantan Timur mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, produksi mencapai 7.943,99 ton, dan meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 7.316,54 ton, sebelum meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 7.836,42 ton.

Produksi daging kerbau juga mengalami variasi selama periode ini. Pada tahun 2018, produksi hanya sebesar 46,99 ton, kemudian meningkat pada tahun 2019 dan 2020, namun kembali turun pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, produksi daging kerbau meningkat signifikan menjadi 83,7 ton.

Produksi daging kambing cenderung stabil, dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2018, produksi mencapai 665,06 ton, sedangkan pada tahun 2022, produksi meningkat menjadi 862,33 ton.

Produksi daging domba juga mengalami fluktuasi, dengan tingkat produksi yang rendah pada tahun 2018 dan 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan 2021, sebelum kembali turun pada tahun 2022.

Produksi daging babi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, produksi mencapai 1.473,75 ton, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan produksi sebesar 2.423,35 ton, sebelum sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 2.099,67 ton.



Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Sapi Perah		Sapi Potong	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	-	-	23.317	17.884
Kutai Barat	-	-	7.106	6.660
Kutai Kartanegara	-	-	30.495	27.868
Kutai Timur	58	50	19.486	19.286
Berau	-	-	14.293	12.681
Penajam Paser Utara	2	2	16.626	15.303
Mahakam Ulu	-	-	409	394
Kota Balikpapan	-	-	1.419	1.343
Kota Samarinda	16	16	6.659	6.722
Kota Bontang	-	-	1.480	472
Kalimantan Timur	76	78	121.290	108.613

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kerbau		Kuda	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	949	896	-	-
Kutai Barat	939	879	-	-
Kutai Kartanegara	2 738	2 755	-	-
Kutai Timur	541	479	49	6
Berau	768	854	6	7
Penajam Paser Utara	442	402	-	-
Mahakam Ulu	-	-	409	394
Kota Balikpapan	46	70	70	70
Kota Samarinda	94	116	12	10
Kota Bontang	22	39	6	2
Kalimantan Timur	6.539	6.490	143	95

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kambing		Domba		Babi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	13.787	9.942	190	153	3.391	564
Kutai Barat	4.552	4.281	4	-	32.888	29.990
Kutai Kartanegara	12.439	10.807	-	-	4.539	3.261
Kutai Timur	8.625	8.096	-	-	11.640	4.089
Berau	14.304	12.091	140	80	2.742	2.569
Penajam Paser Utara	5.028	4.945	-	-	285	217
Mahakam Ulu	93	75	-	-	1.036	844
Kota Balikpapan	911	907	109	102	790	534
Kota Samarinda	7.066	6.850	214	261	12.802	1.653
Kota Bontang	2.192	558	37	46	6.179	2.118
Kalimantan Timur	68.997	58.552	694	642	76.292	45.839

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung		Itik dan Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	1.906.183	1.963.368	43.164	44.459
Kutai Barat	226.147	232.931	21.782	22.435
Kutai Kartanegara	377.840	389.175	65.710	67.681
Kutai Timur	453.662	467.272	82.883	85.370
Berau	251.113	258.646	32.038	32.999
Penajam Paser Utara	442.376	455.647	22.358	23.029
Mahakam Ulu	62.561	64.438	1.629	1.678
Kota Balikpapan	100.034	103.035	9.530	9.815
Kota Samarinda	869.913	896.010	39.000	40.170
Kota Bontang	126.147	129.931	7.347	7.567
Kalimantan Timur	4.815.976	4.960.453	325.441	335.203

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	1.020,96	11,79	36,33	0,56	87,07
Kutai Barat	298,88	27,06	38,99	-	556,38
Kutai Kartanegara	870,1	4,25	89,38	-	38,33
Kutai Timur	766,15	11,98	54,18	-	383,78
Berau	705,49	10,63	93,7	0,72	263,77
Penajam Paser Utara	599,5	2,71	23,98	-	7,96
Mahakam Ulu	17,38	-	0,95	-	49,06
Kota Balikpapan	1.149,55	-	217,94	0,65	68,45
Kota Samarinda	1.700,55	15,08	209,57	0,78	199,56
Kota Bontang	707,86	0,19	97,31	-	445,3
Kalimantan Timur	7.836,42	83,7	862,33	2,7	2.099,67

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik dan Itik Manila
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	2.170.503,32	5.960,42	18.339,75
Kutai Barat	257.505,59	9.286,99	9.254,85
Kutai Kartanegara	430.233,33	184.744,03	27.918,83
Kutai Timur	516.569,20	29.265,39	48.723,95
Berau	285.933,15	122.614,27	13.612,50
Penajam Paser Utara	503.718,13	21.859,07	10.061,70
Mahakam Ulu	71.236,21	-	692,18
Kota Balikpapan	113.905,56	49.240,18	4.282,03
Kota Samarinda	990.539,06	145.495,31	17.747,95
Kota Bontang	143.639,09	-	4.000,43
Kalimantan Timur	5.483.782,64	568.465,66	154.634,17

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.7 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur (kg), 2022

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Itik dan Itik Manila	Sapi Perah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	1.257.537,20	356.253,17	-
Kutai Barat	149.192,31	179.773,27	-
Kutai Kartanegara	249.266,59	542.332,73	-
Kutai Timur	299.287,72	546.361,64	66.219,65
Berau	165.662,76	264.423,36	-
Penajam Paser Utara	291.841,90	178.805,66	2.207,32
Mahakam Ulu	41.272,54	13.445,93	-
Kota Balikpapan	65.993,92	76.271,57	-
Kota Samarinda	573.894,41	309.877,80	17.658,57
Kota Bontang	83.220,81	51.678,01	-
Kalimantan Timur	3.177.170,16	2.519.223,14	86.085,54

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Grafik 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023



Grafik di atas menggambarkan Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dalam berbagai kategori lahan. Kategori dengan luas lahan terbesar adalah “Luas Lahan Areal Penggunaan Lain” yang mencapai 4.313.729 hektar, menandakan penggunaan lahan yang lebih luas untuk kegiatan selain hutan atau konservasi perairan. Sementara itu, “Luas Lahan Hutan Produksi Terbatas” memiliki luas yang signifikan sebesar 2.927.898 hektar, diikuti oleh “Luas Lahan Hutan Produksi Tetap” dengan 2.885.957 hektar, yang menunjukkan pentingnya sektor produksi hutan di wilayah ini.

Beberapa kategori lahan konservasi hutan memiliki ukuran yang lebih kecil tetapi tetap penting. Misalnya, “Luas Lahan Hutan Lindung,” “Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung,” dan “Luas Kawasan Hutan Lindung” memiliki luas yang sama, yaitu 1.785.089 hektar. Hal ini mencerminkan adanya area yang dikelola secara khusus untuk perlindungan hutan dan konservasi. Selain itu, “Luas Lahan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK)” mencakup area sebesar 261.964 hektar, yang dapat berfungsi sebagai cadangan hutan yang bisa dikonservasi di masa depan.

Kategori lainnya mencakup lahan yang lebih kecil seperti “Suaka Margasatwa” dengan luas 97,46 hektar, menunjukkan fokus perlindungan untuk area margasatwa tertentu. Sementara itu, “Luas Lahan Tubuh Air” yang mencakup hanya 3.119 hektar menunjukkan wilayah konservasi air yang terbatas di Kalimantan Timur.

Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2023



Grafik di atas menampilkan produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2023, yang dikelompokkan berdasarkan tiga jenis produksi: Produksi Kayu IUPHHK HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam), Produksi Kayu IUPHHK HTI, HTR, HKm (Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemasyarakatan), serta Produksi Kayu IPK, IPPKH, HGU, dan Perorangan.

Pada tahun 2019, total produksi kayu mencapai lebih dari 5 juta meter kubik, dengan IUPHHK HA menjadi kontribusi terbesar. Produksi kayu dari IUPHHK HTI, HTR, HKm juga signifikan, sementara kontribusi IPK, IPPKH, HGU, dan Perorangan terlihat lebih kecil namun masih memberikan sumbangan tambahan.

Dari tahun 2020 hingga 2022, produksi kayu secara keseluruhan menurun. Penurunan yang paling terlihat terjadi pada tahun 2022, di mana total produksi kayu turun mendekati 4 juta meter kubik. Namun, pada tahun 2023, produksi kembali meningkat signifikan, mendekati angka 6 juta meter kubik, dengan peningkatan pada semua jenis produksi, terutama dari IUPHHK HA dan IUPHHK HTI, HTR, HKm.

Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan	Luas	Satuan
(1)	(2)	(3)
Luas kawasan Hutan Lindung	1.785.089	Hektare
Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	1.785.089	Hektare
Luas Lahan Hutan Lindung	1.785.089	Hektare
Suaka Margasatwa	97,46	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi Tetap	2.885.957	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi Terbatas	2.927.898	Hektare
Luas Lahan Tubuh Air	3.119	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK)	261.964	Hektare
Luas Lahan Areal Penggunaan Lain	4.313.729	Hektare

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2023

Tahun	Kayu Bulat			Jumlah Total (m3)
	Produksi Kayu IUPHHK HA	Produksi Kayu IUPHHK HTI, HTR, HKm	Produksi Kayu IPK, IPPKH, HGU dan Perseorangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	1.402.839	3.435.601	356.976	5.195.418
2020	1.122.077	3.484.923	227.281	4.834.281
2021	1.261.179	3.314.494	260.724	4.836.397
2022	1.009.177	3.206.086	218.807	4.434.071
2023	751.972	4.613.355	194.763	5.560.092

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019–2023

Tahun	Kayu Olahan			
	Kayu Lapis	Veneer	Kayu Gergajian	Moulding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	371.668	10.328	84.363	6.376
2020	300.922	13.954	75.005	6.876
2021	231.841	40.641	78.127	4.074
2022	211.361	37.767	60.370	2.207
2023	85.370	40.493	45.056	101

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dan Luasnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT	
	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	4	293.920,00	6	147.336,00
Kutai Barat	7	299.330,00	8	166.920,00
Kutai Kartanegara	6	432.115,00	8	493.970,00
Kutai Timur	12	990.030,00	17	585.005,00
Berau	16	847.852,68	6	280.216,00
Penajam Paser Utara	-	-	3	218.514,00
Mahakam Ulu	12	962.999,45	-	-
Kota Balikpapan	-	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-
Lintas Kabupaten				
Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser	1	173.395,00	-	-
Kalimantan Timur	58	3.999.642,13	48	1.891.961,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.5 Luas Lahan yang Direboisasi dan Direhabilitasi di Wilayah Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023 (ha)

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	38.302	38.737	39.900	38.866	11.200
Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	301	400	29	200	450
Luas penanaman rehabilitasi lahan	1.601	2.159	147	414	1.638
Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	1.150	1.506	50	304	63

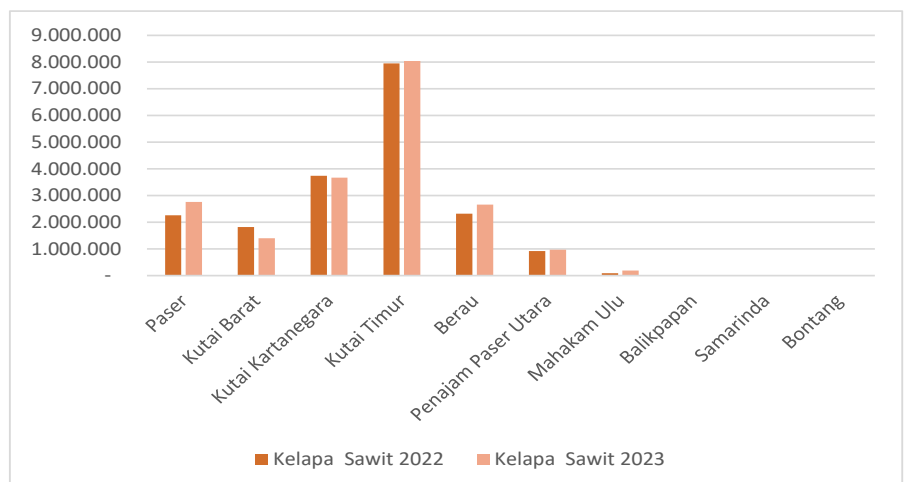
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



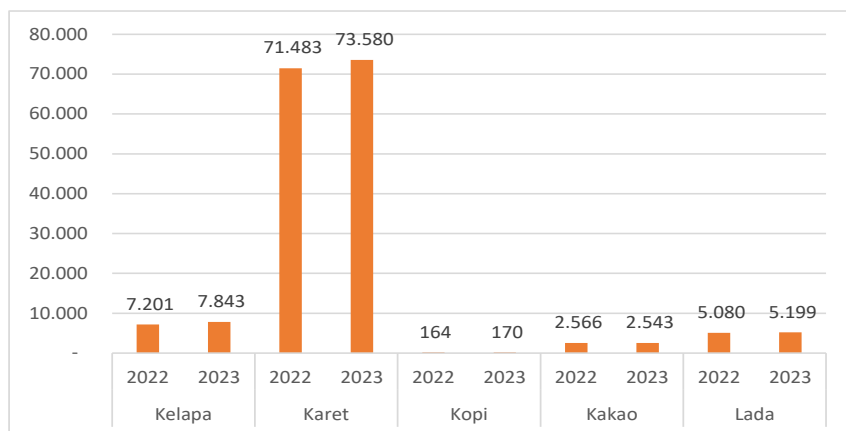
3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004.

Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023

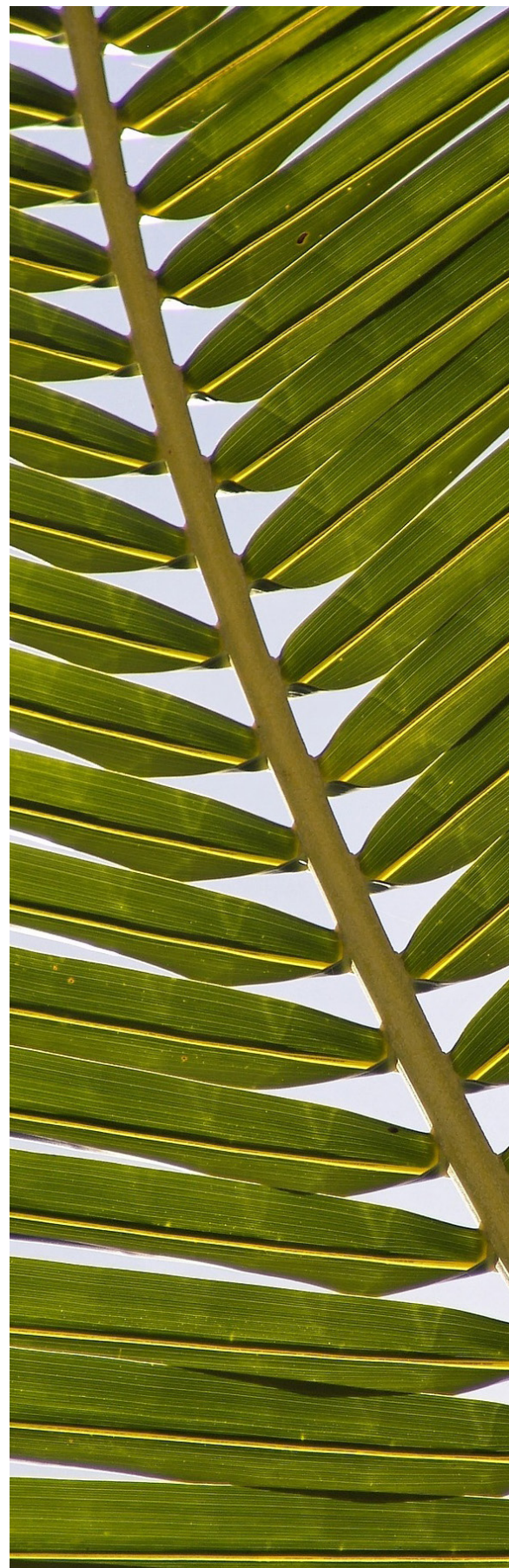


Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023



Grafik di atas Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton) untuk tahun 2022 dan 2023. Secara umum, grafik ini memperlihatkan variasi produksi kelapa sawit di beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Timur merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di kedua tahun tersebut, dengan produksi di atas 8 juta ton. Beberapa kabupaten lain seperti Kutai Kartanegara dan Paser juga menunjukkan produksi yang signifikan, meskipun jauh lebih rendah dari Kutai Timur. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki produksi yang sangat minim atau tidak ada sama sekali.

Grafik kedua memperlihatkan Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), untuk tahun 2022 dan 2023. Jenis tanaman yang ditampilkan meliputi kelapa, karet, kopi, kakao, dan lada. Produksi karet menjadi yang terbesar, dengan produksi lebih dari 70.000 ton di kedua tahun tersebut, menunjukkan sedikit peningkatan dari 71.483 ton pada tahun 2022 menjadi 73.580 ton pada tahun 2023. Tanaman lain seperti kelapa, kopi, kakao, dan lada memiliki produksi yang jauh lebih rendah, dengan kelapa meningkat dari 7.201 ton di tahun 2022 menjadi 7.843 ton di tahun 2023. Produksi kopi dan kakao relatif stabil, sementara lada menunjukkan sedikit peningkatan dari 5.080 ton di tahun 2022 menjadi 5.199 ton di tahun 2023.



Tabel 3.4.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2022	2023	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	194.223	215.846	2.323	2.323
Kutai Barat	169.029	183.731	1.061	1.161
Kutai Kartanegara	223.363	229.838	7.107	7.230
Kutai Timur	465.775	615.556	1.403	1.403
Berau	270.458	151.387	2.390	2.390
Penajam Paser Utara	46.040	52.539	4.301	4.301
Mahakam Ulu	41.651	23.556	30	30
Kota Balikpapan	41	58	968	968
Kota Samarinda	1.209	1.209	306	306
Kota Bontang	72	52	32	32
Kalimantan Timur	1.411.861	1.473.772	19.921	20.144

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.2 Luas Areal Tanaman Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Karet		Kopi	
	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	12.191	14.696	276	276
Kutai Barat	47.055	45.404	808	808
Kutai Kartanegara	24.759	26.904	84	117
Kutai Timur	20.743	18.633	89	89
Berau	4.965	5.910	80	80
Penajam Paser Utara	6.819	6.670	14	14
Mahakam Ulu	1.837	1.763	-	-
Kota Balikpapan	4.534	4.480	11	11
Kota Samarinda	836	825	-	-
Kota Bontang	37	35	-	-
Kalimantan Timur	123.776	125.320	1.362	1.395

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Kakao		Lada	
	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	6	6	86	76
Kutai Barat	507	527	319	294
Kutai Kartanegara	82	107	3.394	3.209
Kutai Timur	3.660	3.660	419	437
Berau	1.005	1.065	2.569	2.599
Penajam Paser Utara	11	11	1.355	1.383
Mahakam Ulu	2.338	2.388	2	2
Kota Balikpapan	42	42	122	111
Kota Samarinda	7	7	54	49
Kota Bontang	-	-	1	1
Kalimantan Timur	7.777	7.813	8.321	8.161

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.4 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit		Kelapa	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	2.262.319	2.762.937	2.325	622
Kutai Barat	1.819.377	1.400.851	147	218
Kutai Kartanegara	3.739.723	3.673.662	1.667	2.619
Kutai Timur	7.948.189	8.044.496	751	679
Berau	2.317.834	2.663.840	1.110	1.794
Penajam Paser Utara	927.118	977.523	723	1.022
Mahakam Ulu	88.854	192.541	4	4
Kota Balikpapan	208	792	340	562
Kota Samarinda	15.102	13.967	126	306
Kota Bontang	52	58	8	17
Kalimantan Timur	19.118.776	19.730.667	7.201	7.843

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.5 Produksi Perkebunan Karet dan Kopi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Karet		Kopi	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	8.703	9.705	54	54
Kutai Barat	32.064	35.107	28	28
Kutai Kartanegara	15.466	20.729	10	16
Kutai Timur	1.868	1.557	59	59
Berau	7.256	100	9	9
Penajam Paser Utara	1.564	2.157	1	1
Mahakam Ulu	-	-	-	-
Kota Balikpapan	4.246	3.626	3	3
Kota Samarinda	316	599	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-
Kalimantan Timur	71.483	73.580	164	170

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.6 Produksi Perkebunan Kakao dan Lada Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Kakao		Lada	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	4	6	18	11
Kutai Barat	24	21	6	7
Kutai Kartanegara	44	41	2.961	2.490
Kutai Timur	1.664	1.456	156	131
Berau	484	725	556	1.326
Penajam Paser Utara	2	1	1.240	1.019
Mahakam Ulu	339	289	-	-
Kota Balikpapan	1	3	127	204
Kota Samarinda	4	1	16	11
Kota Bontang	-	-	-	-
Kalimantan Timur	2.566	2.543	5.080	5.199

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.7 Luas Area (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Besar Pemerintah Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Luas Area (ha)		Produksi (ton)	
	Karet	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa Sawit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	399	14.402	330	216.123
Kutai Barat	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	3.231	-	3.184	-
Kutai Timur	-	-	-	-
Berau	-	-	-	-
Penajam Paser Utara	-	-	-	-
Mahakam Ulu	-	-	-	-
Kota Balikpapan	-	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-
Kalimantan Timur	3.630	14.402	3.514	216.123

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.8 Luas Area Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2023

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	60	110.843	110.903
Kutai Barat	9.766	113.635	123.401
Kutai Kartanegara	5.630	278.521	284.151
Kutai Timur	9.484	413.056	422.540
Berau	802	142.485	143.287
Penajam Paser Utara	-	34.739	34.739
Mahakam Ulu	-	26.156	26.156
Kota Balikpapan	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-
Kota Bontang	-	20	20
Kalimantan Timur	25.742	1.119.455	1.145.197

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2023

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa Sawit	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	45	1.635.324	1.635.369
Kutai Barat	235	1.222.835	1.223.070
Kutai Kartanegara	1.846	3.988.750	3.990.596
Kutai Timur	137	7.428.359	7.428.496
Berau	-	3.535.805	3.535.805
Penajam Paser Utara	-	451.669	451.669
Mahakam Ulu	-	178.881	178.881
Kota Balikpapan	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-
Kota Bontang	-	382	382
Kalimantan Timur	2.263	18.442.005	18.444.268

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.10 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha), 2018-2022

Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Tahunan					
Karet	92.354	92.639	92.982	92.403	94.596
Kelapa	21.786	21.152	20.698	20.018	20.068
Kelapa Sawit	286.058	255.919	286.058	252	373.212
Kopi	2.725	2.529	1.957	1.488	1.495
Kakao	7.298	7.328	6.883	7.617	7.777
Teh	-	-	-	-	-
Jambu Mete	8	8	4	1	-
Pala	151	305	257	322	422
Lada	9.021	8.921	8.247	8.221	8.321
Tebu	1	1	1	1	-
Tembakau	-	-	-	-	-
Nilam	33	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.11 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ton), 2018-2022

Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Tahunan					
Karet	55.271	50.880	52.801	66.872	69.446
Kelapa	12.746	11.013	7.662	10.170	7.201
Kelapa Sawit	495.102	506.370	550.473	561.146	519.497
Kopi	-	-	-	-	-
Kakao	325	223	262	167	165
Teh	2.393	2513	2.537	2.181	2.566
Jambu Mete	-	-	-	-	-
Pala	1	1	-	-	-
Lada	-	0,10	0,15	11,00	12,00
Tebu	6.484	5.799	3.760	4.173	5.080
Tembakau	-	-	-	-	1,00
Nilam	0,10	0,15	0,15	0,15	-

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi yang sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Misi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada 5 Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok masing-masing. Dalam konteks ini, Misi dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura berkaitan dengan Misi II Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.


Tujuan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Peningkatan produksi dicapai dengan menerapkan metode pertanian berkelanjutan, dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan seperti teknik irigasi yang mengurangi emisi gas metan, penggunaan pupuk kompos organik, bio-pestisida, pengendalian hama biologis, dan lainnya.

Sementara itu, tujuan jangka menengah Dinas ini meliputi:

1. Mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
3. Meningkatkan mutu dan daya saing produk.
4. Meningkatkan fasilitas pasca panen dan pemasaran.
5. Meningkatkan kapasitas petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mendukung pengurangan emisi di sektor pertanian.



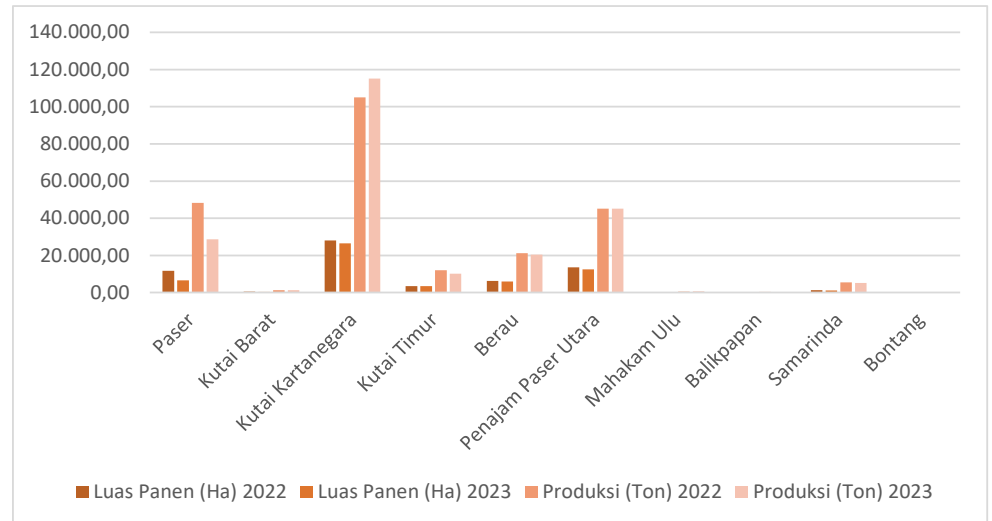


A man wearing an orange t-shirt and a red cap is carrying a large, heavy sack of brown paper on his shoulder. He is standing in a lush green field, likely a rice paddy. The background shows a blurred view of trees and a clear sky. The text is overlaid on the left side of the image.

Dalam kerangka ini, sasaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan sebagai hasil yang konkret dari setiap tujuan, dengan indikator spesifik dan terukur serta target yang jelas. Sasaran ini harus lebih fokus, spesifik, terinci, dan dapat diukur. Sasaran-sasaran ini, yang diperincikan untuk periode tahun 2013-2018, meliputi peningkatan produksi padi dan ubi kayu pada lahan fungsional dan lahan kritis, pengembangan sentra padi, peningkatan produksi buah durian, lai, jeruk, pisang, dan pepaya terutama pada lahan kritis, pengembangan kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT), peningkatan sertifikasi kebun, peningkatan jumlah sub terminal agribisnis (STA), dan peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan untuk mengurangi emisi sektor pertanian.



Grafik 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan luas panen dan produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kabupaten/kota untuk tahun 2022 dan 2023. Kutai Timur menjadi daerah dengan kontribusi terbesar dalam produksi padi, terlihat dari peningkatan signifikan pada luas panen yang melebihi 100.000 hektar di tahun 2023, disertai produksi padi yang juga meningkat tajam di atas 100.000 ton. Kutai Kartanegara berada di posisi kedua dalam hal luas panen dan produksi, dengan peningkatan yang stabil dari 2022 ke 2023, meskipun tetap jauh di bawah Kutai Timur.

Kabupaten seperti Paser dan Penajam Paser Utara juga menunjukkan peningkatan baik dalam luas panen maupun produksi padi dari tahun 2022 ke 2023. Walaupun kontribusi mereka tidak sebesar Kutai Timur atau Kutai Kartanegara, adanya peningkatan ini tetap menunjukkan peran penting mereka dalam produksi padi di Kalimantan Timur. Kabupaten lain seperti Berau, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat memiliki produksi dan luas panen yang relatif kecil dan mengalami fluktuasi yang minimal.

Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	11.663,91	6.584,52	4,13	4,34	48.202,66	28.608,94
Kutai Barat	477,55	426,23	2,69	3,10	1.284,77	1.319,37
Kutai Kartanegara	27.981,31	26.547,34	3,75	4,34	105.025,70	115.103,82
Kutai Timur	3.415,90	3.505,89	3,54	2,90	12.076,25	10.167,79
Berau	6.229,84	6.027,48	3,39	3,40	21.135,98	20.498,89
Penajam Paser Utara	13.531,22	12.521,93	3,34	3,60	45.160,69	45.100,57
Mahakam Ulu	201,45	227,99	2,43	2,99	489,42	680,75
Kota Balikpapan	86,93	41,45	3,48	3,71	302,1	153,81
Kota Samarinda	1.312,78	1.157,71	4,18	4,48	5.492,34	5.184,28
Kota Bontang	69,12	41,47	3,70	3,71	255,43	153,85
Kalimantan Timur	64.970,01	57.082,01	3,69	3,98	239.425,34	226.972,07

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	944,00	959,50	3,96	4,13	5.615,62	5.358,83
Kutai Barat	521,60	423,00	3,83	2,69	2.832,38	1.981,75
Kutai Kartanegara	1.051,20	1.627,10	3,78	3,75	5.717,84	6.982,08
Kutai Timur	1.228,60	1.601,80	3,58	3,54	6.774,56	7.283,61
Berau	10.558,50	10.570,20	3,89	3,39	63.023,55	51.072,78
Penajam Paser Utara	320,00	100,40	3,12	3,34	2.535,01	503,28
Mahakam Ulu	1,40	2,50	4,01	2,43	7,94	12,74
Kota Balikpapan	36,50	73,20	3,45	3,48	206,88	356,14
Kota Samarinda	48,30	73,50	4,28	4,18	267,21	343,86
Kota Bontang	11,00	11,00	4,25	3,70	38,00	40,62
Kalimantan Timur	14.721,10	15.442,20	5,91	4,79	87.018,99	73.935,69

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.3 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	13,00	6,00	1,56	1,47	20,31	8,79
Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	30,80	15,30	1,69	1,52	52,01	23,32
Kutai Timur	5,70	14,00	1,61	1,58	9,17	22,07
Berau	19,50	3,00	1,69	1,62	33,03	4,85
Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	-	2,20	-	1,36	-	3,00
Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	69,00	40,50	1,66	1,53	114,52	62,03

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	58,00	36,50	1,22	1,28	70,50	46,59
Kutai Barat	31,20	22,50	1,22	1,22	37,96	27,34
Kutai Kartanegara	312,70	169,90	1,21	1,09	377,91	184,94
Kutai Timur	86,20	98,70	1,10	1,26	95,24	124,52
Berau	121,30	62,90	1,26	1,39	153,16	87,19
Penajam Paser Utara	12,90	2,20	1,06	1,18	13,69	2,60
Mahakam Ulu	6,30	5,10	0,51	1,06	3,22	5,41
Kota Balikpapan	10,50	12,50	1,22	1,31	12,82	16,34
Kota Samarinda	20,20	18,40	1,76	1,85	35,62	33,95
Kota Bontang	9,00	12,00	1,32	1,25	11,89	14,94
Kalimantan Timur	668,30	440,70	1,22	1,23	812,01	543,82

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	96,00	72,00	33,98	28,85	3.261,84	2.077,52
Kutai Barat	321,50	188,00	27,57	24,25	8.862,31	4.559,78
Kutai Kartanegara	801,50	612,20	23,32	27,65	18.687,07	16.928,01
Kutai Timur	347,60	371,10	34,57	33,84	12.014,84	12.559,29
Berau	130,30	82,50	30,65	29,60	3.993,18	2.442,32
Penajam Paser Utara	74,70	80,60	38,76	34,63	2.895,31	2.791,18
Mahakam Ulu	8,30	9,00	33,24	25,60	275,89	230,43
Kota Balikpapan	256,50	263,60	31,33	29,69	8.036,31	7.824,99
Kota Samarinda	113,00	98,90	34,81	33,00	3.933,64	3.263,37
Kota Bontang	12,00	14,00	41,15	36,58	493,83	512,16
Kalimantan Timur	2.161,40	1.791,90	28,90	29,68	62.454,22	53.189,05

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.6 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	26,00	35,00	16,99	17,29	441,74	605,24
Kutai Barat	94,30	59,00	10,78	10,50	1.016,52	619,72
Kutai Kartanegara	449,70	295,10	17,91	18,32	8.055,84	5.404,90
Kutai Timur	111,00	123,10	15,28	17,29	1.696,09	2.128,53
Berau	71,20	13,70	16,25	16,87	1.157,16	231,13
Penajam Paser Utara	81,30	72,10	28,54	29,37	2.320,69	2.117,64
Mahakam Ulu	5,90	2,80	16,34	16,94	96,43	47,42
Kota Balikpapan	13,50	26,50	16,32	17,18	220,36	455,14
Kota Samarinda	22,50	20,50	16,36	17,29	368,05	354,50
Kota Bontang	12,00	10,00	9,97	16,80	119,64	168,02
Kalimantan Timur	887,40	657,80	17,46	18,44	15.492,52	12.132,24

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.7 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2021 dan 2023

Jenis Tanaman Sayuran	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Ton/ha)		Produksi (Ton)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bawang Daun	200	248	2,39	2,73	479	676
Bawang Merah	25	59	4,62	4,25	114	252
Bayam	1.097	1.021	4,50	3,11	4.930	4.743
Buncis	492	411	11,27	10,71	5.546	4.402
Cabai Besar/TW/Tero- pong	309	256	6,74	4,61	2.083	1.183
Cabai Kering	480	563	7,60	6,47	3.650	3.647
Cabai Rawit	1.216	1.314	6,40	5,68	7.778	7.470
Jamur Tiram	6.848	2	0,24	0,20	1.670	294
Kacang Panjang	951	14.945	9,97	0,08	9.476	1.117
Kangkung	1.230	1.151	8,97	8,16	11.026	9.394
Kembang Kol	35	53	3,60	3,08	125	162
Kubis	3	3	0,75	1,45	2	4
Labu Siam	54	76	5,97	2,42	324	185
Melon	77	92	6,07	9,04	470	832
Mentimun	848	752	14,05	14,08	11.911	10.593
Paprika	-	-	-	-	-	-
Petsai/Sawi	1.070	1.040	7,94	6,82	8.493	7.086
Semangka	514	753	7,13	8,01	3.665	6.030
Terung	915	826	13,41	11,40	12.270	9.420
Tomat	726	687	12,17	10,09	8.841	6.929

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.8 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Buah-Buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023

Jenis Tanaman Buah-Buahan	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)		Produktivitas (Kg/Phn)		Produksi (Ton)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alpukat	14.493	15.958	44	65	638	1.042
Belimbing	12.279	13.667	103	158	1.267	2.165
Buah Naga	143.811	150.085	88	22	12.719	33.338
Duku/Langsat/ Kokosan	28.458	69.241	141	121	3.998	8.359
Durian	99.015	166.604	89	125	8.773	20.821
Jambu Biji	30.197	34.248	49	59	1.466	22.029
Jambu Air	22.681	24.825	54	79	1.229	1.956
Jeruk	11.945	187.070	79	44	949	8.236
Jeruk Lemon	8.433	9.525	33	61	276	276
Jeruk Pamelo	5.674	5.834	36	42	205	205
Jeruk Siam/ Keprok	177.807	171.711	44	49	7.755	7.755
Lengkeng	14.035	19.136	113	105	1.590	2.000
Mangga	41.645	64.745	72	105	3.010	4.758
Manggis	2.815	5.550	121	85	342	470
Melinjo	12.914	13.715	118	40	546	4.222
Nangka/ Cempedak	108.715	122.294	77	97	8.364	11.834
Nenas	10.545.668	6.064.224	3	0	36.641	24.867
Pepaya	189.237	210.550	72	140	13.674	29.442
Pisang	1.635.226	1.675.231	78	93	127.562	156.132
Rambutan	204.380	272.815	52	60	10.703	16.334
Salak	774.957	775.822	9	9	6.841	6.756
Sawo	18.267	20.850	74	73	1.352	1.519
Sirsak	22.325	25.815	37	30	829	776
Sukun	20.128	18.521	51	73	1.028	1.357

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.9 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 dan 2023

Tanaman	Luas Panen (M2)		Produktivitas (Kg/M2)		Produksi (Kg)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jahe	1.106.046	234.829	1,03	2,29	1.140.389	537.578
Jeruk Nipis	116.685	109.715	16,7	16,20	1.948.323	1.777.781
Kapulaga	2.446	1.747	3,41	3,44	8.332	6.009
Kencur	33.197	24.596	3,9	1,76	129.305	43.191
Kunyit	89.479	64.962	2,45	1,91	219.214	124.112
Laos/Lengkuas	93.741	84.294	3,14	2,32	294.401	195.912
Lempuyang	1.394	991	4,45	3,27	6.205	3.244
Lidah Buaya	4.239	1.409	12,43	13,68	52.684	19.282
Mahkota Dewa	4.272	2.255	109,27	74,02	466.807	166.912
Mengkudu/Pace	5.238	2.688	67,87	61,52	355.501	165.356
Sambiloto	1.369	512	2,05	2,06	2.800	1.053
Serai Hijau	247.981	169.253	3,91	4,24	969.635	717.056
Temuireng	10.308	6.404	6,32	5,38	65.162	34.480
Temukunci	7.211	1.526	8,7	1,69	62.746	2.577
Temulawak	14.897	9.175	3,37	2,94	50.173	26.972

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.10 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur , 2022 dan 2023

Tanaman	Total Luas Panen (m2)		Produktivitas (Tgk/m2)		Produksi (Tangkai)	
	2022	2023*	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aglaonema	1.758	1.267	3,34	5,34	5.864	6.769
Anggrek Pot	4.650	1.224	1,78	3,58	8.276	4.381
Anggrek Potong	1.932	4.094	6,92	4,01	13.363	16.430
Anthurium Bunga	2.217	1.690	3,5	7,84	7.767	13.255
Bromelia	40	145	2,75	2,08	110	301
Bugenvil	2.133	1.941	1,69	5,20	3.605	10.086
Cordyline	8	150	21,25	1,73	170	260
Dracaena	40	730	2,5	2,86	100	2.090
Gerbera (Herbras)	8	113	20	7,88	160	890
Heliconia (Pisang-Pisangan)	662	530	2,73	5,31	1.806	2.816
Ixora (Soka)	1.455	1.356	2,82	24,97	4.110	33.858
Krisan	4.401	83	1,04	4,12	4.585	342
Mawar	23.979	23.149	20,93	14,87	501.990	344.266
Melati	50.211	45.736	0,46	0,29	22.935	13.165
Pakis	5.112	975	1,85	7,84	9.461	7.646
Palem	995	966	1,77	1,84	1.764	1.777
Phylodendron	165	567	9,53	9,38	1.573	5.320
Puring	1.080	1.556	2,44	7,44	2.640	11.581
Sansevieria (Pedang-Pedangan)	683	1.173	4,51	2,48	3.083	2.904
Sedap Malam	2.575	138	1,68	9,04	4.333	1.248

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2001 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 03 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pembangunan kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 10 UU No. 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan





pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut pasal 11 ayat (3) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

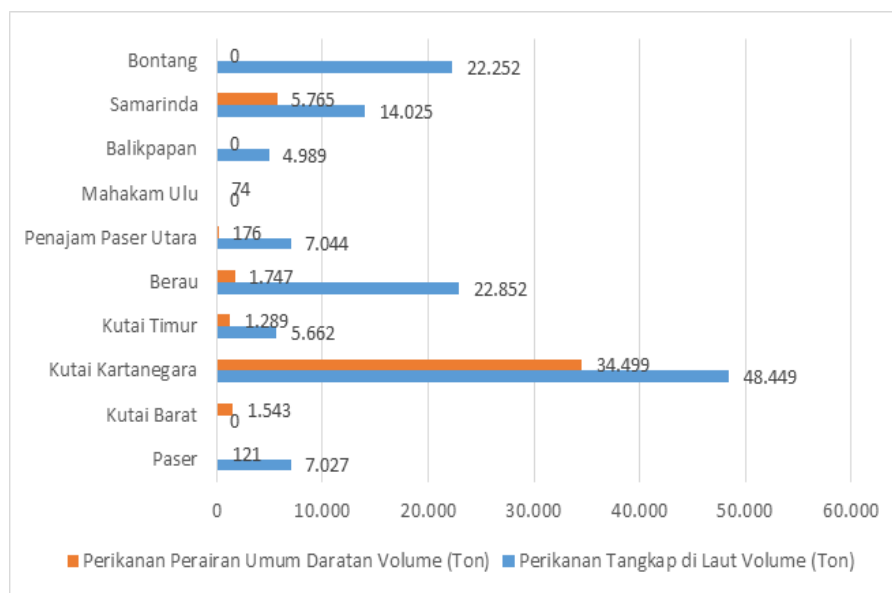
Urusan pilihan menurut pasal 14 ayat (2) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keunggulan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan salinan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan type A yang terdiri dari 4 Bidang ditambah Sekretariat, yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No.1 Samarinda.



Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Grafik ini memberikan gambaran tentang produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, yang dibagi berdasarkan kabupaten/kota dan jenis penangkapan. Dalam kategori “Perikanan Tangkap di Laut”, Kutai Kartanegara adalah kontributor terbesar dengan produksi mencapai 48.449 ton, diikuti oleh Berau dengan 22.852 ton, dan Bontang dengan 22.252 ton. Kabupaten Paser juga berkontribusi secara signifikan dengan produksi sebanyak 7.027 ton. Di sisi lain, Mahakam Ulu adalah kabupaten dengan produksi terendah di kategori ini, hanya mencapai 74 ton.

Sementara itu, dalam kategori “Perikanan Perairan Umum Daratan”, Kutai Kartanegara juga menjadi pemimpin dengan produksi

mencapai 34.499 ton, diikuti oleh Samarinda dengan 5.765 ton, dan Berau dengan 1.747 ton. Kutai Timur juga mencatatkan kontribusi yang signifikan dengan produksi sebanyak 1.289 ton. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki produksi terendah di kategori ini, hanya mencapai 176 ton.

Secara total, Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan 132.300 ton perikanan tangkap di laut dan 45.214 ton perikanan perairan umum daratan pada tahun 2022. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa perikanan tangkap di laut jauh lebih dominan dibandingkan dengan perairan umum daratan di Kalimantan Timur pada tahun tersebut.

Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	10.628	230.934.716	84	5.195.065
Kutai Barat	-	-	1.570	44.064.097
Kutai Kartanegara	47.371	1.533.547.276	34.318	1.098.187.392
Kutai Timur	5.718	189.563.504	1.179	32.641.340
Berau	23.299	795.895.497	1.671	79.397.405
Penajam Paser Utara	6.521	189.684.430	157	6.513.515
Mahakam Ulu	-	-	60	8.226.010
Kota Balikpapan	5.704	113.075.347	-	-
Kota Samarinda	12.038	447.747.000	4.540	171.816.500
Kota Bontang	21.922	1.044.570.063	-	-
Kalimantan Timur	133.201	4.545.017.833	43.579	1.446.041.324

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Cakalang		Tongkol		Tuna	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	-	-	15	290.000	-	-
Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	-	-	477	10.848.830	-	-
Kutai Timur	48	1.085.715	352	6.935.869	372	10.228.600
Berau	-	-	1.535	27.987.848	309	8.794.946
Penajam Paser Utara	184	3.681.420	803	19.946.705	133	3.323.750
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan	95	2.363.715	652	14.367.560	27	825.875
Kota Samarinda	642	16.050.000	639	15.975.000	612	18.360.000
Kota Bontang	1.794	62.792.380	4.349	152.198.795	922	50.713.575
Kalimantan Timur	2.763	85.973.230	8.822	248.550.607	2.375	92.246.746

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 3.6.2

Kabupaten/Kota	Udang		Lainnya		Tangkap di Laut	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	2.271	106.027.460	8.342	124.617.256	10.628	230.934.716
Kutai Barat	-	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	17.674	904.449.955	29.220	618.248.491	47.371	1.533.547.276
Kutai Timur	1.695	98.453.865	3.251	72.859.455	5.718	189.563.504
Berau	4.155	271.920.935	17.300	487.191.768	23.299	795.895.497
Penajam Paser Utara	671	36.424.530	4.730	126.308.025	6.521	189.684.430
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan	120	5.183.300	4.810	90.334.897	5.704	113.075.347
Kota Samarinda	1.218	88.140.000	8.927	309.222.000	12.038	447.747.000
Kota Bontang	273	13.021.480	14.584	765.843.833	21.922	1.044.570.063
Kalimantan Timur	28.077	1.523.621.525	91.164	2.594.625.725	133.201	4.545.017.833

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Udang		Ikan dan Lainnya		Tangkap di Perairan Umum	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	44	3.899.280	40	1.295.785	84	5.195.065
Kutai Barat	-	-	1.570	44.064.097	1.570	44.064.097
Kutai Kartanegara	791	101.206.155	33.527	996.981.237	34.318	1.098.187.392
Kutai Timur	6	598.640	1.173	32.042.700	1.179	32.641.340
Berau	359	32.291.100	1.312	47.106.305	1.671	79.397.405
Penajam Paser Utara	24	2.630.210	133	3.883.305	157	6.513.515
Mahakam Ulu	-	-	60	8.226.010	60	8.226.010
Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-
Kota Samarinda	513	56.430.000	4.027	115.386.500	4.540	171.816.500
Kota Bontang	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	1.737	197.055.385	41.842	1.248.985.939	43.579	1.446.041.324

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.4 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1.000 Ekor)	Ikan Hias (1.000 Ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	14.159	5.394	-
Kutai Barat	2.435	186	5.292
Kutai Kartanegara	127.245	855.840	1.944.900
Kutai Timur	911	-	-
Berau	2.404	6.482	-
Penajam Paser Utara	9.236	16.670	-
Mahakam Ulu	4	-	-
Kota Balikpapan	548	162.951	7.440
Kota Samarinda	894	35.433	97.632
Kota Bontang	4.289	81	78.900
Kalimantan Timur	162.125	1.083.037	2.134.164

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

x x x x x x
x x x x x x

PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024

x
x
x
x
x
x
x
x

Pada tahun 2023
di Kalimantan Timur terdapat

6

Bandara
yang sudah beroperasi



361 Pelabuhan



BAB IV

**PERHUBUNGAN DAN
INFRASTRUKTUR**

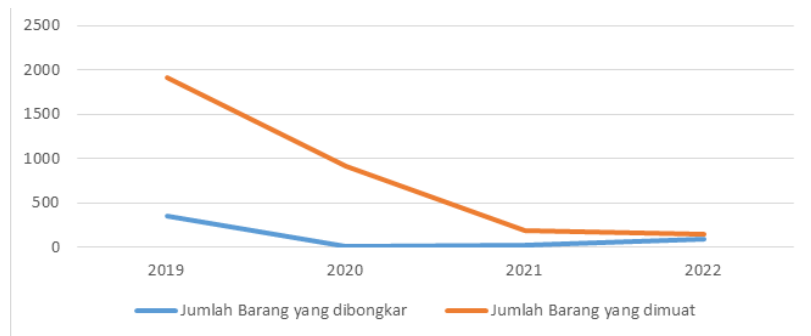
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah di sektor perhubungan, dengan berlandaskan prinsip otonomi dan peran pembantuannya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016, tugas Dinas Perhubungan mencakup beberapa aspek penting. Ini meliputi penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis di sektor perhubungan. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian kebijakan teknis terkait lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta pengembangan dan perkeretaapian. Tugas lainnya meliputi pengelolaan urusan administratif, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan arahan atasan yang sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



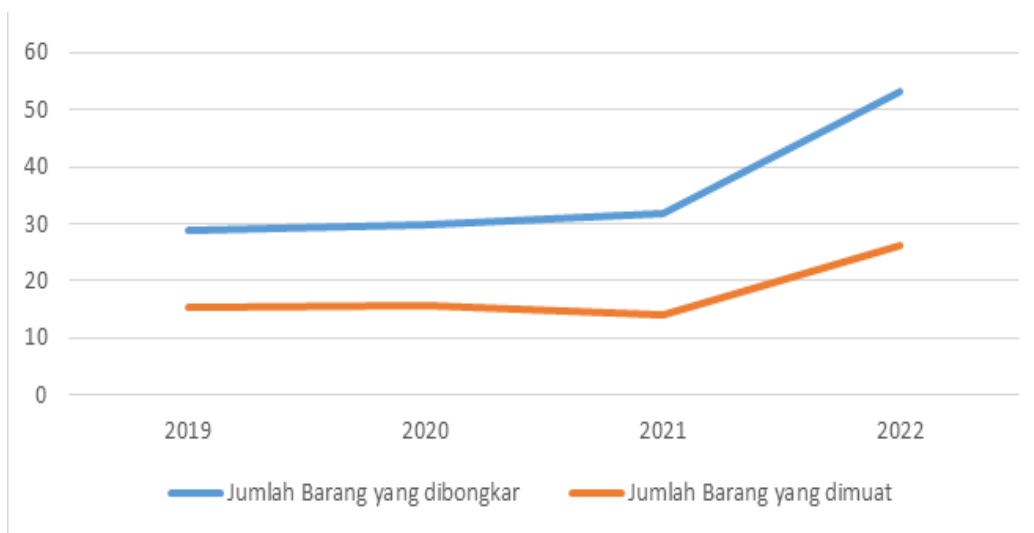


Grafik. 4.1.1 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022



Grafik tersebut menunjukkan adanya tren yang berfluktuasi dalam aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022. Jumlah barang yang dibongkar mengalami penurunan drastis dari 352 ribu ton pada tahun 2019 menjadi hanya 8 ribu ton pada tahun 2020, tetapi mengalami lonjakan tajam menjadi 25 ribu ton pada tahun 2021, dan terus meningkat signifikan menjadi 88 ribu ton pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah barang yang dimuat juga mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat 1910 ribu ton barang yang dimuat, namun angka tersebut menurun drastis menjadi 918 ribu ton pada tahun 2020. Pada tahun 2021, kembali terjadi penurunan menjadi hanya 183 ribu ton, dan masih turun menjadi 140 ribu ton pada tahun 2022.

Grafik. 4.1.2 Jumlah bongkar Muat Barang Melalui Bandara di Provinsi Kalimantan Timur (ribu ton), 2019-2022



Grafik tersebut menggambarkan pergerakan dalam aktivitas bongkar muat barang di bandara di Provinsi Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir. Pada 2019, tercatat 29 ribu ton barang yang dibongkar, dan angka tersebut naik menjadi 30 ribu ton pada tahun 2020. Angka ini kembali naik pada tahun 2021 menjadi 32 ribu ton. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, dimana angka ini bergerak naik signifikan menjadi 53 ribu ton. Di sisi lain, jumlah barang yang dimuat juga mencerminkan pola yang serupa. Pada 2019, 15 ribu ton barang dimuat dari bandara di Provinsi Kalimantan Timur, dan angka tersebut naik sedikit menjadi 16 ribu ton pada tahun berikutnya. Namun di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 14 ribu ton. Sementara angka tahun 2022 mencatatkan kenaikan signifikan dengan 26 ribu ton barang dimuat.

Tabel 4.1.1 Jumlah Kendaraan Dan Rasio Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022

Nama Variabel	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Unit Kendaraan	2.992.255	3.178.580	3.264.435	2.873.505
Rasio Panjang Jalan	0,0054	0,0051	0,0049	0,0056

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.2 Daftar Terminal Bus di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Nama	Kota/Kab	Tipe	Manajemen	Kategori Terminal Bus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terminal Batu Ampar	Balikpapan	Terminal Tipe A	Kementerian Perhubungan	Antar Provinsi
Terminal Samarinda Seberang	Samarinda	Terminal Tipe A	Kementerian Perhubungan	Antar Provinsi
Terminal Rinding	Berau	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Sei Kunjang	Samarinda	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Sangatta	Kutai Timur	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Timbau	Kutai Kartanegara	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Tepian Batang	Paser	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Bontang	Bontang	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota
Terminal Lempake	Samarinda	Terminal Tipe B	Pemerintah Provinsi	Antar Kota

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.3 Jumlah Kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenisnya, 2023

Jenis Kendaraan	Jumlah
(1)	(2)
Angkutan Antar Jemput	64
Angkutan Kota Dalam Provinsi	248
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Karyawan	11
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Keperintisan	2
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Patas	8
Angkutan Kota Dalam Provinsi - Taksi	87
Angkutan Sewa Khusus	310
Jumlah Kendaraan	730

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.4 Jumlah Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah
(1)	(2)
Paser	28
Kutai Barat	33
Kutai Kartanegara	96
Kutai Timur	43
Berau	39
Penajam Paser Utara	23
Mahakam Ulu	3
Kota Balikpapan	43
Kota Samarinda	43
Kota Bontang	10
Kalimantan Timur	361

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.4 Daftar Bandara di Provinsi Kalimantan Timur dengan Status Sudah Beroperasi, 2023

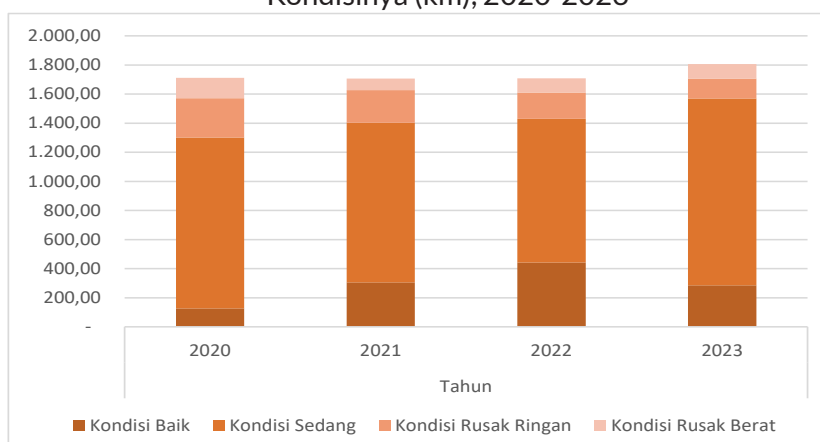
Nama Bandara	IATA / ICAO	Kelas	Pengelola	Panjang Landasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Balikpapan	BPN / WALL	Kelas IA	PT. Angkasa Pura I	2.500 X 45 M
Kalimaranau - Berau	BEJ / WALK	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Udara Berau	2.250 X 45 M
Apt. Pranoto Samarinda	SRI / WRLS	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Udara Samarinda	2.250 X 45 M
Maratua - Berau	RTU / WAQC	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua	1.600 X 30 M
Melalan Melak - Kutai Barat	MLK / WALE	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Udara Melalan Melak	1.350 X 30 M
Datah Dawai - Mahakam Ulu	DTD / WALJ	Kelas IV	Unit Penyelenggara Bandar Udara Datah Dawai	1.600 X 30 M

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

4.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

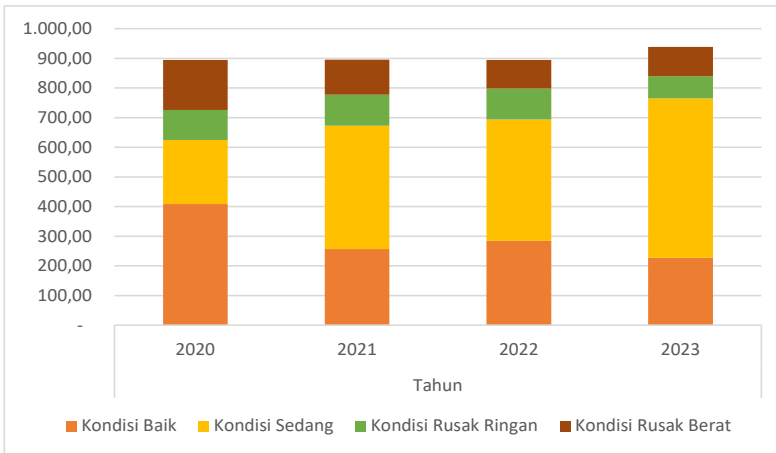
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran yang jelas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016. Tupoksi dinas ini melibatkan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengembangan teknis di berbagai aspek seperti sumber daya air, cipta karya, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan perumahan. Setiap bidang dalam dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Kepala Bidang memimpin beberapa seksi yang memiliki tugas khusus dalam mengumpulkan bahan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, dinas ini memainkan peran sentral dalam mengelola sumber daya alam, infrastruktur, serta pengembangan wilayah dan pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik. 4.2.1 Panjang Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kondisinya (km), 2020-2023

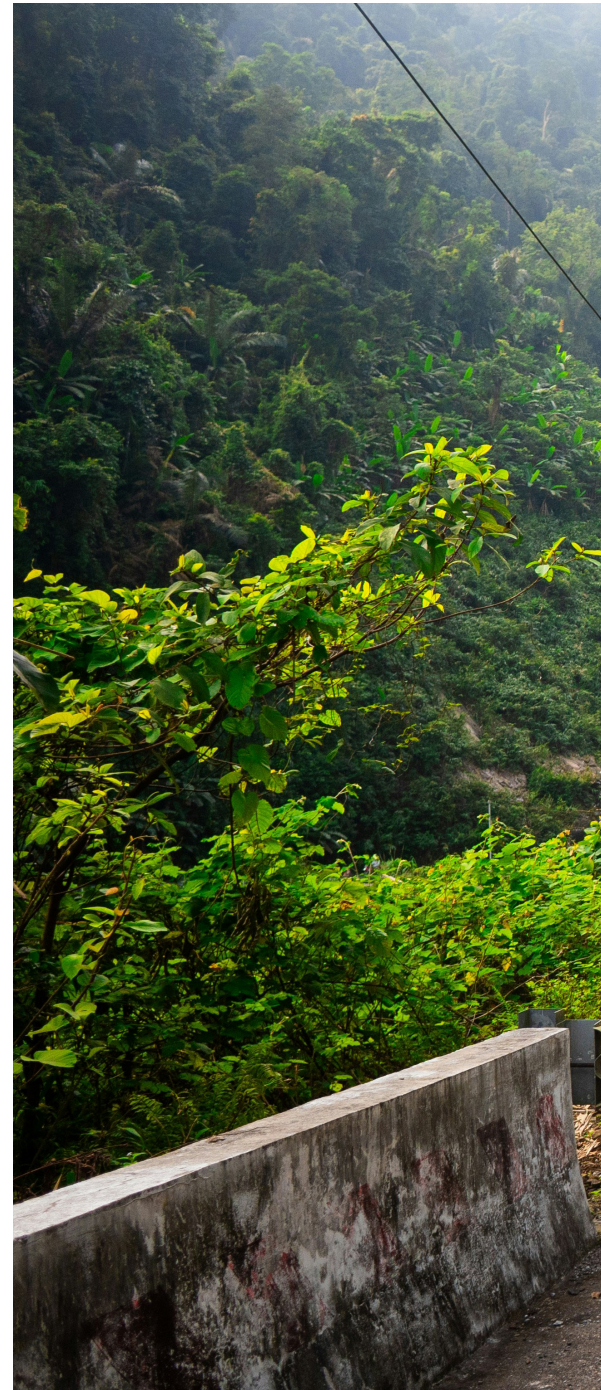


Grafik menunjukkan bahwa mayoritas jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2023 berada dalam kondisi baik, dengan panjang lebih dari 1.200 km setiap tahunnya, diikuti oleh jalan dalam kondisi sedang yang relatif stabil sekitar 400-600 km. Kondisi rusak ringan mengalami sedikit peningkatan selama periode tersebut, sementara kondisi rusak berat tetap minim dan hampir tidak berubah. Secara keseluruhan, sebagian besar jalan nasional berada dalam kondisi baik, dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan ringan atau berat.

Grafik. 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi menurut Kondisinya (km) di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023



Grafik Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Timur diatas menunjukkan adanya peningkatan total panjang jalan dari tahun ke tahun, namun dengan distribusi kondisi yang beragam. Terdapat tren peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang, mengindikasikan adanya upaya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Fluktuasi pada panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas jalan, terutama di wilayah dengan intensitas penggunaan yang tinggi. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur, namun perlu upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh jalan dalam kondisi yang baik dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.





Tabel 4.2.1 Data Sumber Air Potensial, 2023

Potensi Sumber Air Permukaan selain Sungai	Lokasi
(1)	(2)
Waduk dan Bendungan Bengalon	Kec. Bengalon
Waduk dan Bendungan Kaliorang	Kec. Kaliorang
Waduk dan Bendungan Karangas	Kec. Karangas
Waduk dan Bendungan Pulai	Kec. Sandaran
Waduk dan Bendungan Sangatta	Kec. Sangatta
Bendungan Sukarahmat	Kec. Teluk Pandan
Embung Muara Wahau	Kec. Muara Wahau
Embung Dumaring	Kec. Dumaring
Kolam Retensi Kanaan	Kec. Bontang Barat
Bendungan Nyerekat	Kec. Bontang Selatan
Sumur dalam Maloy	Kec. Sangkulirang
Void bekas tambang PT. Indominco Mandiri sebanyak 6 titik dengan kapasitas tampung 20,7 Jt m ³	Kab. Kutai Timur
Void bekas tambang PT. KPC tersebar di beberapa titik	Kab. Kutai Timur

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.2 Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022

Daerah Irigasi (DI)	2021	2022
(1)	(2)	
Total Daerah Irigasi	22	22
Daerah Irigasi Permukaan	8	8
Kab. Berau		
D.I. Biatau	1	1
D.I. Labanan	1	1
D.I. Merancang	1	1
D.I. Semurut	1	1
Kab. Kutai Kartanegara		
D.I. Marangkayu	1	1
D.I. Sungai Buluh	1	1
Kab. Kutai Timur		
D.I. Kali Orang	1	1
D.I. Selangkau	1	1
Daerah Irigasi Rawa	14	14
Kab. Berau		
D.I.R. Rantau Pangan	1	1
D.I.R. Sei Kuran	1	1
D.I.R. Sukan Tengah	1	1
D.I.R. Tanjung Perengat	1	1
D.I.R. Urutang	1	1
Kab. Kutai Barat		
D.I.R. Resak	1	1
Kab. Kutai Kartanegara		
D.I.R. Sebulu	1	1
Kab. Kutai Timur		
D.I.R. Bengalon	1	1
Kab. Paser		
D.I.R. Laburan Lama	1	1
D.I.R. Padang Pangrapat	1	1
D.I.R. Riwang	1	1
D.I.R. Suliliran	1	1
D.I.R. Tanjung Aru	1	1
D.I.R. Tanjung Harapan	1	1

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2020-2023

Jenis Jalan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1.710,90	1.710,95	1.806,76	1.806,75
1. Kondisi Baik	127,39	305,83	442,50	285,30
2. Kondisi Sedang	1.175,04	1.097,78	988,11	1.284,46
3. Kondisi Rusak Ringan	268,76	224,43	179,11	136,41
4. Kondisi Rusak Berat	139,71	78,19	98,14	100,58
Jalan Provinsi	895,09	895,09	895,09	938,85
1. Kondisi Baik	408,38	257,03	284,86	227,51
2. Kondisi Sedang	216,10	416,10	409,00	536,84
3. Kondisi Rusak Ringan	101,48	104,30	104,81	75,72
4. Kondisi Rusak Berat	169,13	117,67	96,42	98,78

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2020-2023

Jenis Jalan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1.710,90	1.710,96	1.806,76	1.806,77
1. Aspal	1.407,26	1.421,14	1.423,49	1.442,02
2. Kerikil	37,80	-	-	0,20
3. Tanah	-	-	-	-
4. Cor Beton	265,84	287,40	287,40	364,55
Jalan Provinsi	895,09	895,09	895,09	938,85
1. Aspal	529,65	475,11	465,29	467,00
2. Kerikil	132,49	141,65	127,59	83,51
3. Tanah	28,42	29,19	27,17	1,38
4. Cor Beton	204,53	249,14	275,04	386,96

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

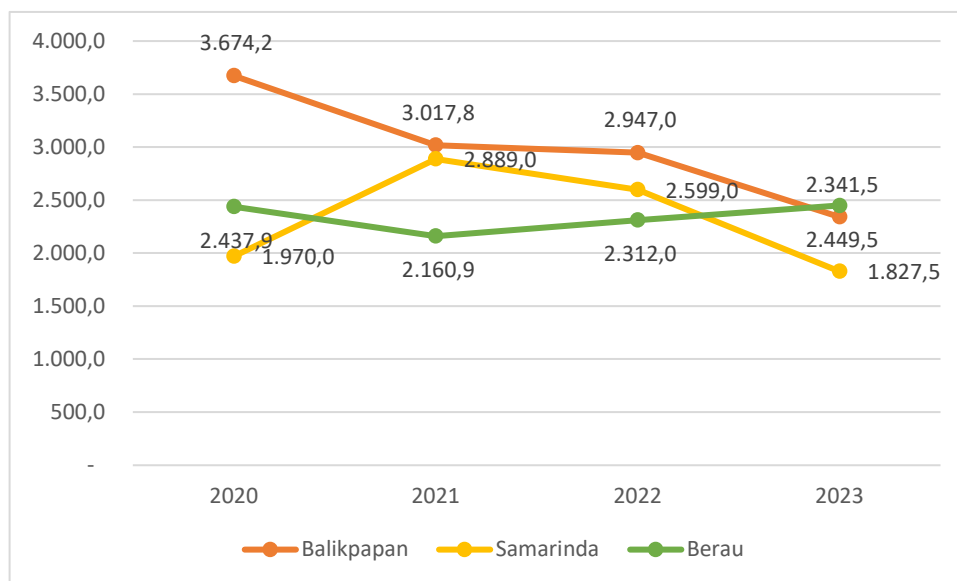


4.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki status sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. BMKG memiliki tugas pokok melaksanakan berbagai aspek di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BMKG juga melaksanakan sejumlah fungsi, termasuk perumusan kebijakan nasional dan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta penyediaan informasi dan peringatan dini terkait perubahan iklim dan bencana yang berkaitan dengan faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG juga aktif dalam kerja sama internasional, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan instrumentasi. Koordinasi dan pengawasan BMKG berada di bawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.



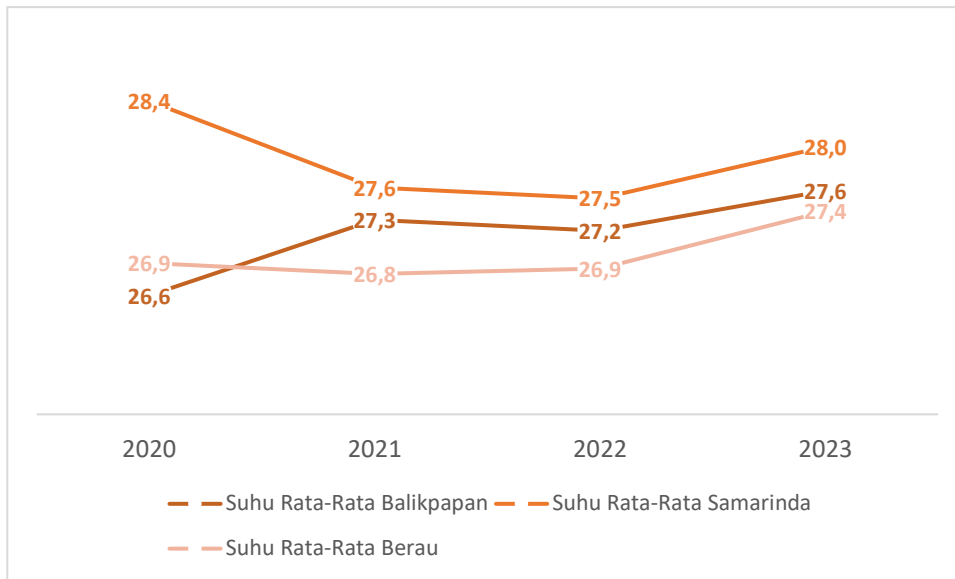
Grafik. 4.3.1 Curah Hujan dalam Satu tahun di Tiga Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (mm), 2020-2023



Grafik tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan curah hujan tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau, tetapi juga mengindikasikan tren penurunan curah hujan secara umum di ketiga wilayah selama periode 2020-2023. Balikpapan, yang memulai dengan curah hujan tertinggi pada 2020, mengalami penurunan konsisten hingga 2023. Samarinda, meskipun mengalami fluktuasi, mencatat peningkatan kecil dari 2021 ke 2023. Berau relatif lebih stabil namun tetap menunjukkan penurunan curah hujan pada akhir periode. Tren penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan iklim lokal atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pola curah hujan di wilayah Kalimantan Timur, yang dapat berdampak pada sektor pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut.



Grafik 4.3.2 Suhu Rata-rata dalam Satu Tahun di Tiga Wilayah di provinsi Kalimantan Timur (derajat selsius), 2019-2023



Grafik suhu rata-rata di Balikpapan, Samarinda, dan Berau dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi suhu yang relatif kecil. Balikpapan mencatat suhu rata-rata tertinggi pada tahun 2020, diikuti oleh penurunan suhu secara bertahap hingga tahun 2022, sebelum kembali meningkat sedikit pada tahun 2023. Samarinda juga menunjukkan tren penurunan suhu hingga tahun 2022, namun dengan fluktuasi yang lebih kecil dibandingkan Balikpapan. Berau, di sisi lain, cenderung memiliki suhu rata-rata yang lebih stabil dibandingkan dua kota lainnya, dengan sedikit kenaikan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa suhu rata-rata di ketiga wilayah tersebut cenderung stabil dalam jangka waktu yang diamati, meskipun terdapat sedikit variasi antar tahun dan antar wilayah.

Tabel 4.3.1 Suhu Terendah, Suhu Tertinggi, dan Suhu Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (derajat celsius), 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan				
1. Suhu Terendah	25,2	24,5	24,2	21,6
2. Suhu Tertinggi	32,0	31,7	31,1	34,1
3. Suhu Rata-Rata	26,6	27,3	27,2	27,6
B. Samarinda				
1. Suhu Terendah	22,8	24,3	24,5	23,9
2. Suhu Tertinggi	35,0	32,2	32,3	34,0
3. Suhu Rata-Rata	28,4	27,6	27,5	28,0
C. Berau				
1. Suhu Terendah	21,6	23,5	22,0	21,3
2. Suhu Tertinggi	36,4	32,7	36,4	37,0
3. Suhu Rata-Rata	26,9	26,8	26,9	27,4

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.2 Kelembaban Udara Terendah, Kelembaban Udara Tertinggi, dan Kelembaban Udara Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan				
1. Kelembaban Udara Terendah	54,0	77,0	66,5	49,0
2. Kelembaban Udara Tertinggi	100,0	94,0	99,4	100,0
3. Kelembaban Udara Rata-Rata	88,0	86,0	83,5	80,7
B. Samarinda				
1. Kelembaban Udara Terendah	47,0	74,0	62,0	69,0
2. Kelembaban Udara Tertinggi	98,0	91,0	98,0	91,0
3. Kelembaban Udara Rata-Rata	80,0	81,0	82,0	81,2
C. Berau				
1. Kelembaban Udara Terendah	43,0	57,0	67,3	40,0
2. Kelembaban Udara Tertinggi	100,0	100,0	97,1	100,0
3. Kelembaban Udara Rata-Rata	80,0	89,0	86,9	86,9

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.3 Curah Hujan Terendah, Curah Hujan Tertinggi, dan Curah Hujan Total dalam Satu Tahun di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mm), 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan				
1. Curah Hujan Terendah	158,1	134,0	119,0	83,1
2. Curah Hujan Tertinggi	545,6	449,0	478,0	274,3
3. Curah Hujan Total Dalam Satu Tahun	3.674,2	3.017,8	2.947,0	2.341,5
B. Samarinda				
1. Curah Hujan Terendah	56,1	141,0	110,0	41,2
2. Curah Hujan Tertinggi	269,1	369,0	469,0	271,0
3. Curah Hujan Total Dalam Satu Tahun	1.970,0	2.889,0	2.599,0	1.827,5
C. Berau				
1. Curah Hujan Terendah	87,5	86,0	82,0	97,0
2. Curah Hujan Tertinggi	416,7	263,0	343,1	327,3
3. Curah Hujan Total Dalam Satu Tahun	2.437,9	2.160,9	2.312,0	2.449,5

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.4 Kecepatan Angin Terendah, Kecepatan Angin Tertinggi, dan Kecepatan Angin Rata-Rata Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (m/detik), 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan				
1. Kecepatan Angin Terendah	3,0	0,0	0,0	0,0
2. Kecepatan Angin Tertinggi	30,0	35,0	43,0	48,0
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	5,0	4,0	3,0	3,4
B. Samarinda				
1. Kecepatan Angin Terendah	9,0	0,0	0,0	0,0
2. Kecepatan Angin Tertinggi	25,0	30,0	36,0	44,0
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	4,0	3,0	4,0	3,7
C. Berau				
1. Kecepatan Angin Terendah	3,0	0,0	0,0	0,0
2. Kecepatan Angin Tertinggi	25,0	21,0	19,0	21,0
3. Kecepatan Angin Rata-Rata	7,0	4,0	3,5	3,3

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.5 Rata-rata Penyinaran Matahari Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (persen), 2019-2022*

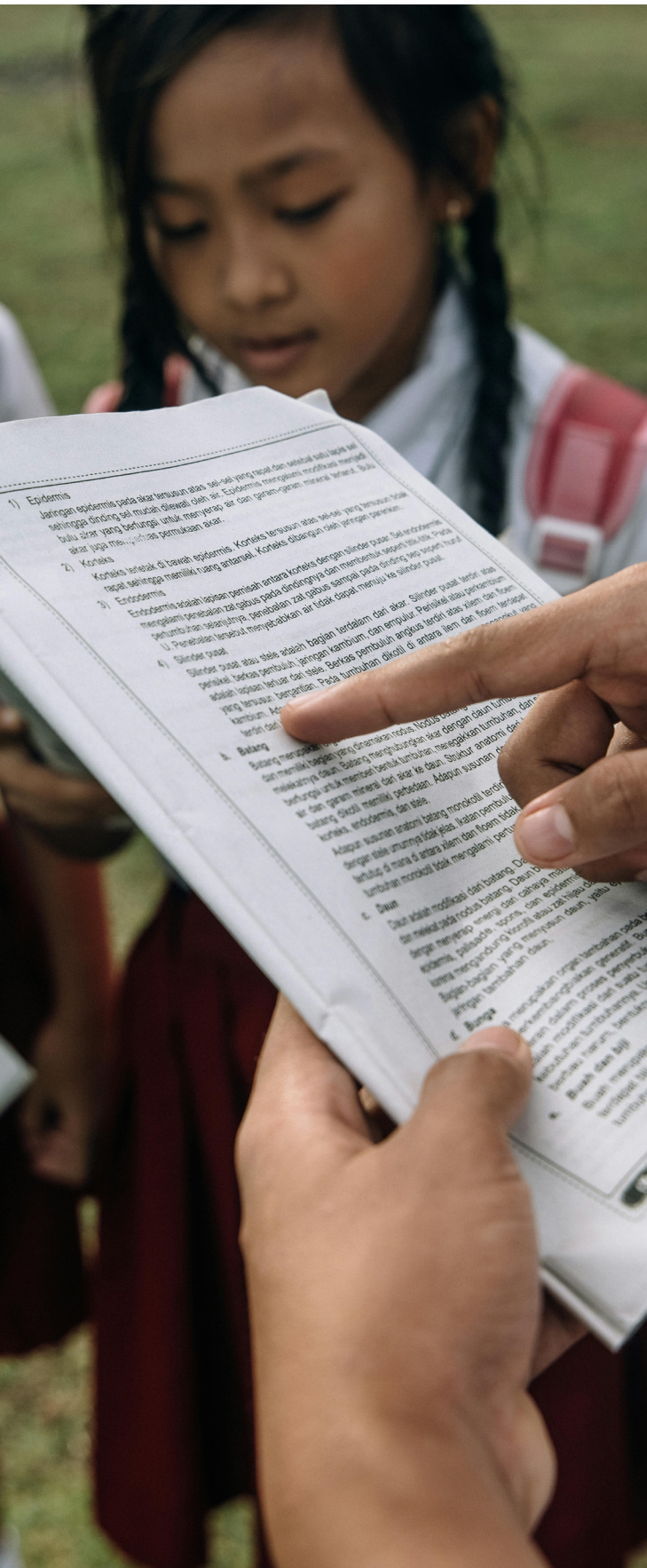
Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan	51	50	46	54
B. Samarinda	50	42	41	47
C. Berau	54	42	50	33

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.6 Rata-rata Tekanan Udara Tahunan di Balikpapan, Samarinda, dan Berau (mb), 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Balikpapan	1.011	1.011	1.010	1.011
B. Samarinda	1.012	1.012	1.012	1.013
C. Berau	1.012	1.012	1.012	1.012

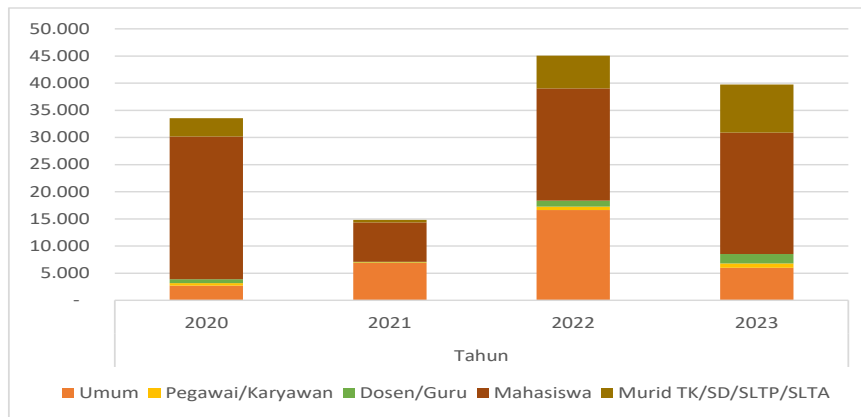
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur



4.4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur memiliki peran dalam membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam upaya ini, dinas tersebut menawarkan berbagai produk layanan yang beragam. Beberapa layanan yang diberikan mencakup pemantauan eksternal kearsipan, audit eksternal kearsipan, penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis, kunjungan wisata arsip, akuisisi arsip, layanan baca di tempat untuk berbagai koleksi, penggunaan layanan GOBOOK, koleksi audio visual, surat keterangan bebas pustaka, layanan perpustakaan digital iKaltim, pojok buku elektronik (PaDi), layanan perpustakaan setiap saat, perpustakaan keliling, layanan mendongeng (story telling), layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku), layanan penitipan barang (locker), layanan keanggotaan perpustakaan, layanan kunjungan perpustakaan/wisata perpustakaan, dan layanan informasi dan aduan masyarakat. Melalui berbagai layanan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur berperan dalam mendukung akses terhadap informasi dan pengelolaan dokumen yang efektif di daerah tersebut.

Grafik 4.4.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi Pengunjung, 2020-2023



Pada tahun 2020, jumlah total pengunjung mencapai lebih dari 30.000 dengan segmen mahasiswa sebagai pengunjung terbesar, diikuti oleh segmen umum. Pada tahun 2021, terlihat penurunan drastis di semua segmen, terutama di segmen mahasiswa dan umum, dengan total pengunjung kurang dari 15.000. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung meningkat secara signifikan menjadi lebih dari 40.000, dengan mahasiswa kembali mendominasi. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, meskipun ada sedikit penurunan, jumlah pengunjung tetap cukup tinggi, di atas 35.000, dengan mahasiswa masih menjadi segmen terbesar.

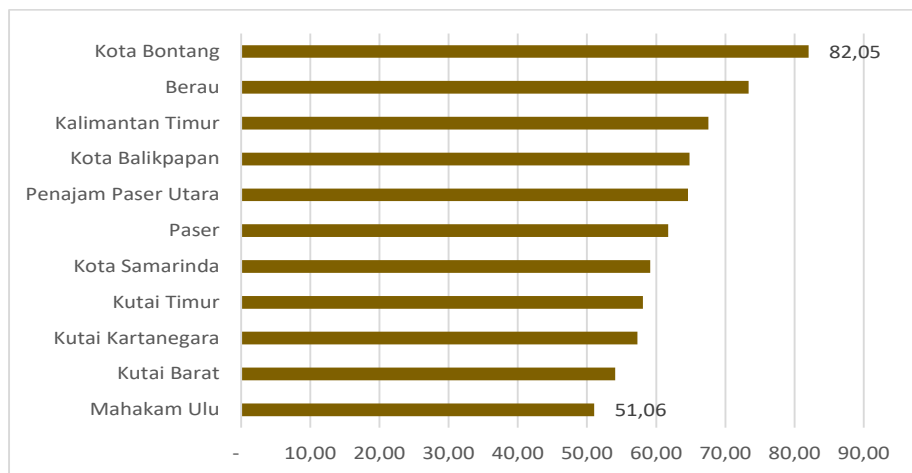
Penurunan tajam pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas di tempat umum seperti perpustakaan. Pada tahun





2022, peningkatan besar jumlah pengunjung menunjukkan adanya pemulihan setelah pelonggaran pembatasan dan kembalinya kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Dominasi mahasiswa sebagai pengunjung terbesar dapat diartikan bahwa perpustakaan masih menjadi pusat penting untuk kegiatan akademik di Kalimantan Timur.

Grafik 4.4.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim , 2023



Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar daerah. Kota Bontang tercatat memiliki nilai IPLM tertinggi, diikuti oleh Berau. Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai IPLM terendah. Secara umum, daerah-daerah dengan pusat kota cenderung memiliki nilai IPLM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap fasilitas dan sumber daya literasi, seperti perpustakaan dan bahan bacaan, masih belum merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Disparitas ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama di daerah dengan nilai IPLM yang rendah.

Tabel 4.4.1 Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2022

Variabel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	72.579	89.863	91.885	91.885	97.601	100.748	103.035
Jumlah Buku Yang Tersedia di perpustakaan daerah	183.224	200.273	202.458	202.458	211.268	216.218	219.449
Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	0,40	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47
Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	16.076	16.076	46.331	16.331	16.604	17.116	17.116
Jumlah Buku Elektronik Yang Tersedia	135.101	135.101	101.990	101.990	103.330	104.530	104.530

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2017-2023

Segmentasi Pengunjung	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	8.631	6.938	6.286	6.103	2.706	6.914	5.994
Pegawai/Karyawan	7.210	4.853	4.348	2.474	496	109	802
Dosen/Guru	3.302	2.880	2.622	3.440	687	100	1.728
Mahasiswa	113.841	84.321	84.900	62.895	26.311	7.227	22.354
Murid SLTA	5.111	2.912	3.373	3.952	1.579	212	1.992
Murid SLTP	2.323	1.346	1.232	1.164	211	60	707
Murid TK/SD	7.018	6.689	9.679	3.302	1.552	194	6.197
Total	147.436	109.939	112.440	83.330	33.542	14.816	39.774

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Peminjam Buku (orang)	67.477	68.666	52.819	15.437	2.130	12.383	15.755
Jumlah Buku yang Dipinjam (eksemplar)	95.599	88.992	48.329	19.173	8.119	16.099	14.572

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2017-2023

Klasifikasi	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perpustakaan Umum							
1. Provinsi	1	1	1	1	1	1	1
2. Kab/Kota	9	9	9	9	9	9	9
3. Kecamatan	56	60	90	90	90	90	90
4. Desa/Kelurahan	523	523	648	648	648	648	648
Perpustakaan Sekolah							
1. SD/Sederajat	670	670	670	670	670	670	670
2. SMP/Sederajat	214	214	214	214	214	214	214
3. SMA/Sederajat	446	446	446	446	446	502	502
Perpustakaan Perguruan Tinggi							
1. PT Negeri	5	5	5	5	5	6	6
2. PT Swasta	45	45	45	45	45	73	73

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023

Kabupaten/Kota	2022	2023
(1)		(2)
Paser	79,35	61,75
Kutai Barat	72,91	54,06
Kutai Kartanegara	77,49	57,28
Kutai Timur	66,82	58,08
Berau	63,68	73,35
Penajam Paser Utara	53,65	64,59
Mahakam Ulu	41,78	51,06
Kota Balikpapan	80,23	64,80
Kota Samarinda	85,83	59,14
Kota Bontang	70,44	82,05
Kalimantan Timur	69,22	67,56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023

Kabupaten/Kota	2022	2023
(1)		(2)
Paser	-	54,02
Kutai Barat	-	50,62
Kutai Kartanegara	-	65,17
Kutai Timur	-	51,16
Berau	-	51,10
Penajam Paser Utara	63,65	52,04
Mahakam Ulu	-	51,14
Kota Balikpapan	67,41	51,76
Kota Samarinda	69,49	59,90
Kota Bontang	-	71,40
Kalimantan Timur	66,84	55,83

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

4.5 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Organisasi bertanggung jawab membantu Asisten Administrasi Umum dalam berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan kebijakan daerah. Tugas ini meliputi persiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di sektor kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana.

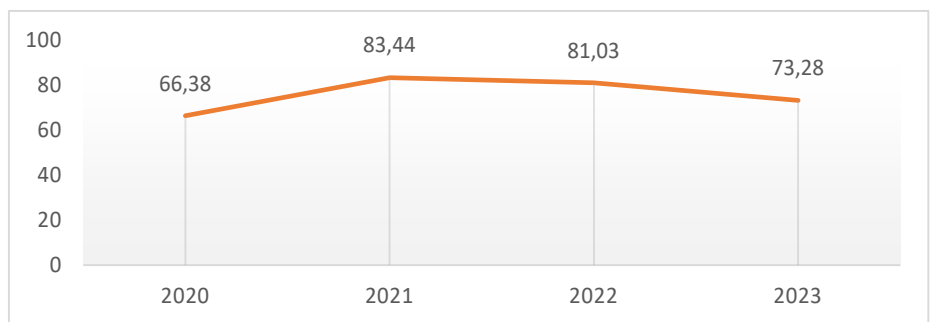
Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, melakukan persiapan dalam merumuskan kebijakan daerah terkait kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Kedua, mengkoordinasikan proses perumusan kebijakan daerah di bidang tersebut. Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam ranah kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Keempat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam aspek kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana. Kelima, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang relevan dengan tugasnya.





Dengan mengemban berbagai tugas dan fungsi ini, Biro Organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan daerah di berbagai aspek yang terkait dengan struktur organisasi, analisis jabatan, peningkatan birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola.

Grafik 4.5.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2020-2023



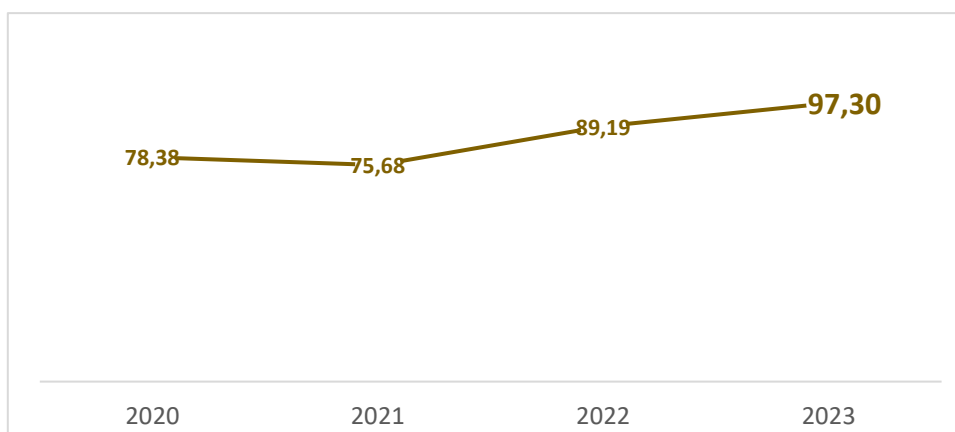
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik di atas menggambarkan persentase perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar dari tahun 2020 hingga 2023. Terlihat adanya tren peningkatan persentase perangkat daerah yang melaksanakan SKM pada tahun 2021, mencapai angka tertinggi sebesar 83,44%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, persentase tersebut mengalami sedikit penurunan, masing-masing sebesar 81,03% dan 73,28%.

Penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum peningkatan

pelaksanaan SKM. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan ini antara lain adalah perubahan prioritas anggaran, rotasi pejabat, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya SKM di beberapa perangkat daerah.

Grafik 4.5.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2020-2023



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik persentase perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh predikat minimal B (Baik) dalam penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021, persentase perangkat daerah yang berprestasi baik meningkat pesat pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penguatan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan penuh dari pimpinan daerah.

Tabel 4.5.1 Indikator sdgs Biro Organisasi, 2020-2023

Indikator SDGs	2020	2021	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	1,12	0,12	0,28	-0,21

* Tahun 2023 menggunakan angka perbandingan sementara
 Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.5.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2019-2022

Indikator RPJMD Biro Organisasi	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	77,67	77,82	78,1	77,89
2. Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK) (%)	78,38	75,68	89,19	97,3
3. Nilai Reformasi Birokrasi	68,1	68,47	67,7	73,87
4. Presentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK (%)	90	92	91,89	100
5. Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan (%)	63,04	63,04	82,22	93,33
6. Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	66,38	83,44	81,03	73,28

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.5.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2020-2023

Organisasi Daerah	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekretariat Daerah	1	1	1	1
Jumlah Biro	9	9	9	9
Sekretariat DPRD	1	1	1	1
Dinas Daerah	22	22	22	21
Jumlah Dinas	21	21	21	21
Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1
Badan Daerah	10	10	10	9
Jumlah Badan	9	9	9	9
Inspektorat	1	1	1	1
Sekretariat KORPRI	-	-	-	-
Rumah Sakit Daerah	3	3	3	5
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	72	72	73	74
Jumlah Perangkat Daerah	38	38	37	34

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

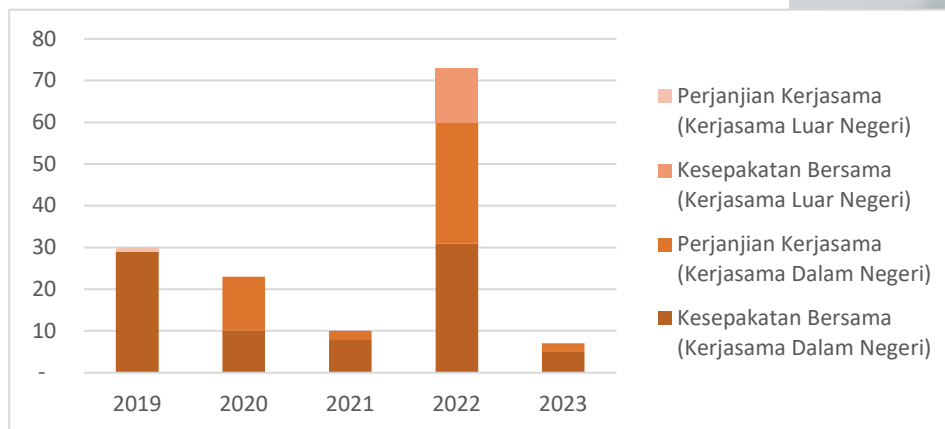
4.6 Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah bertugas untuk memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam beberapa aspek penting. Tugas ini meliputi persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah memiliki sejumlah fungsi yang esensial. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan daerah terkait dengan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam aspek pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berhubungan dengan tugasnya.

Dengan peran dan fungsi yang dimiliki, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah berkontribusi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan, otonomi daerah, serta kerja sama antar daerah. Dalam hal ini, biro ini memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga koordinasi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang dapat mempengaruhi pemerintahan dan otonomi daerah, serta kerja sama di tingkat daerah.

Grafik 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku, 2019-2023



Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah perjanjian kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, terutama untuk perjanjian kerjasama dalam negeri. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah perjanjian kerjasama.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas kerjasama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, cukup dinamis dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah perjanjian kerjasama pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya aktif untuk menjalin kerjasama, namun penurunan pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian.



Tabel 4.6.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Daerah Lain Yang Masih Berlaku, 2017-2023

Nama Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesepakatan Bersama (Kerjasama Dalam Negeri)	65	33	29	10	8	31	5
Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Dalam Negeri)	5	1	-	13	2	29	2
Kesepakatan Bersama (Kerjasama Luar Negeri)	2	1	-	-	-	13	-
Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Luar Negeri)	1	1	1	-	-	-	-

Sumber: Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.6.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2021-2023

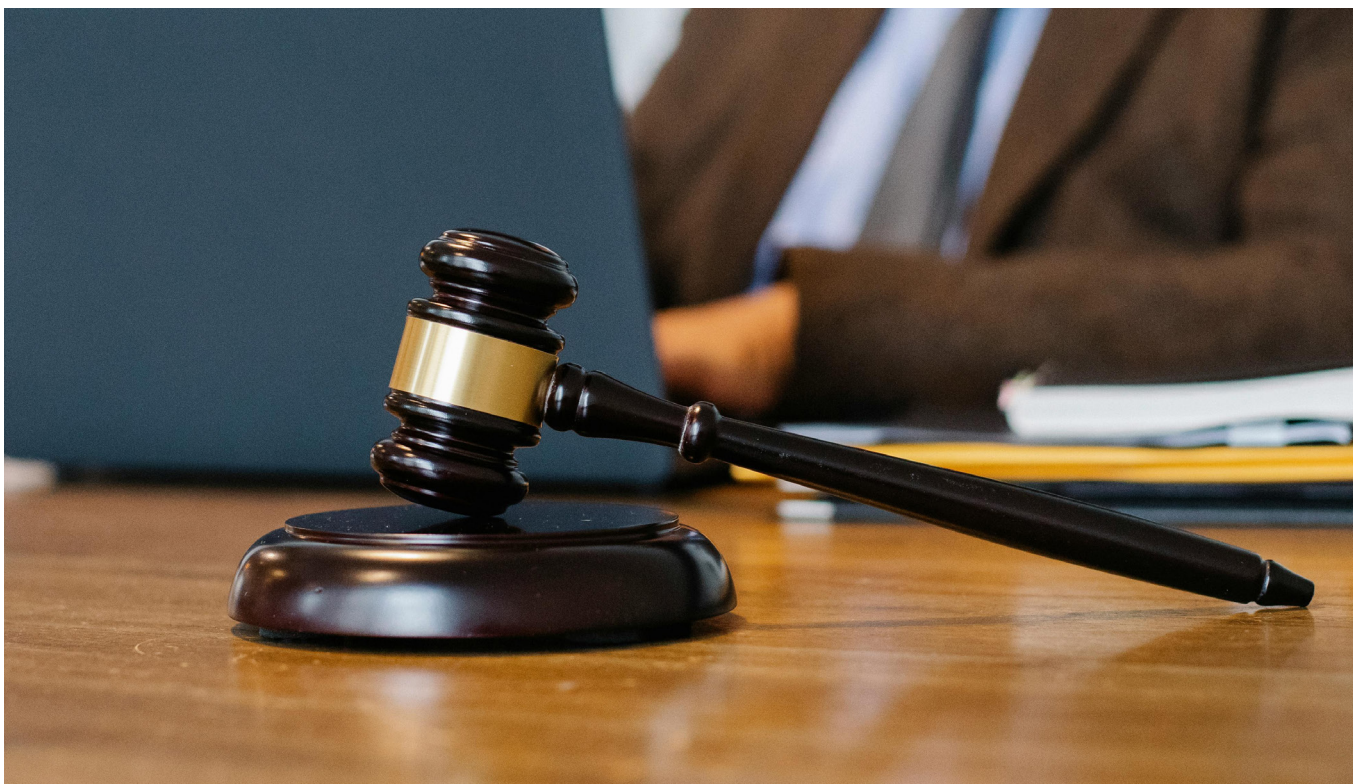
Indikator	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Unsur Nama Rupabumi yang dibakukan (Gazertir Nasional)	485	485	485
Pembentukan Daerah otonomi baru - Pemekaran Kab/Kota	-	-	-
Pembentukan Daerah otonomi baru - Pemekaran Kecamatan	-	-	-
Persentase Batas Administrasi Wilayah yang diselesaikan (%)	76,74	76,74	76,74
Jumlah Penetapan Lokasi dan Pendelegasian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	8	13	10

Sumber: Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

4.7 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Hukum bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas ini mencakup persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum memiliki fungsi yang penting. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan daerah terkait dengan peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam ranah peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi

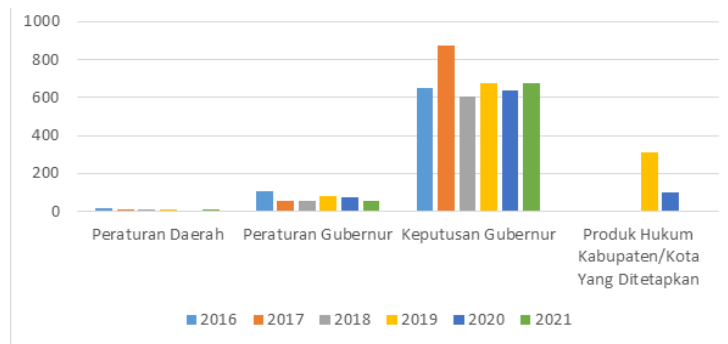


pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Melalui peran dan fungsi ini, Biro Hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan bantuan hukum yang

diperlukan. Biro ini berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mengikuti landasan hukum yang berlaku, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor hukum.

Grafik 4.7.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah produk hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 hingga 2021. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun, Keputusan Gubernur selalu mendominasi. Secara konsisten, jumlah Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari tahun ke tahun selalu diatas 600 keputusan gubernur. Peraturan Daerah selalu menjadi yang paling sedikit, dengan yang terbanyak terjadi pada tahun 2016 dengan 17 peraturan daerah. Sementara itu, jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan menunjukkan tren yang berbeda, dengan lonjakan drastis dari tidak ada data pada tahun 2018 menjadi 311 produk pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 99 produk pada tahun 2020, dan kembali ke nol pada tahun 2021.

Tabel 4.7.1 Daftar Data Prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Prioritas	2022
(1)	(2)
Jumlah Permohonan Perlindungan (Pengaduan)	7
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Korupsi	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Lainnya	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penganiayaan Berat	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penyiksaan	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Perdagangan Orang	-
Jumlah Terlindung Tindak Pidana Terorisme	-
Proposi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	-
Jumlah paten granted (Domestik)	-
Jumlah Permohonan Paten memenuhi syarat administrasi formalin KI Domes	-
Data Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	-
Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi	27

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.7.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022

Klasifikasi Produk Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peraturan Daerah	17	8	11	10	4	8	31
Peraturan Gubernur	109	56	58	78	76	56	29
Keputusan Gubernur	652	875	604	676	637	676	13
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	0	0	0	311	99	-	-

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024

x x x x x x
x x x x x x

x
x
x
x
x
x
x
x



UPAH MINIMUM REGIONAL KALTIM, 2023

3.419.108

naik Rp.192.621 dari tahun sebelumnya

UMK terbesar, Berau
Rp 3.675.887

UMK terkecil, Paser
Rp 3.261.566

BAB V

PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPÉRASÍ DAN MODAL

5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

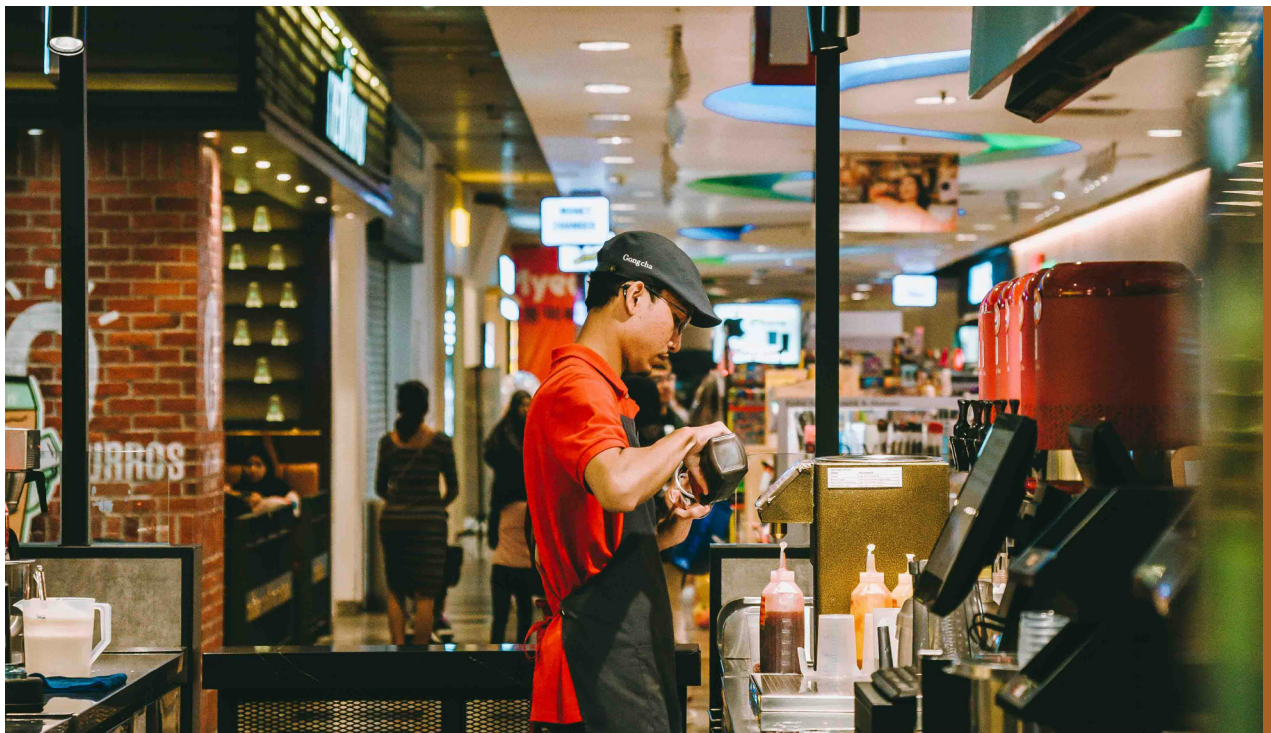


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki tanggung jawab dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi melaksanakan berbagai fungsi penting.

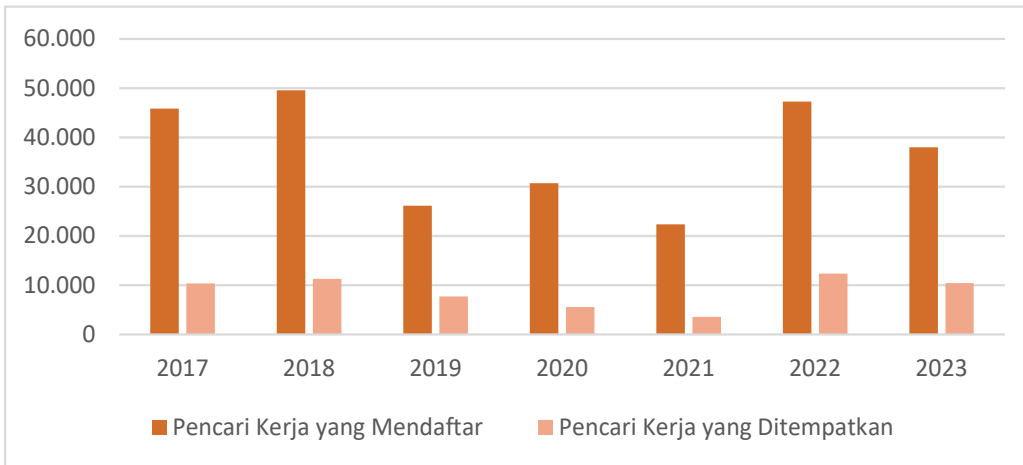
Fungsi-fungsi yang diemban oleh dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Pelayanan umum di sektor tenaga kerja dan transmigrasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas ini.

Dalam upaya mengembangkan tenaga kerja, dinas ini memiliki peran dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja. Pada sisi lain, dinas ini juga turut bertanggung jawab untuk kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja. Terakhir, dinas ini berperan dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi.

Dengan melaksanakan berbagai fungsi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki peran penting dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat provinsi. Dinas ini turut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan daerah, serta memberikan pelayanan yang efektif dalam sektor ini.



Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja yang Mendaftar dan yang Ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-2023



Grafik di atas menggambarkan jumlah pencari kerja yang mendaftar dan yang berhasil ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2017 hingga 2023. Pada umumnya, jumlah pencari kerja yang mendaftar jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai puncaknya, masing-masing sekitar 45.000 dan 50.000 orang, namun yang ditempatkan hanya sekitar 10.000 orang. Setelah itu, terjadi penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar pada 2019 dan 2020, dengan pencari kerja yang ditempatkan juga menurun drastis, terutama pada 2020 yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, meskipun jumlah pencari kerja yang mendaftar sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka penempatan masih berada pada tingkat yang rendah. Namun, pada tahun 2022 jumlah pencari kerja yang mendaftar kembali meningkat menjadi sekitar 45.000 orang, dan penempatan juga naik meski masih jauh lebih rendah dari jumlah pendaftar. Pada tahun 2023, tren sedikit menurun baik dari segi pendaftaran maupun penempatan kerja, tetapi rasio antara pencari kerja yang mendaftar dan yang ditempatkan tetap menunjukkan kesenjangan yang cukup besar, menandakan tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai di wilayah ini.

Tabel 5.1.1 Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2017-2023

Nama Variabel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelayanan Ketenagakerjaan (Unit)	4	4	4	4	4	6	6
Balai Pelatihan Kerja (BLK) (Unit)	2	2	2	2	2	2	2
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) (Unit)	297	297	297	297	139	148	110
Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha (Kasus)	497	602	281	35	230	285	2
Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha (Kasus)	180	271	281	7	94	269	2
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Persen)	36,22	45,02	100,00	57,14	40,87	94,39	-
Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	6	13	15	5	10	-	48
Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan	6.144	6.292	6.292	8.074	10	17.822	33.676
Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan	6.144	6.292	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676
Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (persen)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.2 Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2022-2023

Nama Variabel	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Data Lembaga K3	71	71
Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online	17.822	33.676
Data lembaga pengawasan di Pusat (Direktorat Teknis) dan Daerah (Korwil, Satwasker, UPTD)	7	7
Data Perusahaan yang Disidik	15	3
Jumlah perusahaan yang berperan memperkerjakan penyandang disabilitas	56	-
Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	52	33.676
Data Peserta BPJS ketenagakerjaan	15.026	1.277.354
Jumlah perusahaan yang mendapatkan uji K3	712.176	11.375
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100	100
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	233	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	233	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	233	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	233	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan	233	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15	33.676
Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	115	3
Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	17.822	33.676

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2022-2023

Nama Variabel	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Data Lowongan pekerjaan terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	16.433	15.738
Data Pencari kerja terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	47.254	37.992
Data Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	12.334	10.438
Data Tenaga Kerja Tersertifikasi	973.700	36.739
Data Lembaga Pelatihan Kerja	148	110
Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	90	160
Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	400	216
Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	75	25
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	55,74%	1,99%
Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	95,00%	0,00%
Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	22	12.314
Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	3	1
Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	16.433	15.738
Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	21	10
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi	14	14
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	12.334	10.438

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar			Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	1.957	598	2.555	395	171	566	434	81	515
Kutai Barat	2.270	1.023	3.293	1.152	48	1.200	26	-	26
Kutai Kartanegara	2.310	612	2.922	2.185	312	2.497	1.193	140	1.333
Kutai Timur	3.476	627	4.103	1.587	516	2.103	1.116	35	1.151
Berau	5.035	1.822	6.857	1.570	18	1.588	1.570	18	1.588
Penajam Paser Utara	822	337	1.159	190	125	315	199	53	252
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan	2.858	1.563	4.421	1.378	471	1.849	542	273	815
Kota Samarinda	2.096	2.042	4.138	1.528	1.398	2.926	1.116	1.220	2.336
Kota Bontang	5.497	3.047	8.544	2.201	493	2.694	2.083	339	2.422
Kalimantan Timur	26.321	11.671	37.992	12.186	3.552	15.738	8.279	2.159	10.438

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	-	-	-
Tidak/belum tamat SD	405	76	481
Sekolah Dasar	414	54	468
Sekolah Menengah Pertama	846	240	1.086
Sekolah Menengah Atas (Umum)	11.857	4.685	16.542
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	7.450	2.006	9.456
Diploma I/II/III/Akademi	1.469	1.050	2.519
Universitas	3.880	3.560	7.440
Jumlah	26.321	11.671	37.992

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	UMK/UMP	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	
		Rupiah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	3.261.566,00	199.105,00	6,50
Kutai Barat	3.551.179,00	230.582,00	6,94
Kutai Kartanegara	3.394.513,00	194.858,00	6,09
Kutai Timur	3.356.109,00	180.681,00	5,69
Berau	3.675.887,00	232.820,00	6,76
Penajam Paser Utara	3.561.020,00	191.713,00	5,69
Mahakam Ulu	-	-	-
Kota Balikpapan			-
Kota Samarinda	3.324.273,00	205.876,00	6,60
Kota Bontang	3.329.199,00	191.523,00	6,10
Kalimantan Timur	3.419.108,00	192.621,00	5,97

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.7 Data realisasi pelaksanaan pelatihan pada uptd blki balikpapan provinsi kaltim tahun 2018-2020

Realisasi Pelatihan	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Pendaftar	1.449	1.885	1.855
Jumlah Peserta Pelatihan	720	704	368
Kelulusan Kompeten	659	683	354
Kelulusan Belum Kompeten	45	21	14
Realisasi Penempatan Instansi Pemerintah / Swasta	245	305	76
Realisasi Wirausaha	174	288	112

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2017-2023

Nama Variabel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pencari Kerja yang Mendaftar	45.834	49.552	26.148	30.719	22.358	47.254	37.992
Pencari Kerja yang Ditempatkan	10.365	11.266	7.690	5.538	3.531	12.334	10.438
Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	22,61	22,74	29,41	18,03	15,79	26,1	27,5
Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Laki-Laki	22.133	19.022	26.258	15.658	13.120	23.990	18.042
Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Perempuan	10.746	7.947	9.900	7.161	5.707	10.930	9.512
Jumlah Perusahaan Terdaftar	6.144	6.292	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676
Kasus PHK	525	520	173	28	170	176	356
Orang Terkena PHK	2.264	2.269	1.702	181	2.298	995	1.965
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	2.339.556	2.543.331	2.747.561	-	-	-	-
Upah Minimum Provinsi	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.378	2.981.378	3.014.497	3.201.396
Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabu- upaten/Kota	2.339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.378	2.981.378	3.249.613	3.430.317
Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	6.144	6.292	13.445	13.337	16.713	15.026	18.083
Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	100	100	213,68	165,18	159,34	84,31	53,70
Jumlah Tenaga Kerja	465.895	478.172	478.172	130.462	232.129	343.471	448.719
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	449.465	478.172	830.065	819.665	681.594	686.897	1.277.354
Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	96,47	100	173,59	628,28	293,63	199,99	284,66
Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perusahaan	6.144	6.292	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676
Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	6.144	6.292	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676
Produktivitas Tenaga Kerja	293,86	287,23	274.478.122	287.676,24	281.509.140	289.743.610	291.004.000
Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	270	16	340	-	80	-	-
Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kon- struksi yang terserap oleh pasar kerja	-	-	-	-	-	-	10.462
Jumlah Peserta Pelatihan BLK	240	896	896	672	816	896	1.824
Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	152	594	896	403	450	429	673
Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	63,33	66,29	100	59,97	55,15	47,88	36,90

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2016-2023

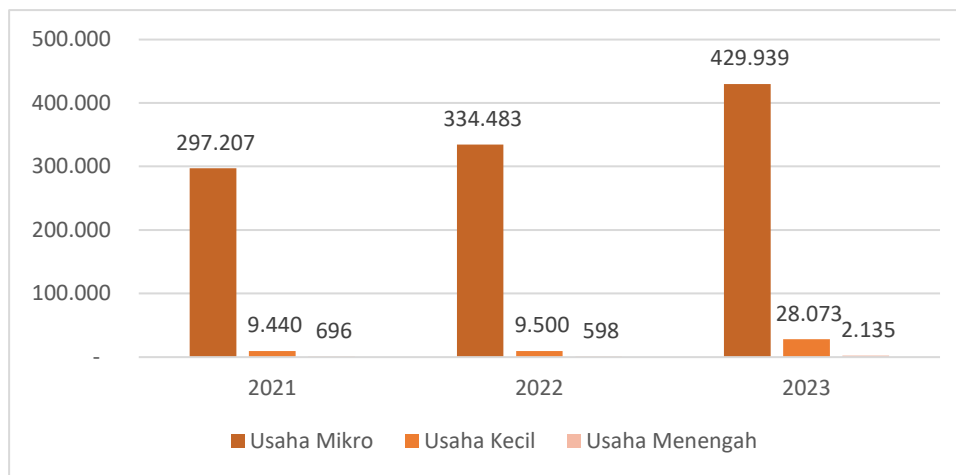
Nama Variabel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Transmigrasi	81.295	40	-	-	15	5	-
Transmigrasi Umum (TU)	71.145	40	-	-	15	5	-
Transmigrasi Swakarsa	10.150	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kawasan Transmigrasi	6	8	-	-	-	3	-
Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	330.369	330.369	-	-	-	-	-
Persentase Transmigrasi Swakarsa	12	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

5.2 Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas ini, dinas ini memegang fungsi penting yang mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor industri, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, dinas ini memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi perkembangan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM di provinsi tersebut, dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan sektor-sektor ekonomi penting.

Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023



Sumber: Dinas Perindagkop UKM

Grafik tersebut menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2023. Usaha Mikro mendominasi sektor UMKM, dengan jumlah yang meningkat setiap tahun, dari 297.207 usaha pada 2021





menjadi 429.939 usaha pada 2023. Usaha Kecil dan Usaha Menengah, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Usaha Mikro, juga menunjukkan pertumbuhan, terutama Usaha Kecil yang naik signifikan dari 9.440 pada 2021 menjadi 28.073 pada 2023. Usaha Menengah tetap relatif kecil, dengan sedikit peningkatan dari 696 pada 2021 menjadi 2.135 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sektor UMKM yang pesat di Kalimantan Timur, terutama di sektor mikro dan kecil.



Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2021-2023

Nama Variabel	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Mikro	297.207	334.483	429.939
Usaha Kecil	9.440	9.500	28.073
Usaha Menengah	696	598	2.135
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Aneka Usaha	1.489.515	1.675.405	...
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Perdagangan	47.200	47.500	...
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Pertanian	-	-	...
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Industri Non Pertanian	-	-	...

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase
(%)	(2)	(3)	(4)
Paser	193	322	59,94%
Kutai Barat	263	768	34,24%
Kutai Kartanegara	502	704	71,31%
Kutai Timur	465	1 154	40,29%
Berau	317	440	72,05%
Penajam Paser Utara	71	270	26,30%
Mahakam Ulu	27	125	21,60%
Kota Balikpapan	440	576	76,39%
Kota Samarinda	300	1 270	23,62%
Kota Bontang	66	82	80,49%
Binaan Provinsi Kalimantan Timur	103	98	105,10%

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah KUD	212	205	206	205	206	207
2. Anggota Koperasi Unit Desa	5.068	5.857	4.276	4.768	3.837	3.216
3. Volume Usaha (Juta Rp)	7.675	24.292	64.718	79.506	12.155	11.538
4. Modal (000.000 Rp.)	16.665	26.524	15.747	58.447	52.714	86.110
5. Sisa Hasil Usaha (000.000 Rp.)	725	1.443	2.157	1.456	3.632	5.774

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, 2016-2020

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapatkan binaan Pemda	76	-	-	-	-
Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	76	30	-	-	-
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.5 Cakupan bina kelompok pengrajin, 2016-2020

Cakupan bina kelompok pengrajin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	-	-	-	50	160
Jumlah Kelompok Pengrajin	-	-	-	452	813

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.6 Data IKM Berorientasi Ekspor, 2016-2021

IKM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah IKM Yang Berorientasi Ekspor	1	15	13	15	-	34

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.7 Data Indikator RPJMD, 2016-2021

IKM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi	-	-	-	13,33	11,76	21,05
Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	-	-	-	1,83	2,17	2,19
Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	4	4	4	4	3	3
Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	-	-	-	27	29	27
Presentase peningkatan jumlah customer yang dilayani	-	-	-	19	16	17,8
Persentase Sumbangan Koperasi terhadap PDRB	-	-	-	4,5	4,5	1,7

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.8 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2017-2023

Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koperasi Primer	5.169	5.394	5.493	5.598	5.724	5.790	6.186
Koperasi Sekunder	15	12	21	21	21	21	17

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2021-2023

Jenis Usaha Koperasi	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koperasi Produsen	1.322	1.374	1.492	Unit
Koperasi Konsumen	3.780	3.815	3.890	Unit
Koperasi Jasa	393	433	507	Unit
Koperasi Pemasaran	11	32	146	Unit
Koperasi Simpan Pinjam	151	155	162	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.10 Data Koperasi, 2021-2023

Koperasi	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Koperasi Aktif	2.844	2.885	2.995	Unit
Jumlah Koperasi Pasif	2.832	2.924	3.202	Unit
Jumlah anggota koperasi Laki-laki	68.580	72.858	116.765	Orang
Jumlah anggota koperasi Perempuan	20.885	22.024	48.186	Orang
Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	457	446	646	Unit
Volume Usaha Koperasi	1.123.689	1.297.616	2.338.678	Rp. Juta
Jumlah KUD	205	206	206	Unit
Jumlah non KUD	5.540	5.686	5.991	Unit
Jumlah Koperasi Berkualitas	9	13	10	Unit
Persentase Koperasi Aktif	50,11	49,66	48,33	%
Jumlah Koperasi Sehat	457	446	646	Koperasi

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.11 Data Potensi Industri, 2021-2023

Potensi Industri	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Industri Besar	274	344	155	Unit
Jumlah Industri Kecil Menengah	16.148	15.369	18.100	Unit
Penyerapan Tenaga Kerja	33.289	31.493	34.740	Orang
Nilai Investasi	1.316.248	1.269.668	1.332.587	Rp Ribu
Jumlah Industri Inti Pengolahan Khas Daerah	-	-	-	Industri
Volume Usaha Kawasan Industri	-	-	-	Industri
Kontribusi Olahan Non Migas Terhadap PDRB	7,79	6,84	8,94	%

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.12 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Jenis Usaha UKM	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1). Aneka Usaha	124.280	215.026	256.286	Unit
2). Perdagangan	169.142	195.704	195.704	Unit
3). Industri Pertanian	13.921	8.157	8.157	Unit
Jumlah UKM Naik Kelas	9	13	300	UKM

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.13 Jumlah koperasi menurut prinsip keuangan, 2021-2023

Jenis Koperasi	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koperasi Konvensional	139	143	111	Unit
Koperasi Syariah	12	12	51	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.14 Data Jumlah Pasar, 2018-2023

Jenis Pasar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasar Tradisional	264	307	346	403	404	403
Pasar Modern	362	184	214	456	456	240

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.15 Jumlah Wirausaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Variabel	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
Jumlah Wirausaha Baru	75	1217	246
Jumlah WUB Mandiri	80	45	102

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam menjalankan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas ini, dinas ini memiliki beberapa fungsi penting.

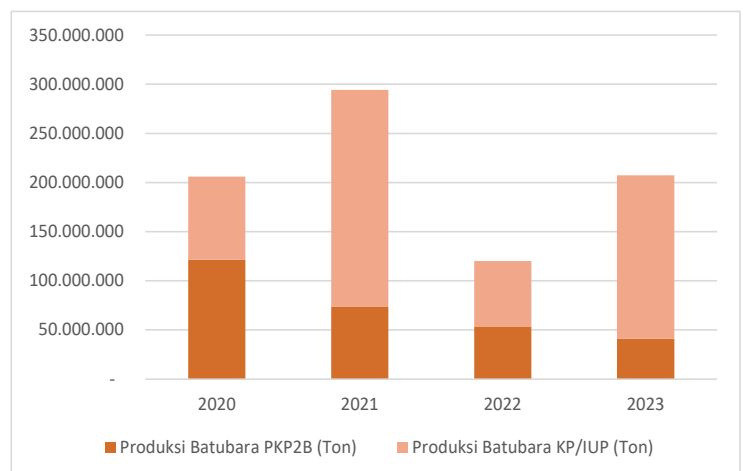
Fungsi-fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dinas ini memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Fokusnya mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi.



Selain tugas-tugas utama tersebut, dinas juga melaksanakan urusan kesekretariatan, membina kelompok jabatan fungsional, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran krusial dalam mengelola sumber daya energi dan mineral, serta mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Grafik 5.3.1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023



Grafik di atas menggambarkan produksi batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan jenis perusahaan, yaitu PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KP/IUP (Izin Usaha Pertambangan). Pada tahun 2020, total produksi batubara mencapai sekitar 206 juta ton, dengan kontribusi 121,4 juta ton dari PKP2B dan 84,5 juta ton dari KP/IUP. Produksi dari kedua jenis perusahaan cukup seimbang, dengan PKP2B sedikit lebih dominan dibandingkan KP/IUP.

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan produksi yang signifikan, terutama dari perusahaan KP/IUP, yang mencapai 220,3 juta ton, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi PKP2B menurun menjadi 73,9 juta ton, sehingga total produksi batubara pada tahun 2021 meningkat pesat hingga sekitar 294 juta ton. Peningkatan drastis ini kemungkinan besar didorong oleh tingginya permintaan batubara global dan kenaikan harga komoditas.

Namun, pada tahun 2022, produksi batubara menurun drastis, dengan total produksi sekitar 120 juta ton. Produksi PKP2B turun menjadi 53,6 juta ton, dan KP/IUP turun tajam ke 66,3 juta ton. Pada tahun 2023, produksi kembali meningkat dengan total 207 juta ton, didorong oleh peningkatan produksi dari KP/IUP sebesar 166,4 juta ton, sementara produksi dari PKP2B terus menurun menjadi 41 juta ton. Fluktuasi produksi ini menunjukkan dinamika industri pertambangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi pasar global dan kebijakan nasional.



Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2023

Nama Variabel	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produksi Minyak Bumi (Barel)	19.926.846	17.742.360	16.697.671	18.312.385
Produksi Gas Alam (MMBTU)	203.955.180	172.829.530	163.134.528	175.079.218
Produksi Batubara PKP2B (Ton)	121.447.164	73.959.294	4.653.620.138	41015029
Produksi Batubara KP/IUP (Ton)	84.583.159	220.293.507	66.392.239	166.428.573
Total Produksi Batubara (PKP-2B+KP/IUP) (Ton)	206.030.323	294.252.802	120.012.377	207.443.602
Jumlah Perusahaan Batubara (Izin)	1.403	1.403	1.403	1.403
Persentase Area Yang Direhabilitasi Dari Lahan Terganggu (Persen)	47,65	47,65	39,00	39,00
Reklamasi Batubara (Ha)	3.543,57	3.543,57	10.869,00	10.869,00
Luas Penambangan Liar Yang Diterbitkan (Ha)	1,02	2	75,5	75
Luas Area Penambangan Yang Liar (Ha)	2,25	10	75,5	75

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.2 Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023

Tahun	Minyak Bumi (ribu barrel)	Gas Bumi (ribu MMBTU)
(1)	(2)	(3)
2019	21.038,83	231.067,41
2020	19.926,85	203.955,18
2021	17.742,36	172.829,53
2022	16.697,67	163.134,53
2023	13.402,04	131.097,16

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.3 Produksi dan Pemasaran Batubara di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021-2023

Tahun	Produksi	Pemasaran Domestik
(1)	(2)	(3)
2021	292.952.261,02	100.675.779,59
2022	305.481.285,92	104.770.634,55
2023	338.502.871,54	156.342.615,97

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.4 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2023

Kabupaten/Kota	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
(1)	(2)	(3)
Paser	100,00	91,08
Kutai Barat	100,00	92,21
Kutai Kartanegara	100,00	89,43
Kutai Timur	100,00	88,63
Berau	100,00	90,01
Penajam Paser Utara	100,00	92,03
Mahakam Ulu	100,00	89,01
Kota Balikpapan	100,00	98,67
Kota Samarinda	100,00	100,00
Kota Bontang	100,00	94,04
Kalimantan Timur	100,00	101,52

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2017-2023

Tahun	Pertambangan dan Penggalian	Batubara	Minyak dan Gas	Batuan Mineral Bukan Logam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	4.163.689.872,00	4.153.297.886,00	9.571.843,00	820.143,35
2018	4.163.689.872,00	4.153.297.886,00	9.571.843,00	820.143,35
2019	4.163.689.872,00	4.153.297.886,00	9.571.843,00	820.143,35
2020	4.161.728.667,00	4.153.297.886,00	7.610.638,00	820.143,35
2021	4.160.249,20	4.153.297,89	6.131.173,81	820.143,35
2022	4.160.249,20	4.153.297,89	6.131.173,81	820.143,35
2023	4.160.249,20	4.153.297,89	741.506,40	1.440.694,81

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

× × × × × ×
× × × × × ×

PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024



× × × × × × × × × × × × × × × ×

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

KALTIM, 2023

**TERTINGGI DARI
PBBKB**

“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor”

Rp5.547.986.188.284

BAB VI

**EKONOMI DAN
KEUANGAN**

“
Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, peningkatan penerimaan pajak tersebut adalah sebanyak Rp 743.586.372.061
”

6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Bappeda bertugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

Tabel 6.1.1 Data Topografi Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Datar (0-2 Derajat)	1.341.015	1.341.015	1.341.015	1.341.015	1.341.015	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Bergelombang (2-15 Derajat)	2.025.952	2.025.952	2.025.952	2.025.952	2.025.952	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Curam (15-40 Derajat)	3.733.152	3.733.152	3.733.152	3.733.152	3.733.152	Ha
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng - Sangat Curam (>40 Derajat)	5.433.568	5.433.568	5.433.568	5.433.568	5.433.568	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (0 - 7 M)	515.655	515.655	515.655	515.655	515.655	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (7 - 25 M)	2.224.402	2.224.402	2.224.402	2.224.402	2.224.402	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (25 - 100 M)	2.974.648	2.974.648	2.974.648	2.974.648	2.974.648	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (100 - 500 M)	2.988.550	2.988.550	2.988.550	2.988.550	2.988.550	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (500 - 1000 M)	1.806.001	1.806.001	1.806.001	1.806.001	1.806.001	Ha
Ketinggian di atas Permukaan Laut (> 1000 M)	585.251	585.251	585.251	585.251	585.251	Ha

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2023

Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas Wilayah	12734692	12734692	12734692	Ha
- Luas Daratan	12638893	12638893	12638893	Ha
- Luas Perairan Laut	95799	95799	95799	Ha
Luas Pengelolaan Laut	3.997.373,71	3.997.373,72	3.997.373,72	Ha
Jarak				
- Paser	285	285	285	Km
- Kutai Barat	326	326	326	Km
- Kutai Kartanegara	30.2	30.2	30.2	Km
- Kutai Timur	162	162	162	Km
- Berau	523	523	523	Km
- Penajam Paser Utara	129	129	129	Km
- Mahakam Ulu	477	477	477	Km
- Balikpapan	115	115	115	Km
- Samarinda	-	-	-	Km
- Bontang	120	120	120	Km

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meliputi perumusan kebijakan teknis dalam bidang keuangan dan aset sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah, perencanaan, pengendalian, dan pembinaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pengelolaan barang milik daerah. BPKAD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini, termasuk evaluasi, pelaporan, dan administrasi sesuai dengan tugasnya. Selain itu, BPKAD juga menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berhubungan dengan tugasnya.



Tabel 6.2.1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Uraian	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)
BELANJA		
- Anggaran	15.083.936.645.080,00	Rupiah
- Realisasi	13.341.379.653.135,50	Rupiah
BELANJA OPERASI		
- Anggaran	8.989.736.100.729,00	Rupiah
- Realisasi	8.267.456.401.388,47	Rupiah
1) Belanja Pegawai		
- Anggaran	2.782.652.586.545,00	Rupiah
- Realisasi	2.591.408.921.533,39	Rupiah
2) Belanja Barang dan Jasa		
- Anggaran	5.505.554.772.532,00	Rupiah
- Realisasi	4.984.412.314.089,08	Rupiah
3) Belanja Bunga		
- Anggaran	-	Rupiah
- Realisasi	-	Rupiah
4) Belanja Hibah		
- Anggaran	686.904.541.652,00	Rupiah
- Realisasi	679.755.765.766,00	Rupiah
5) Belanja Bantuan Sosial		
- Anggaran	14.624.200.000,00	Rupiah
- Realisasi	11.879.400.000,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.2 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Uraian	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)
BELANJA MODAL		
- Anggaran	5.714.129.717.036,00	Rupiah
- Realisasi	5.023.482.572.688,10	Rupiah
1) Belanja Modal Tanah		
- Anggaran	333.882.542.350,00	Rupiah
- Realisasi	215.875.863.662,00	Rupiah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Anggaran	1.864.505.816.268,00	Rupiah
- Realisasi	1.654.102.228.122,99	Rupiah
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Anggaran	1.408.765.872.697,00	Rupiah
- Realisasi	1.190.193.772.115,23	Rupiah
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
- Anggaran	2.056.356.260.494,00	Rupiah
- Realisasi	1.914.791.835.103,88	Rupiah
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Anggaran	36.068.397.569,00	Rupiah
- Realisasi	35.239.074.009,00	Rupiah
BELANJA TAK TERDUGA		
- Anggaran	380.070.827.315,00	Rupiah
- Realisasi	50.440.679.059,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.3 Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan TA 2021 – 2023

No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kantor Setda	1	1	1	Unit
2	Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	Unit
3	Kantor Inspektorat	1	1	1	Unit
4	Kantor Bappeda	2	2	2	Unit
5	Kantor Dinas Daerah	259	259	259	Unit
6	Kantor Lembaga Teknis Daerah	59	59	59	Unit

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.4 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2021–2023

No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TRANSFER				
	- Anggaran	4.223.127.564.000,00	4.425.132.930.123,00	6.565.572.578.000,00	Rupiah
	- Realisasi	4.004.504.531.510,70	4.405.266.678.744,00	6.383.580.062.346,00	Rupiah
2	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
	- Anggaran	2.514.486.064.000,00	3.562.287.930.123,00	5.368.072.578.000,00	Rupiah
	- Realisasi	2.455.934.232.318,00	3.542.721.678.744,00	5.186.080.062.346,00	Rupiah
	1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
	- Anggaran	2.514.486.064.000,00	3.562.287.930.123,00	5.368.072.578.000,00	Rupiah
	- Realisasi	2.455.934.232.318,00	3.542.721.678.744,00	5.186.080.062.346,00	Rupiah
3	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
	- Anggaran	1.708.641.500.000,00	862.845.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.548.570.299.192,70	862.545.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
	- Anggaran	1.708.641.500.000,00	862.845.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.548.570.299.192,70	862.545.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah

Lanjutan Tabel 6.2.4

No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
	- Anggaran	2.514.486.064.000,00	3.562.287.930.123,00	5.368.072.578.000,00	Rupiah
	- Realisasi	2.455.934.232.318,00	3.542.721.678.744,00	5.186.080.062.346,00	Rupiah
3	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
	- Anggaran	1.708.641.500.000,00	862.845.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.548.570.299.192,70	862.545.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
	- Anggaran	1.708.641.500.000,00	862.845.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.548.570.299.192,70	862.545.000.000,00	1.197.500.000.000,00	Rupiah
	2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
	- Anggaran	-	-	-	Rupiah
	- Realisasi	-	5.000.000.000,00	-	Rupiah
4	SURPLUS / (DEFISIT)				
	- Anggaran	-2.670.835.448.059,00	-2.210.336.579.974,00	-	Rupiah
	- Realisasi	503.386.455.157,08	4.410.947.942.645,05	-	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.5 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2023

No	Daftar Data	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PENDAPATAN		
	- Anggaran	16.698.658.531.767,00	Rupiah
	- Realisasi	17.750.987.305.165,40	Rupiah
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	- Anggaran	9.245.938.798.846,00	Rupiah
	- Realisasi	10.334.805.509.404,40	Rupiah
	1) Pendapatan Pajak Daerah		
	- Anggaran	7.739.500.000.000,00	Rupiah
	- Realisasi	8.698.162.558.337,21	Rupiah
	2) Pendapatan Retribusi Daerah		
	- Anggaran	17.841.036.601,00	Rupiah
	- Realisasi	68.105.206.997,87	Rupiah
	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	- Anggaran	249.738.927.883,00	Rupiah
	- Realisasi	260.236.357.306,17	Rupiah
	4) Lain-lain PAD Yang Sah		
	- Anggaran	1.238.858.834.362,00	Rupiah
	- Realisasi	1.308.301.386.763,19	Rupiah
3	PENDAPATAN TRANSFER		
	- Anggaran	9.369.706.572.921,00	Rupiah
	- Realisasi	7.006.932.857.919,00	Rupiah
	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	- Anggaran	9.369.706.572.921,00	Rupiah
	- Realisasi	7.006.932.857.919,00	Rupiah
	2) Bagi Hasil Pajak		
	- Anggaran	738.724.434.803,00	Rupiah
	- Realisasi	617.664.475.231,00	Rupiah
	3) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		
	- Anggaran	7.090.453.696.118,00	Rupiah
	- Realisasi	4.869.311.926.499,00	Rupiah

No	Daftar Data	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	- Anggaran	857.919.020.000,00	Rupiah
	- Realisasi	857.319.948.081,00	Rupiah
	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- Anggaran	682.609.422.000,00	Rupiah
	- Realisasi	662.636.508.108,00	Rupiah
	6) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
	- Anggaran	-	Rupiah
	- Realisasi	-	Rupiah
	7) Dana Penyesuaian (DID)		
	- Anggaran	-	Rupiah
	- Realisasi	-	Rupiah
	8) Bantuan Keuangan		
	- Anggaran	-	Rupiah
	- Realisasi	-	Rupiah
	9) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		
	- Anggaran	-	Rupiah
	- Realisasi	-	Rupiah
	10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		
	- Anggaran	-	Rupiah
	- Realisasi	-	Rupiah
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
	- Anggaran	83.013.160.000,00	Rupiah
	- Realisasi	409.248.937.842,00	Rupiah
	1) Pendapatan Hibah		
	- Anggaran	13.858.680.000,00	Rupiah
	- Realisasi	21.055.277.000,00	Rupiah
	2) Pendapatan Lainnya		
	- Anggaran	69.154.480.000,00	Rupiah
	- Realisasi	388.193.660.842,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.5 Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana Pemerintahan Milik Sendiri Sewa Pinjam Gabung Tahun 2021–2023

Status Kepemilikan Gedung Sarana Prasarana	2021	2022	2023	Satuan
Pemerintahan	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Setda	1	1	1	Unit
1) Milik Sendiri	1	1	1	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	0	0	0	Unit
Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	Unit
1) Milik Sendiri	3	3	3	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	0	0	0	Unit
Kantor Inspektorat	1	1	1	Unit
1) Milik Sendiri	0	0	0	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	1	1	1	Unit
Kantor Bappeda	2	2	2	Unit
1) Milik Sendiri	2	2	2	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	0	0	0	Unit
Kantor Dinas	259	259	259	Unit
1) Milik Sendiri	259	259	259	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	0	0	0	Unit
Kantor Lembaga Teknis Daerah	57	57	57	Unit
1) Milik Sendiri	57	57	57	Unit
2) Sewa	0	0	0	Unit
3) Pinjam	0	0	0	Unit
4) Gabung	0	0	0	Unit

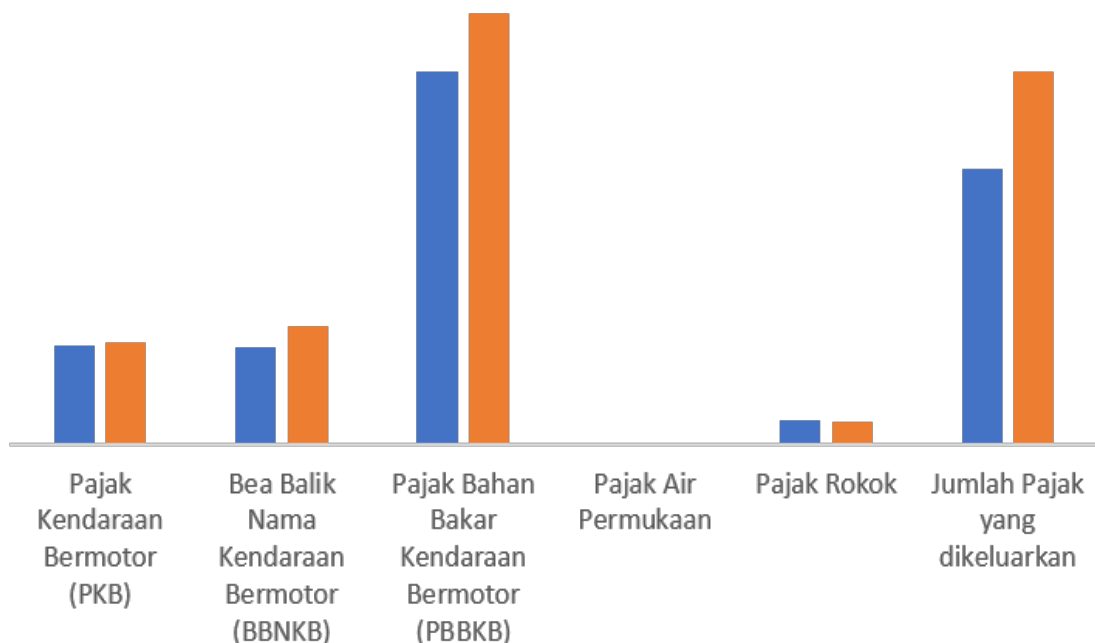
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.3 Badan Pendapatan Daerah

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) merupakan badan yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, Bapenda memiliki 5 fungsi yaitu: (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, (2) Pelaksanaan Pelayanan umum lintas kabupaten/kota, (3) Pembinaan Teknis di bidang Pendapatan, (4) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dan (5) Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 kecuali untuk kategori pajak rokok. Realisasi pajak rokok menurun dari tahun 2022 ke 2023 dari sebesar Rp 232.066.000.000 menjadi Rp 4.806.911.873.431.

Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023



Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023 (rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp1.007.720.000.000	Rp1.271.895.140.197	Rp1.314.476.696.918
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp905.585.000.000	Rp1.240.322.341.882	Rp1.525.008.136.195
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp2.618.620.000.000	Rp4.804.399.816.223	Rp5.547.986.188.284
Pajak Air Permukaan	Rp10.897.465.989	Rp9.543.685.938	Rp12.752.795.512
Pajak Rokok	Rp232.066.000.000	Rp297.436.495.255	Rp294.935.704.900
Jumlah Pajak yang dikeluarkan	Rp2.487.210.000.000	Rp3.542.721.678.744	Rp4.806.911.873.431

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Wilayah	Sedan	Jeep	Minibus	Mikrobus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	195	1.011	9.980	224
Kutai Barat	48	645	6.966	95
Kutai Kartanegara	631	2.324	28.570	450
Kutai Timur	271	1.743	18.302	340
Berau	140	856	10.106	199
Penajam Paser Utara	70	412	4.956	138
Balikpapan	6.555	9.400	77.708	1.411
Samarinda	3.771	10.023	72.487	1.217
Bontang	1.517	2.068	17.303	383
Kalimantan Timur	13.198	28.482	246.378	4.457

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 6.3.2.

Wilayah	Bus	Pickup	Truck	Sepeda Motor	Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	58	7.600	3.190	163.997	186255
Kutai Barat	40	4.806	1.705	102.442	116747
Kutai Kartanegara	90	17.997	6.805	432.647	489514
Kutai Timur	164	10.760	5.601	183.510	220691
Berau	268	7.010	2.698	138.415	159816
Penajam Paser Utara	11	3.746	2.317	82.998	94654
Balikpapan	519	36.573	13.332	497.731	643235
Samarinda	341	33.860	16.565	674.960	813228
Bontang	174	5.084	2.040	120.662	149365
Kalimantan Timur	1.665	127.436	54.253	2.397.362	2873505

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Alokasi Umum	Rp 828.050.174.361	Rp 824.108.986.889	Rp 857.319.948.081
a. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan	20,22%	10,58%	12,24%
b. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah	8,10%	4,90%	4,77%
c. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD	12,32%	6,66%	4,35%
d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	-0,40%	-0,48%	4,03%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Alokasi Khusus	Rp636.847.322.230	Rp599.563.058.143	Rp662.636.508.108
a. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan	15,55%	7,70%	9,46%
b. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah	6,23%	3,57%	3,69%
c. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total Belanja APBD	9,48%	4,85%	3,36%
d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	66,07%	-5,85%	10,52%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.5 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022-2023 (rupiah)

Indikator	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
retribusi jasa umum	5.718.620.000	5.926.654.000
retribusi jasa usaha	13.814.974.916	55.647.795.503
retribusi perizinan tertentu	447.295.000	460.037.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.6 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Jenis Pendapatan Transfer	2021	
	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dana Alokasi Khusus	682.609.422.000	662.636.508.108
Jumlah Dana Alokasi Umum	857.919.020.000	857.319.948.081
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	738.732.369.374	617.664.280.231
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.090.445.761.547	4.869.311.926.499
Jumlah Dana Perimbangan	9.369.706.572.921	7.006.932.662.919

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.7 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022-2023

Variabel	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp3.542.721.678.744	Rp4.806.911.873.431
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain lain pendapatan daerah yang sah	206,61	53,30
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah	21,08%	26,73%
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD	28,64%	24,37%
Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	42,44%	35,68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.4 Biro Perekonomian Setda

Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Biro Perekonomian merupakan unsur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kepala Biro, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tabel 6.4.1 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019-2021 Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Samarinda	58.110	57.425	57.425
Balikpapan	41.345	37.756	37.756
Bontang	15.029	14.491	14.491
Kutai Kartanegara	84.587	81.557	81.557
Kutai Timur	37.231	39.518	39.518
Kutai Barat	32.810	31.122	31.122
Mahakam Ulu	9.309	8.859	8.859
Penajam Paser Utara	10.357	9.993	9.993
Paser	9.945	9.962	9.962
Berau	31.425	31.563	31.563
Kalimantan Timur	330.148	322.246	322.246

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Nama BUMD	Dasar Hukum	Bidang Usaha	Kinerja BUMD
(1)	(2)	(3)	(4)
PT. BPD Kaltimara	Perda No. 8/2016 Akta Notaris Noor Samsir,SH No.12 tanggal 14 September 2017	Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan)	Sehat
PD. Melati Bhakti Satya	Perda No.18/2008 Pergub No. 87/2016	Aneka Usaha	Sehat
PD. Bara Kaltim Sejahtera	Perda No. 04/2000 tanggal 31 Agustus 2000	Pertambangan	Sehat
PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur	Keputusan Menkumham RI Nomor AHU.0044438 AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 2017	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Usaha Penunjang Tenaga Listrik	Sedang dalam pengawasan
PD. Sylva Kaltim Sejahtera	Perda Nomor 5/2000	Kehutanan	Sedang dalam pengawasan
PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur	Perda Nomor 11/2009	Minyak dan Gas Bumi	Sehat
PT. Jamkrida Kaltim		Penjaminan Kredit Daerah	Sehat
PT Agro Kaltim Utama	Perda No.12/2009	Perkebunan	Sudah tidak beroperasi

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

6.5 Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Variabel	Tahun			satuan
	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	3	1	10	Perangkat Daerah
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	WTP	WTP	WTP	Opini
Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	90	80	100	%
Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	68	35	35	Orang
Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	92	86,9	92,01	%
Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	68,31	52,86	70,87	Skor
Skor Rata-rata hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota	65	70	62,85	Skor
Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi	65	70		%
Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	100	98	100	%
Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	100	98	100	%
Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	67,55	3,226	3,034	Skor
Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu	100	95	90	%
Indeks Persepsi Korupsi	67,55	73,04	72,71	Skor
Kasus KKN	1	3	5	Kasus

Sumber: Inspektorat Kaltim

Tabel 6.5.2 Data Pengawasan (Usulan Data Baru) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Daftar Data	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya	23	32	30
Jumlah Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	5	4	4

Sumber: Inspektorat Kaltim

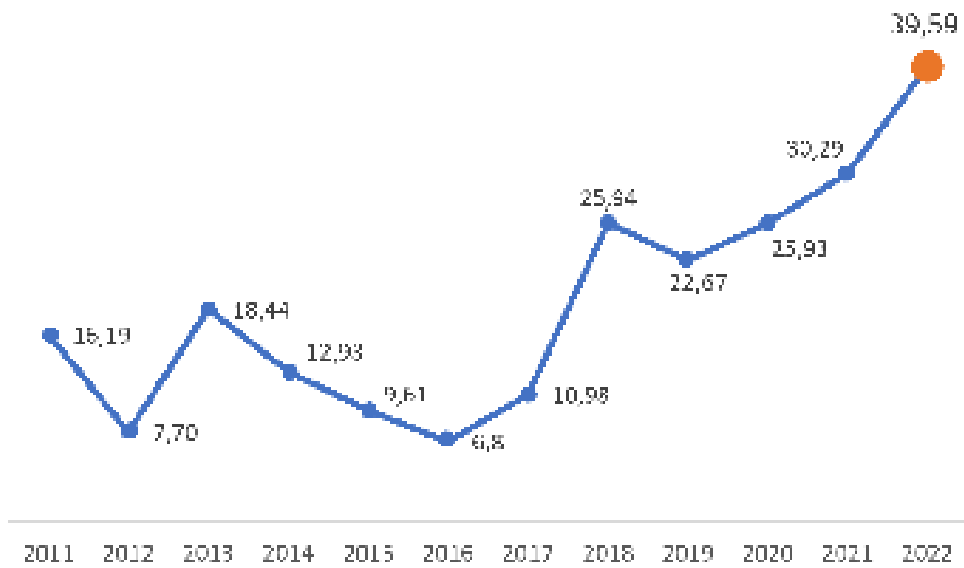
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu yang meliputi perizinan dan non perizinan. Sebagai lembaga penyelenggara PTSP, DPMPTSP berperan dalam memfasilitasi proses investasi dan usaha dengan mengintegrasikan pelayanan dari berbagai instansi terkait, mematuhi peraturan terkait pelayanan terpadu, serta berkoordinasi dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi dari tahun 2011-2019, namun jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Visualisasi realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2022 dapat dilihat pada diagram garis berikut:



Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PDMN Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022



Tabel 6.6.1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Sektor Usaha	Total
(1)	(2)
Kelautan dan Perikanan	394
Pertanian	13
Lingkungan Hidup	34
Kehutanan	75
Energi dan Sumber Daya Mineral	113
Ketenaganukliran	0
Perindustrian	0
Perdagangan	0
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0
Transportasi (Perhubungan)	178
Kesehatan	3
Pendidikan dan Kebudayaan	4
Pariwisata	0
Keagamaan	0
Ketenagakerjaan	0
Pertahanan dan Keamanan	0
Komunikasi dan Informatika	0
Sosial	9
Total	823

Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER/PRIMARY SECTOR				
1. Tanaman Pangan, Perkebunan dan				
Peternakan/				
Food Crops, Plantation Crops and Livestock	403	3.650.817,60	11,491	2
2. Kehutanan/Forestry	119	346.853,60	669	
3. Perikanan/Fishing	8	2,00		
4. Pertambangan/Mining	563	15.012.379,10	16,310	17
II. SEKTOR SEKUNDER/ SECONDARY SECTOR				
1. Industri Makanan/Manufacture of Food Products				
	226	2.390.781,50	3,427	2
2. Industri Tekstil/Manufacture of Textiles				
	2	431,00	4	
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products, and Footwear				
4. Industri Kayu/Manufacture of Wood Products				
	49	24.001,70	20	
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan/ Manufacture of Paper and Printing				
	5	500,00	8	
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals Products				
	95	14.914.625,40	252	11
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber and Plastics Products				
	5	7.209,00		
8. Industri Mineral Non Logam/ Manufacture of Non-Metallic Mineral				
	25	18.184,90	69	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 6.6.2

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik/ Manufacture of Metal, Machinery and Electronics	20	521.796,50	24	1
10. Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam/ Manufacture of Medical, Precision, Optical and Clock Instruments	28	4.381,50	30	1
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya/ Manufactured of Motorized Vehicle and Other Transportation Equipment	51	21.487,30	103	
12. Industri Lainnya/Other Manufacturing	46	48.889,00	250	
III. SEKTOR TERSIER/TERTIARY SECTOR				
1. Listrik, Gas dan Air /Electricity, Gas and Water	57	165.780,50	20	
2. Konstruksi/Construction	818	55.394,60	539	
3. Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	2,361	687.631,40	1,914	4
4. Hotel dan Restoran / Hotel and Restaurant	379	199.549,50	719	
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/ Transportation, Storage, and Communication	453	573.564,20	950	
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Housing, Industrial Estate & Office Buildings	133	286.654,80	19	
7. Jasa Lainnya/Other Services Activities	860	664.717,90	2,935	1
Jumlah/ Total	6,706	39.595.633,00	39,753	39

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Paser	281	1.616.947,70	2,184	5
2. Kutai Barat	158	2.631.773,80	1,900	
3. Kutai Kartanegara	729	10.564.907,70	7,725	7
4. Kutai Timur	665	3.428.929,90	13,379	7
5. Berau	408	2.619.004,00	4,653	4
6. Penajam Paser Utara	221	1.253.095,90	846	11
7. Mahakam Ulu	18	284.958,90	329	
Kota/Municipality				
1. Balikpapan	1,850	14.681.981,50	3,073	3
2. Samarinda	1,845	1.270.879,50	4,946	2
3. Bontang	531	1.243.154,10	718	
Kalimantan Timur	6,706	39.595.633,00	39,753	39

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011-2022

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi		Tenaga Kerja	
		(Ribu US \$)		Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2011	172	1.348.060,81	9.001	24	
2012	167	2.529.900,00	35.579	398	
2013	351	1.385.409,00	70.446	561	
2014	297	2.145.665,10	27.055	110	
2015	420	2.381.442,30	66.23	442	
2016	471	1.181.859,20	22.204	350	
2017	566	1.285.215,20	15.508	153	
2018	513	587.501,60	12.5	68	
2019	903	863.099,40	15.166	100	
2020	778	378.027,20	5.868	92	
2021	1,034	745.190,20	5.65	140	
2022	1,005	1.266.221,77	16.247	384	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Ribu US \$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER/PRIMARY SECTOR				
1. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan/ Food Crops, Plantation Crops and Livestock				
	173	190.013,89	8.379	34
2. Kehutanan/Forestry				
	23	37.276,49	88	
3. Perikanan/Fishing				
4. Pertambangan/Mining				
	151	515.919,94	4,3	45
II. SEKTOR SEKUNDER/ SECONDARY SECTOR				
1. Industri Makanan/Manufacture of Food Products				
	133	96.106,59	1.054	6
2. Industri Tekstil/Manufacture of Textiles				
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products, and Footwear				
4. Industri Kayu/Manufacture of Wood Products				
	9	1.811,90	115	3
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan/ Manufacture of Paper and Printing				
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals Products				
	29	60.176,59	29	
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber and Plastics Products				
	8	136,4	4	
8. Industri Mineral Non Logam/Manufacture of Non-Metallic Mineral				
	6	216.016,28	739	255
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik/ Manufacture of Metal, Machinery and Electronics				
	30	93.934,69	416	30
10. Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam/ Manufacture of Medical, Precision, Optical and Clock Instruments				
	14	1.967,50	353	2
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya/ Manufactured of Motorized Vehicle and Other Transportation Equipment				
	10	10.091,60	24	
12. Industri Lainnya/Other Manufacturing				
	3			

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 6.6.5

Bidang Usaha (1)	Jumlah Proyek (2)	Realisasi Investasi (Ribu US \$) (3)	Tenaga Kerja	
			Indonesia (4)	Asing (5)
III. SEKTOR TERSIER/TERTIARY SECTOR				
1. Listrik, Gas dan Air /Electricity, Gas and Water	6			
2. Konstruksi/Construction	4			
3. Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	201	9.497,50	119	
4. Hotel dan Restoran / Hotel and Restaurant	56	3.682,30	63	
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transportation, Storage, and Communication	57	16.726,70	205	9
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Housing, Industrial Estate & Office Buildings	22	6.288,90	40	
7. Jasa Lainnya/Other Services Activities	70	6.574,50	319	
Jumlah/ Total	1.005	\$1.266.221,77	16.247	384

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Bidang Usaha (1)	Jumlah Proyek (2)	Realisasi Investasi (Ribu US \$) (3)	Tenaga Kerja	
			Indonesia (4)	Asing (5)
Kabupaten/Regency				
1. Paser	43	109.068,58	50	
2. Kutai Barat	58	198.435,49	2.029	22
3. Kutai Kartanegara	138	180.418,48	6.11	48
4. Kutai Timur	143	630.925,93	3.032	290
5. Berau	79	49.370,49	2.941	3
6. Penajam Paser Utara	24	9.866,00	131	
7. Mahakam Ulu	16	3.808,00	238	
Kota/Municipality				
1. Balikpapan	332	51.882,79	1.296	10
2. Samarinda	150	32.438,00	419	11
3. Bontang	22	8	1	
Kalimantan Timur	1.005	\$1.266.221,77	16.247	384

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2011	228	28.328.877.631.462
2012	211	30.478.370.000.000
2013	454	14.685.375.400.000
2014	357	37.872.764.871.600
2015	563	39.379.341.850.000
2016	714	23.312.967.480.000
2017	923	28.202.106.080.000
2018	1.033	33.814.483.540.000
2019	3.130	35.620.544.100.000
2020	4.702	80.377.920.480.000
2021	1.035	41.177.159.120.000
2022	7.711	57.765.915.399.500
Kalimantan Timur	1.005	\$1.266.221,77

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.8 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2022

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
	Bekerja pada Perusahaan PMA dan PMDN	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	21.266	228	93,27
2012	86.331	211	409,15
2013	107.565	454	236,93
2014	36.711	357	102,83
2015	91.522	563	162,56
2016	51.607	714	72,28
2017	24.355	923	26,39
2018	25.801	1.033	24,98
2019	36.244	4.702	7,71
2020	25.99	4.702	5,53
2021	27.405	1.035	26,48
2022	56.423	7.711	7,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.9 Jumlah Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2022

Sektor Usaha	Total
(1)	(2)
Kelautan dan Perikanan	394
Pertanian	13
Lingkungan Hidup	34
Kehutanan	75
Energi dan Sumber Daya Mineral	113
Ketenaganukliran	0
Perindustrian	0
Perdagangan	0
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0
Transportasi (Perhubungan)	178
Kesehatan	3
Pendidikan dan Kebudayaan	4
Pariwisata	0
Keagamaan	0
Ketenagakerjaan	0
Pertahanan dan Keamanan	0
Komunikasi dan Informatika	0
Sosial	9
Total	823

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



x x x x x
x x x x x

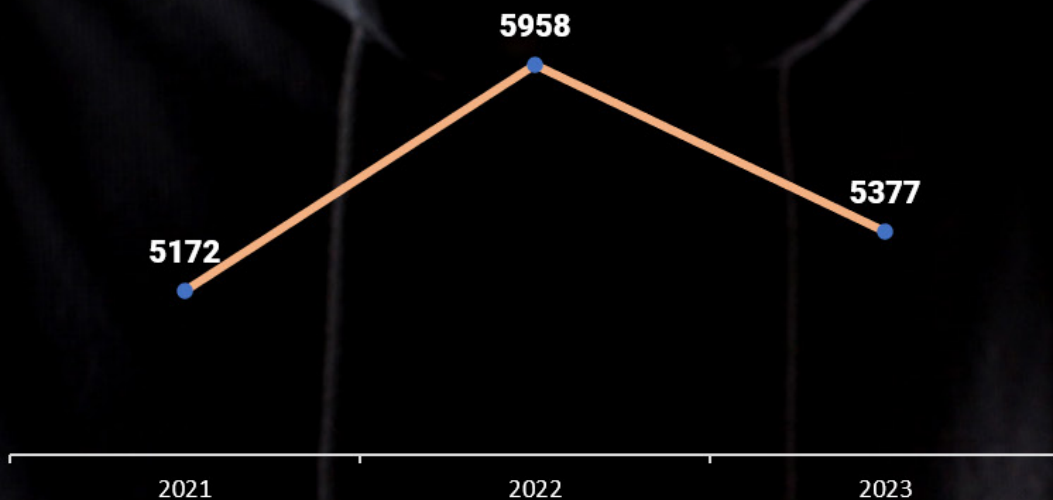
PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

Kalimantan Timur Tahun 2024

JUMLAH PELANGGARAN K3
(KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)

MENGALAMI **PENURUNAN**

MENJADI **5.377 KASUS**



BAB VII

**PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATPOL
PP**

7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas yakni dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

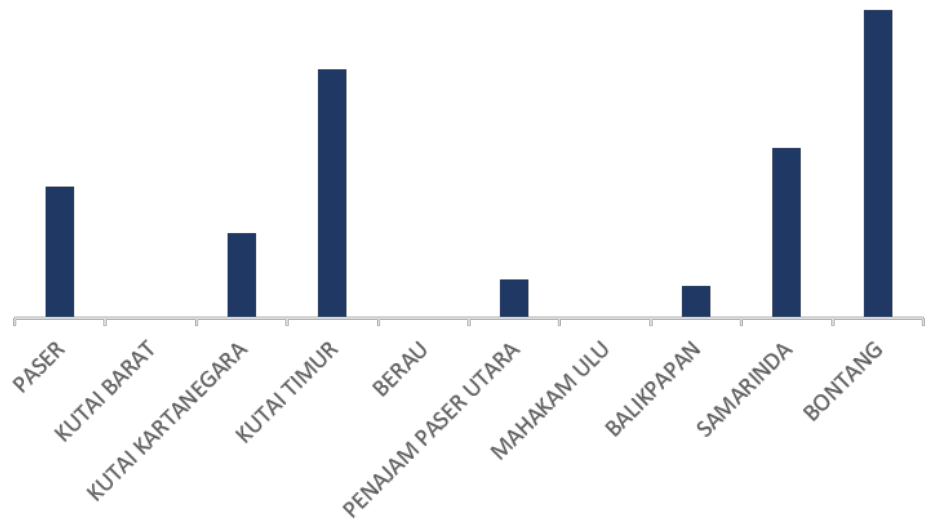
1. Penyusunan program badan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
5. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.





Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Grafik batang di bawah menunjukkan jumlah anggota FKDM di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 7.1.1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2022

Kategori	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penurunan Jumlah Konflik Sosial di Kalimantan Timur	48	70	12	102
2. Persentase Masyarakat Kalimantan Timur Khususnya Pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa	9814	68	3,052	16338
3. Persentase Penggunaan Hak-Hak Politik Masyarakat	6627	6627	675	675
4. Jumlah Ormas yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200	178	179	147

Tabel 7.1.2 Jumlah LSM Tahun 2020-2023

Kategori	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah LSM Lokal	4	3	1	0
Jumlah LSM Lokal Baru	0	3	0	0
Jumlah LSM Nasional	0	0	0	0
Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah	0	0	0	0
Jumlah LSM Aktif	4	27	0	0
Jumlah LSM Tidak Aktif	0	179	1	0
Jumlah LSM Terdaftar	4	206	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.3 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Anggota DPRD	385	385	385	385	385
Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin					
Kelamin					
- Laki-Laki	317	332	332	332	332
- Perempuan	68	68	68	68	68
Jumlah Fraksi DPRD	8	8	8	8	8
Partai Politik					
- Jumlah Parpol Peserta Pemilu	16	16	16	16	16

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.4 Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Satuan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sosialisasi Inpres No. 2 Tahun 2020 ke Toga, Tomas, Toda dan Tokoh Pemuda	Kegiatan	1	-	-
Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Kegiatan	4	2	1
Sosialisasi Pencegahan, Pemberanyasan dan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kab. Kutim	Kegiatan	-	1	-
tes Urine Bagi PNS dan Non PNs di Lingkungan Pemprov Kaltim	Kegiatan	-	-	1
Sosialisasi Pencegahan, Pemberanyasan dan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kab. PPU	Kegiatan	-	-	1
Rapat Penyusunan Rancangan Pergub P4Gn & PN di Kaltim	Kegiatan		1	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.5 Jumlah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASER	Orang	20	489/208/HK-KS/V/2020	20 Mei 2020	2020-2025
KUTAI BARAT	Orang		188.45/362/ BAKESBANGPOL/2021	29 Juli 2021	2021-2026
KUTAI KARTANEGARA	Orang	13	188.45-206/2018	7 Juni 2018	2018-2022
KUTAI TIMUR	Orang	38	135/SK-BUP/HK/2022	24 Maret 2022	2019-2023
BERAU	Orang				
PENAJAM PASER UTARA	Orang	6	223/K.707/2019	20 Desember 2019	2019-2022

Lanjutan Tabel 7.1.5

Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MAHAKAM ULU	Orang		220/237/2019	30 Desember 2019	2019-2023
BALIKPAPAN	Orang	5	134.3/KEP-67/2022	24 Januari 2022	2020-2024
SAMARINDA	Orang	26	100.3.3.1/K.26/2024	14 Februari 2024	2024-2028
BONTANG	Orang	47	800.05.300/K.152/2021		
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Orang		220/K.248/2015		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.6 Data Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023

Kab/Kota	Satuan	No SK	TGL SK	Masa Berlaku	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Paser	SK	134.3/KEP-282/2022	18/04/2022	2019 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Barat	SK	800.05.450/K.752/2021	04/08/21	2021 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Kartanegara	SK	102/SK-BUP/HK/2021	17/03/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Timur	SK	223/K.537/2022	16/06/2022	2019 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Berau	SK	353 TAHUN 2021	09/03/21	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Penajam Paser Utara	SK	223.05/227/2018	19/07/2018	2018 - 2023	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Mahakam Ulu	SK	800.300/K.141/2022	09/06/22	2022 - 2027	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Sudah Terbentuk
Kota Balikpapan	SK	118.45-107/2020	03/05/20	2020 - 2025	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Samarinda	SK	220/226/HK-KS/IV/2022	04/05/22	2022 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Bontang	SK	199/2017	04/12/17	2017 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Provinsi Kalimantan Timur	SK	450/K.349/2022	31/05/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.7 Data Pembentukan Forum pembauran kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2023

Kab/Kota	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Paser	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Barat	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Kartanegara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Kutai Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Berau	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Penajam Paser Utara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kab. Mahakam Ulu	SK	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses	Dalam Proses
Kota Balikpapan	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Samarinda	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kota Bontang	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Provinsi Kalimantan Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

7.2 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan



Masyarakat. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai Tugas untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Fungsi sebagai berikut:

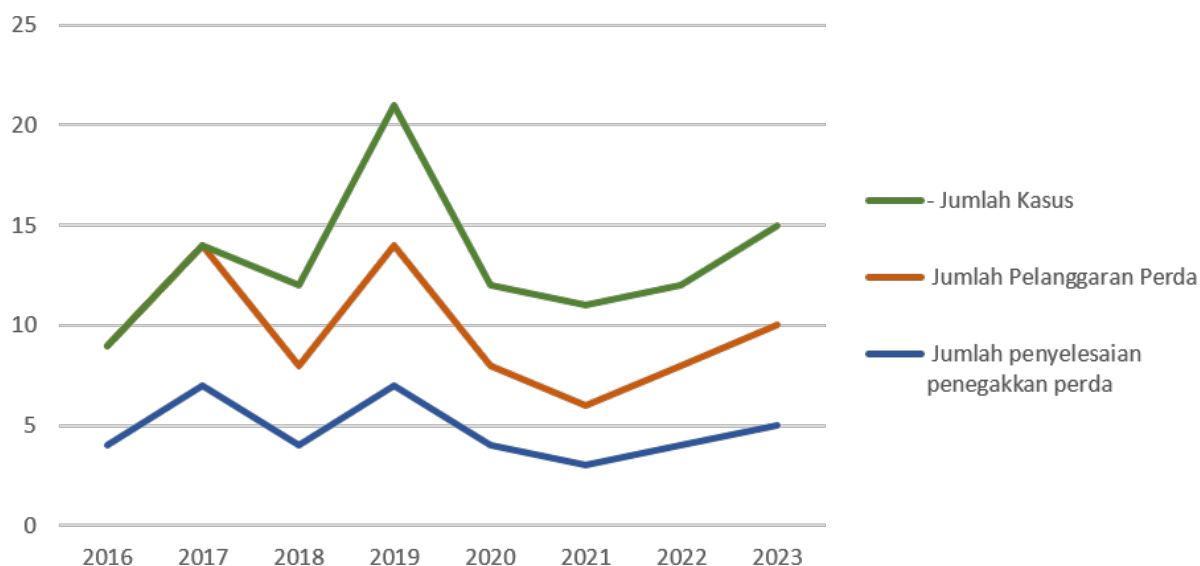
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ;
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah ;
4. Pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Masyarakat ;
5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Aparatur lainnya ;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah ;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasil dalam jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sasaran yaitu suatu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa Hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Jadi Sasaran yang diinginkan selama 5 tahun atau jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Penegakan Produk Hukum Daerah ;
2. Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat ;
4. Penanganan Kebakaran.

Grafik 7.2.1 Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Tabel 7.2.1 Data Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023

Kategori	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah penyelesaian penegakkan perda	4	7	4	7	4	3	4	5
Jumlah Pelanggaran Perda	5	7	4	7	4	3	4	5
Jumlah Kasus	0	0	4	7	4	5	4	5
Rasio Penegakan Perda	80	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.2 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2021-2023

Daftar Data (1)	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	Satuan (5)
Jumlah Aparat dan Sarana Keamanan				
1) Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja				
a. Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Provinsi)	173	173	174	Orang
b. Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja (Kabupaten/Kota)	1052	1275	941	Orang
2) Jumlah Petugas Perlingungan Masyarakat				
a. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Provinsi)	30	33	30	Orang
b. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Kabupaten/Kota)	22557	2256	782	Orang
3) Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	2793	470	194	Orang/Kali
4) Jumlah Pos Siskamling	12293	10449	1300	
- Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa (%)	0.49	79.31	81.67	
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5172	5958	5377	Kasus
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	4518	5823	5365	Kasus/Kali
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	47.42	47.33	43.82	%
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (%)	0.0077	0.02	9.09	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022

Indikator	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Angka Pelayanan Publik	84.9	81.42
Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	4
Jumlah pencegahan gangguan trantibum (%)	81.59	100
Jumlah penindakan atas gangguan trantibum (%)	52.29	100
Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah terlatih	10686	2492
Jumlah daerah rawan kebakaran (%)	0	100
Peta rawan kebakaran	1	1

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.4 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	99.86	100	87	80	100
Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (%)	100	56.17	83	70	100
Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat (%)	100	100	86	100	100
Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran (%)	60	90	78	50	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.5 Jumlah Aparat Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

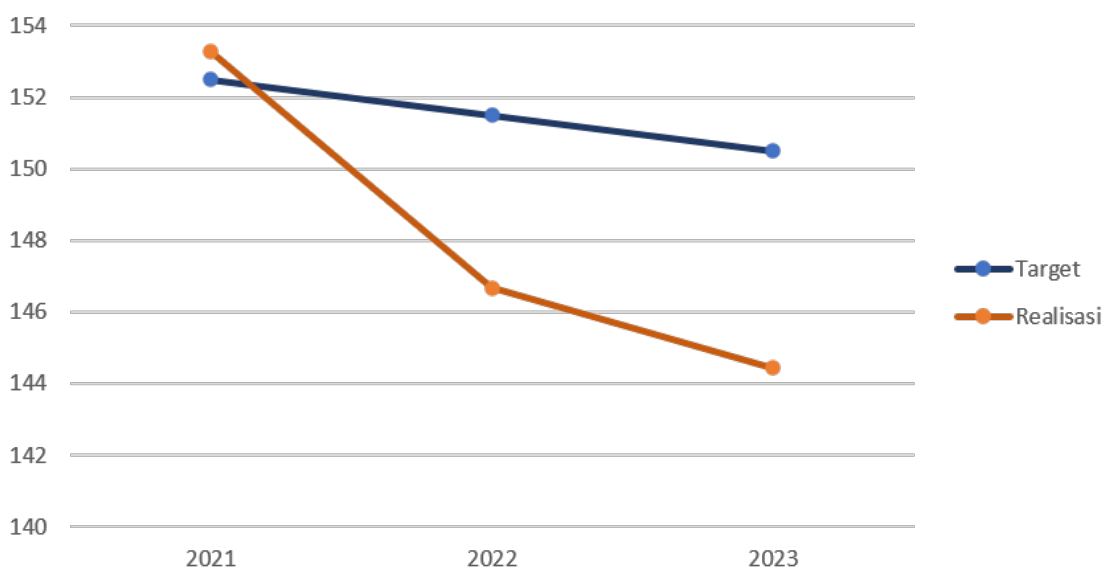
Aparat	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	193	0	1665	0	0
Kutai Barat	0	0	2623	0	0
Kutai Kartanegara	0	0	422	0	0
Kutai Timur	138	151	131	0	0
Berau	148	169	316	0	0
Penajam Paser Utara	197	0	231	255	0
Mahakam Ulu	0	0	75	0	0
Balikpapan	229	228	352	0	0
Bontang	101	100	850	0	0
Samarinda	0	0	631	0	0
Kalimantan Timur	145	172	173	176	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas utama yang mencakup pemberian pedoman dan arahan terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. BPBD juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta berperan dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selain itu, BPBD memiliki tanggung jawab melaporkan secara berkala kepada Presiden, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan baik dari dalam maupun luar negeri, serta memastikan penggunaan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijalankan sesuai peraturan. BPBD juga memiliki fungsi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, serta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

Grafik 7.3.1 Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Januari-Oktober 2022

No	Elemen Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana				
	1). Banjir	1,708	608	-	Orang
	2). Longsor	1	-	1	Orang
	3). Gempa	-	-	-	Orang
	4). Tsunami	-	-	-	Orang
	5). Konflik	-	-	-	Orang
2	Jumlah Kabupaten Lokasi	7	7	7	Lokasi
3	Jumlah Kota Lokasi	3	3	3	Lokasi
4	Jumlah Pengungsi Yang Telah Kembali	1,709	608	-	Orang
5	Jumlah Korban bencana Alam				
	1). Meninggal	3	-	-	Orang
	2). Hilang	-	-	-	Orang
	3). Luka-Luka	1	-	24,863	Orang
6	Jumlah Lokasi Bencana	245	452	188	Lokasi
	1). Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana	7	7	7	Kabupaten
	2). Jumlah Kota Lokasi Bencana	3	3	3	Kota
	3). Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	67		54	Kecamatan
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	80	100	100	%
8	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	4	12	13	Desa/ Kelurahan
9	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	56.40	100	100	%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Bencana			
	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan lahan	Tanah Longsor	Banjir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Kaltim	200	30	105	300
Kota Samarinda	60	2	67	32
Kota Balikpapan	54	13	28	31
Kota Bontang	4	1	0	64
Kab. Kutai Kartanegara	22	0	0	47
Kab. Kutai Timur	15	3	1	50
Kab. Penajam Paser Utara	6	4	3	30
Kab. Paser	13	0	1	27
Kab. Berau	18	5	1	7
Kab. Kutai Barat	5	2	3	11
Kab. Mahakam Hulu	3	0	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 7.3.2

Kabupaten/Kota	Jenis Bencana					
	Puting Beliung	Konflik	Kecelakaan Transportasi Udara	Kecelakaan		Wabah Penyakit
				Transportasi Sungai	Laut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Provinsi Kaltim	10	0	0	24	1	
Kota Samarinda	1	0	0	4	0	
Kota Balikpapan	2	0	0	1	0	
Kota Bontang	0	0	0	1	0	
Kab. Kutai Kartanegara	1	0	0	7	0	
Kab. Kutai Timur	0	0	0	2	0	
Kab. Penajam Paser Utara	3	0	0	1	0	
Kab. Paser	2	0	0	1	1	
Kab. Berau	1	0	0	2	0	
Kab. Kutai Barat	0	0	0	2	0	
Kab. Mahakam Hulu	0	0	0	3	0	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lanjutan Tabel 7.3.2

Kabupaten/Kota	Jenis Bencana			Total Kejadian
	Gempa Bumi dan Tsunami	Orang Tenggelam	Lain-lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Provinsi Kaltim	2	28	49	749
Kota Samarinda	0	5	26	197
Kota Balikpapan	0	2	16	147
Kota Bontang	0	0	0	70
Kab. Kutai Kartanegara	0	6	0	83
Kab. Kutai Timur	0	1	1	73
Kab. Penajam Paser Utara	0	2	5	54
Kab. Paser	1	2	1	49
Kab. Berau	1	6	0	41
Kab. Kutai Barat	0	3	0	26
Kab. Mahakam Hulu	0	1	0	9

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Elemen Data	Satuan	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Kawasan Rawan Longsor	Kabupaten/Kota	8
2	Jumlah Kawasan Rawan Banjir	Kabupaten/Kota	10
3	Jumlah Kawasan Rawan Angin topan	Kabupaten/Kota	7
4	Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran	Kabupaten/Kota	10
5	Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kabupaten/Kota	6
6	Jumlah Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kabupaten/Kota	1
7	Jumlah Kawasan Rawan Gagal Teknologi	Kabupaten/Kota	-
8	Jumlah Kawasan Rawan Konflik	Kabupaten/Kota	-
9	Jumlah Kawasan Rawan Tenggelam	Kabupaten/Kota	9
10	Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	Kabupaten/Kota	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.4 Kerusakan Kasawan Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023

No	Elemen Data	Satuan	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Longsor	Unit	124	62
2	banjir	Unit	27,189	9,770
3	Angin Topan / Puting Beliung	Unit	64	114
4	Kebakaran hutan dan lahan	Ha	52	2,750.91
5	Kebakaran Pemukiman	Unit	886	918
6	Gempa bumi	Unit	-	-
7	Gelombang Pasang	Unit	-	-
8	Gagal Teknologi	Unit	-	-
9	Konflik	Unit	-	-
10	Tenggelam	Jiwa	27	36

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.5 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	Kelas Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
1	Paser	196.40	196.40	196.40	196.40	Tinggi
2	Kutai Barat	156.40	156.40	156.40	156.40	Tinggi
3	Kutai Kartanegara	160.40	135.52	129.84	124.79	Sedang
4	Kutai Timur	190.00	190.00	190.00	190.00	Tinggi
5	Berau	202.40	202.40	202.40	202.40	Tinggi
6	Penajam Paser Utara	160.40	160.40	160.40	160.40	Tinggi
7	Mahakam Ulu	156.40	156.40	156.40	156.40	Tinggi
8	Balikpapan	159.20	108.14	108.14	108.14	Sedang
9	Bontang	150.00	150.00	150.00	150.00	Sedang
10	Samarinda	134.80	111.30	110.35	109.95	Sedang

* Catatan : nilai indeks risiko bencana yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Sumber Data : IRBI BNPB 2021

Lanjutan Tabel 7.3.5.

No	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	Kelas Risiko
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Paser	196.40	196.40	196.40	Tinggi
2	Kutai Barat	156.40	156.40	156.40	Tinggi
3	Kutai Kartanegara	124.79	119.16	119.16	Sedang
4	Kutai Timur	190.00	190.00	190.00	Tinggi
5	Berau	202.40	202.40	202.40	Tinggi
6	Penajam Paser Utara	160.40	158.32	151.70	Tinggi
7	Mahakam Ulu	156.40	156.40	156.40	Tinggi
8	Balikpapan	108.14	108.14	123.46	Sedang
9	Bontang	150.00	150.00	135.89	Sedang
10	Samarinda	102.94	102.94	101.05	Sedang

* Catatan : nilai indeks risiko bencana yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan. Sumber Data : IRBI BNPB 2021

PROFIL STATISTIK SEKTORAL PEMBANGUNAN

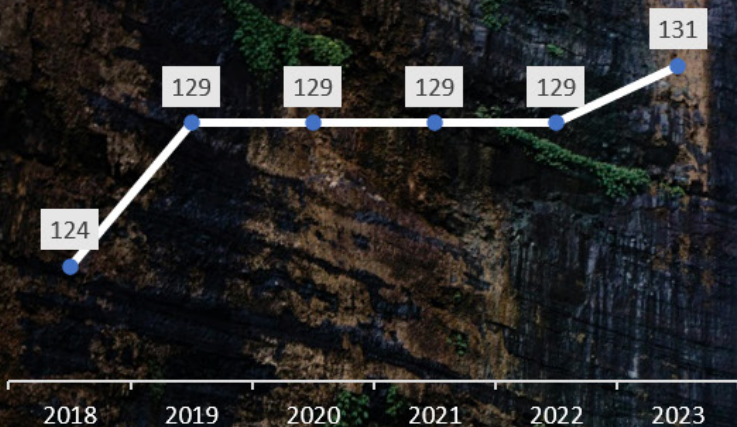
Kalimantan Timur Tahun 2024

x x x x x x
x x x x x x

x
x
x
x
x
x
x
x

TAHUN 2023
OBJEK WISATA ALAM
KALIMANTAN TIMUR
MENGALAMI

PENINGKATAN



DI TAHUN 2023
JUMLAH BIRO
PERJALANAN
SEBANYAK

439

BAB VIII

TELEKOMUNIKASI,
PARIWISATA

8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

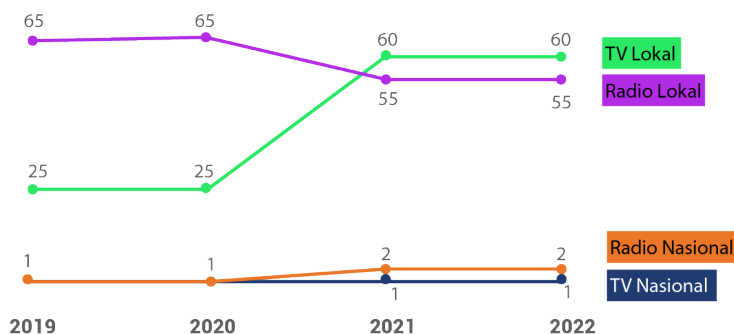
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo memiliki sejumlah fungsi yang sangat relevan.

Fungsi-fungsi Diskominfo termasuk perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Diskominfo bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di sektor komunikasi dan informatika.

Dinas ini juga memiliki peran dalam merumuskan, merencanakan, membina, dan mengendalikan kebijakan teknis terkait teknologi informasi, aplikasi telematika, dokumentasi, informasi, serta pos dan telekomunikasi. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan juga menjadi bagian dari tanggung jawab Diskominfo, bersama dengan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

Selain tugas-tugas utama tersebut, Diskominfo juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian, Diskominfo memiliki peran penting dalam mengelola dan memajukan bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut, serta mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

Grafik 8.1.1 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022





Grafik garis ini menggambarkan jumlah Penyiaran Media Elektronik yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019 hingga 2022. Data tersebut terbagi menjadi empat kategori, yaitu TV Lokal, TV Nasional, Radio Lokal, dan Radio Nasional.

Pertama, untuk kategori TV Lokal, jumlahnya tetap konstan pada 25 pada tahun 2019 dan 2020, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 60. Sementara itu, TV Nasional dan Radio Nasional menunjukkan stabilitas, dengan masing-masing hanya memiliki satu penyiaran selama seluruh periode yang diamati. Di sisi lain, Radio Lokal mengalami penurunan dari 65 pada tahun 2019 menjadi 55 pada tahun 2020, dan jumlahnya tetap stabil selama tahun 2021 dan 2022 pada angka 55.

Analisis dari data ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah TV Lokal yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022, yang dapat mencerminkan perkembangan industri penyiaran lokal di wilayah tersebut. Sementara itu, penyiaran TV Nasional dan Radio Nasional tetap dalam skala yang relatif kecil dan stabil selama periode yang diamati, sedangkan Radio Lokal mengalami penurunan kecil di awal tetapi kemudian stabil. Informasi ini dapat berguna untuk memahami dinamika media elektronik di Kalimantan Timur dan potensi pengaruhnya terhadap perkembangan informasi dan hiburan di provinsi tersebut.

Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Samarinda	4	-	-	-
2	Balikpapan	-	-	-	-
3	Bontang	13	-	-	-
4	Kutai Kartanegara	24	15.03	15.03	15.03
5	Kutai Timur	25	21.01	21.01	21.01
6	Kutai Barat	46	39.47	39.47	39.47
7	Paser	29	23.19	23.19	23.19
8	Penajam Paser Utara	17	-	-	-
9	Berau	38	17.17	17.17	17.17
10	Mahakam Ulu	6	6.12	6.12	6.12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2021-2023

No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Provider	5	5	5	Unit
2	Jumlah Pameran/EXPO	2	2	2	Unit
3	Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	997	841	841	
4	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	11	12	12	
5	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	5	5	5	Unit
6	Jaringan Telepon (operator telp kabel)	1	1	1	Unit
7	Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi	11	11	11	Desa
8	Stasiun Radio	57	57	57	Unit
9	Website Daerah	36	36	36	Unit

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.3 RPJM Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Nama Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	25	0	25	25
Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2	2	2	2
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	80	80	80	85
Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	80	80	80	80
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	3,14	2,22	3,44
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	70	70	70	71,5
Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.4 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2019-2023

Nama Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk	92	92	118	118	118
TV Lokal	25	25	60	60	60
TV Nasional	1	1	1	1	1
Radio Lokal	65	65	55	55	55
Radio Nasional	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pariwisata memiliki tugas mencakup perumusan dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang, seperti pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengendalian usaha jasa pariwisata, dan pengembangan karya seni budaya. Koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan juga menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata untuk mencapai pertumbuhan destinasi pariwisata Kalimantan Timur serta pengembangan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan supervisi atas urusan pemerintahan di berbagai aspek pariwisata. Pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian tugas di lingkungan Dinas Pariwisata juga termasuk dalam fungsi-fungsi yang diemban oleh instansi ini.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan rencana strategis, serta mengawasi pelaksanaan program-program di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, Dinas Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik instansi pemerintahan maupun pihak ketiga, untuk memastikan sinkronisasi dan optimalisasi program pariwisata. Melalui berbagai fungsi ini, Dinas Pariwisata berperan dalam memajukan sektor pariwisata Kalimantan Timur dan meningkatkan kualitas serta daya saing pariwisata daerah.

Grafik 8.2.1 Total Wisatawan dan Target Kunjungan Wisatawan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2022



Pertama, dari tahun 2016 hingga 2018, Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Total Wisatawan, naik dari 5.958.866 menjadi 7.542.294. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 6.948.118, tetapi jumlah wisatawan masih di atas Target Kunjungan Wisatawan pada tahun yang sama sebesar 5.500.000. Namun, terjadi perubahan yang dramatis pada tahun 2020, di mana Total Wisatawan turun tajam menjadi hanya 2.904.115, yang mungkin dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang membatasi perjalanan internasional. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan lagi menjadi 3.072.928, meskipun masih di bawah Target Kunjungan Wisatawan. Pada tahun 2022, Total Wisatawan mencapai 6.312.215, kembali mendekati atau bahkan melebihi Target

Kunjungan Wisatawan. Data ini mencerminkan dampak signifikan pandemi terhadap industri pariwisata di provinsi ini dan upaya pemulihan yang diikuti oleh pertumbuhan.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan fluktuasi dalam kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Timur selama periode yang diamati, dengan peningkatan yang signifikan sebelum pandemi, penurunan tajam pada tahun 2020, dan upaya pemulihan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Data ini memberikan informasi penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan mencapai target kunjungan wisatawan yang ditetapkan.



Tabel 8.2.1 Data Jumlah Hotel Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023

Jenis Hotel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hotel Bintang Lima							
1. Jumlah hotel	5	5	5	5	5	5	5
2. Jumlah Kamar	989	1038	1038	1038	1038	1038	3518
3. Jumlah Tempat Tidur	1676	461	461	784	784	784	868
Hotel Bintang Empat							
1. Jumlah hotel	13	16	16	14	14	14	19
2. Jumlah Kamar	5803	2646	2646	2646	2646	2646	5126
3. Jumlah Tempat Tidur	5258	2764	2764	2764	2764	2764	2844
Hotel Bintang Tiga							
1. Jumlah hotel	25	26	26	26	26	26	32
2. Jumlah Kamar	2522	2712	2712	2712	2712	2712	2711
3. Jumlah Tempat Tidur	2696	2577	2577	2577	2577	2577	2725
Hotel Bintang Dua							
1. Jumlah hotel	12	16	16	16	16	16	15
2. Jumlah Kamar	844	1177	1177	1177	1177	1177	1177
3. Jumlah Tempat Tidur	1372	613	613	613	613	613	613
Hotel Bintang Satu							
1. Jumlah hotel	14	9	9	9	9	9	5
2. Jumlah Kamar	1866	627	627	627	627	627	627
3. Jumlah Tempat Tidur	535	461	461	461	461	461	461
Hotel Non Bintang							
1. Jumlah hotel	873	413	420	413	413	413	333
2. Jumlah Kamar	9918	5050	5050	5903	5050	7004	7004
3. Jumlah Tempat Tidur	11540	1449	1449	1449	1449	3409	3409

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.2 Data Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2017-202

Jenis Objek Wisata	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Objek Wisata Alam	271	124	129	129	129	129	131
Objek Wisata Sejarah dan Budaya	120	63	177	68	68	68	37
Objek Wisata Buatan	152	85	150	89	89	89	83
Objek Wisata Kehidupan Masyarakat	48	5	5	5	5	5	5
Objek Wisata Bahari	48	65	48	69	69	69	32
Objek Wisata Taman Hutan Raya	5	7	7	7	7	7	5
Objek Wisata Nasional	4	3	4	4	4	4	3
Objek Wisata Taman Wisata Laut	64	2	64	2	2	2	2
Objek Wisata Hutan Mangrove	12	14	19	19	19	19	20
Objek Wisata Religi	26	23	26	37	37	26	42
Total Jenis Objek Wisata	750	391	629	429	429	809	360

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.3 Data jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2022

Tahun	Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata
	(2)
(1)	(2)
2016	585
2017	1875
2018	457
2019	457
2020	448
2021	448
2022	448
2023	439

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.4 Data jumlah tenaga kerja di hotel berbintang di kaltim 2022

Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Tenaga Kerja Laki Laki	1560	4762	4637	4559	4978	4978	4978
Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	1192	11112	1613	1576	1849	1849	1849

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.6 Data pramuwisata dan toko cinderamata provinsi kaltim 2016-2023

Pramuwisata & Toko Cinderamata	Jumlah Pramuwisata	Toko Cinderamata
(1)	(2)	(3)
2016	105	85
2017	87	81
2018	94	81
2019	94	81
2020	94	81
2021	69	75
2022	69	75
2023	985	147

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.5 Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kalimantan Timur Tahun 2017-2023

Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	2088	2085	2098	2098	2177	2177	4879

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur



La ENVIPE 2013 permite conocer que en
 población víctima de un delito o no denunció
 atribución a la autoridad, como consecuencia
 de tiempo y la desconfianza en la institución



Diskominfo

KALTIM



Clasificación de delitos	2012	2011
Delitos	61.2	63.2
Delitos	26.3	23.7
Delitos	24	14

Del total de las denuncias
 refiere que en el 53.2%
 2011, esta cifra fue

